

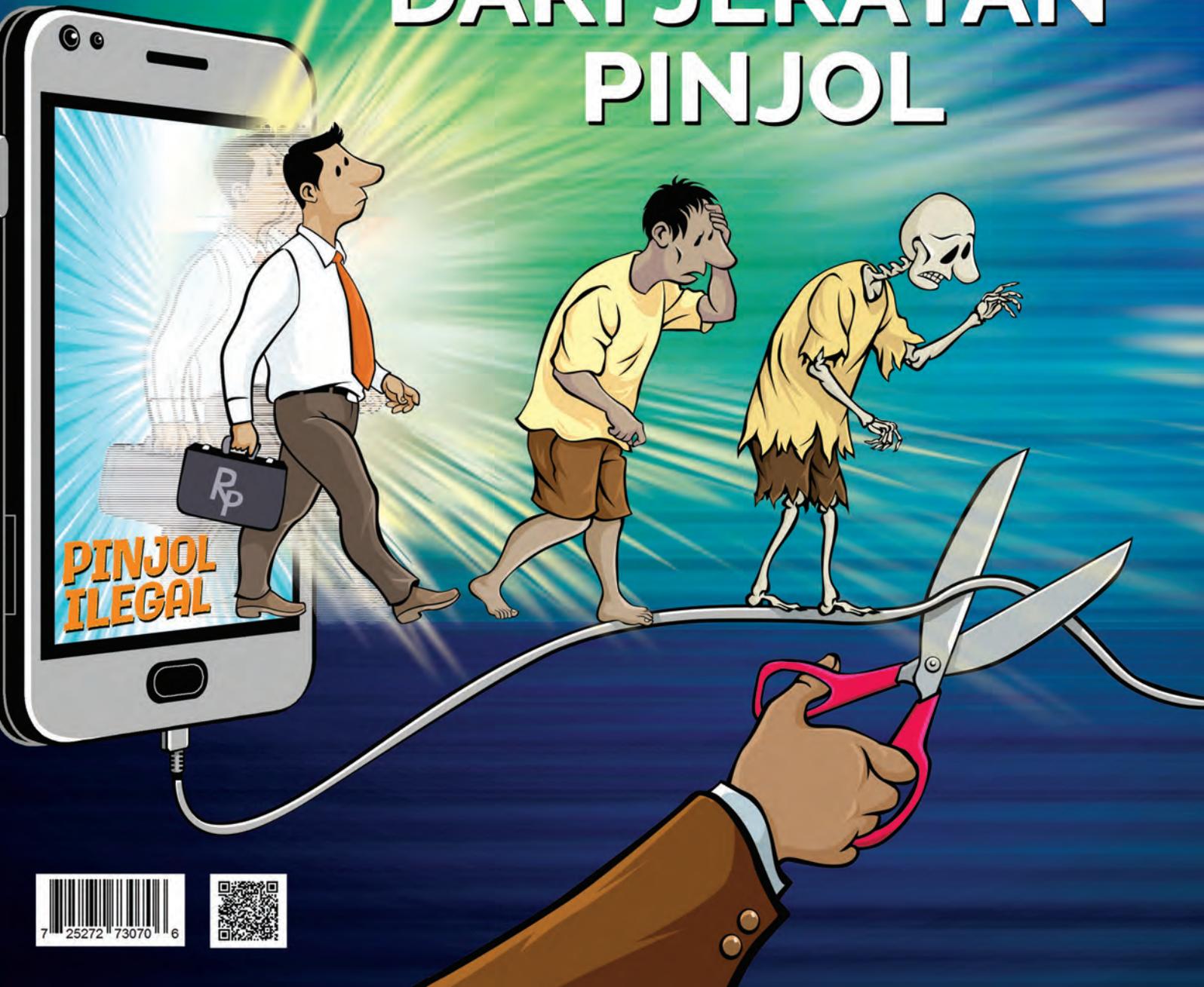


MAJALAH

Parlementaria

EDISI 203 • TH. 2021

LINDUNGI RAKYAT DARI JERATAN PINJOL



PENGANTAR REDAKSI

PRAKTIK pinjaman online (pinjol) akhir-akhir ini isunya mencuat ke permukaan. Banyak masyarakat terintimidasi akibat ketidakmampuan dan ketidakmengertian mereka atas praktik ini. Dalam hal ini, Negara harus hadir melindungi rakyat kecil yang terjerat praktik ini. DPR RI tak akan pernah berhenti untuk menjadi alarm bagi pemerintah ketika rakyatnya sedang kesusahan.

Lindungi Rakyat dari Jeratan Pinjol dipilih tim redaksi sebagai tema utama **Majalah Parleментарia 203**. Berkaca dari maraknya kasus pinjol, apalagi yang ilegal yang menjerat masyarakat, ada beberapa hal yang disoroti oleh DPR RI. Diantaranya, ketegasan hukum atas keberadaan pinjol yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai solusi atas keuangannya.

Kemudian stigma bahwasanya pinjol adalah solusi keuangan harus dipatahkan dengan cara memberi kemudahan akses perbankan bagi masyarakat kecil dan UMKM. Selain itu, pemerintah harus mengedukasi masyarakat dengan literasi-literasi digital finansial.

Kemudian di Rubrik Pengawasan, Tim Redaksi mengulas kebangkrutan Garuda Indonesia. DPR RI menginginkan pemerintah melakukan upaya-upaya penyelamatan maskapai kebanggaan anak bangsa ini. Selanjutnya di Rubrik Anggaran, Tim Redaksi mengupas polemik pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang anggarannya membengkak. DPR ingin ada audit atas penggunaan anggaran pada proyek tersebut.

Serta di Rubrik Legislasi, mengulas tentang Revisi UU No. 24 tentang Penanggulangan Bencana, yang masih terkatung-katung karena pemerintah belum menyepakati penguatan BNPB yang disyaratkan oleh Komisi VIII DPR RI.

Masih banyak lagi yang disajikan **Tim Redaksi Parleментарia** seperti rubrik Sorotan, Liputan Khusus, kemudian berita mengenai kegiatan Anggota DPR RI di dapilnya dalam rangka melaksanakan amanat konstitusinya sebagai wakil rakyat. Semuanya disajikan secara komprehensif sehingga sangat layak untuk dibaca.

Selamat membaca!

Parleментарia



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



@DPR_RI



@DPR_RI



DPR RI

w w w . d p r . g o . i d



Parleментарia

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S.Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I., Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds, Prima Danutirto, A.Md

ANGGOTA REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati, Rosnita

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

FOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna,
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Parlementaria

EDISI 203 • TH. 2021



5	MIMBAR DEMOKRASI Gus Muhaimin Minta Pemerintah Revisi PP 85 2021	30	PROFIL Krisdayanti : "Politik Pengabdian Seorang Diva"
6	PROLOG Dorong Pencegahan Praktik Pinjol Ilegal	34	KUNKER
	LAPORAN UTAMA	56	SOROTAN Tarif PCR harus Diupayakan Serendah Mungkin
10	Perkuat Pengawasan Pinjol	58	LIPUTAN KHUSUS Perdamaian, Fondasi Penting Pembangunan
12	Perkuat Hukum Layanan Digital Finansial	60	DAPIL
14	Mudahkan Akses Pinjaman	70	TOKOH Avila Bahar : "Muda Tak Halangi Avila Jadi Pembalap Profesional"
16	Perlu Penguatan Literasi Keuangan	72	PERNIK Meski Pandemi, KORPRI tetap Mengabdikan
18	Jerat Kasus Pinjaman Online	74	KIAT SEHAT Menenal 1000 Hari Pertama Kehidupan
	PENGAWASAN	76	WISATA Madakaripura : Air Terjun Indah nan Bersejarah
20	DPR Ajak Pemangku Kepentingan Selamatkan Garuda Indonesia	78	HOBİ Abdul Hakim Bafagih : Bersepeda, Cara Jaga Kebugaran
22	ANGGARAN PMN Kereta Cepat Diajukan, Perlu Audit Anggaran	79	POJOK PARLE Memetik Makna Sarung untuk Mengurung Ketamakan Duniawi
26	LEGISLASI Revisi UU Penanggulangan Bencana, Upaya DPR Perkuat BNPB		
28	FOTO BERITA		



Tak Ada Kibar

Merah Putih

di Thomas
Cup 2020

7im bulu tangkis Indonesia memenangi Piala Thomas 2020 di Denmark. Tetapi, pada waktu penyerahan trofi **tidak ada bendera Merah Putih yang berkibar**. Sontak, momen tersebut mengundang pembicaraan publik. Usut punya usut, ternyata **Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI)** dinilai tidak memenuhi aturan dan program anti-doping yang dari **Badan Anti-Doping Dunia (WADA)**. **Sanksi tersebut berdampak** kepada hak-hak Indonesia di olahraga internasional. Di antaranya **tidak diizinkan bendera negara berkibar** di event regional, kontinental hingga kejuaraan dunia atau event yang dimiliki organisasi major event, **terkecuali di Olimpiade dan Paralimpiade** hingga tidak diperbolehkannya Indonesia menjadi tuan rumah even olahraga internasional **selama satu tahun ke depan**.



Pendapat Anggota Dewan:



Ketua Komisi X DPR RI
Syaiful Huda (F-PKB)

"Pemerintah harus lebih terbuka dan tidak menutupi segala masalah yang menyangkut dengan WADA"



Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Agustina Wilujeng Pramestuti (F-PDI Perjuangan)

"Sanksi yang diberikan kepada Indonesia merupakan salah satu wujud ketidakmaksimalan dukungan bagi para olahragawan yang berjuang mengibarkan merah putih di forum internasional"



Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Hetifah Sjaifudian (F-Golkar)

"Walaupun LADI independen, tapi pemerintah harus mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Jangan sampai pemerintah menganggap semuanya berjalan baik. Padahal, banyak hal yang harus dibenahi"

Gus Muhaimin Minta Pemerintah Revisi PP 85 2021

ASPIRASI DARI AP2GB SOLAH H DAULAY

Pimpinan Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB) Solah H Daulay menemui Pimpinan DPR RI guna menyuarakan aspirasi terkait PP Nomor 85 Tahun 2021. Dimana, tujuan pemerintah dengan PP tersebut adalah untuk meningkatkan PNBP sektor perikanan. Namun justru membebani nelayan dan pelaku usaha perikanan. Aturan sebelumnya kategori kapal kurang dari 60 GT dikenakan tarif 1 persen.

Lalu PP Nomor 75 Tahun 2015 meningkat 5x sehingga menjadi 5 persen dengan kategori kapal kecil 30-60 GT. “Dan di PP 85/2021 GT kapal semakin kecil juga dikenakan yaitu Kapal dengan ukuran 5-60GT tarif 5 persen. Tarif PNBP 5 persen bagi nelayan kecil menurut kami mengada-ada, kami mempertanyakan KKP ini konsultasinya dengan siapa?” kata Solah.

Menerima aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta dengan tegas kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera merevisi PP tersebut.

“PP Nomor 85 Tahun 2021 ini menyulitkan dan membuat pelaku dan nelayan untuk memperbaiki ekonominya di masa pandemi ini. Oleh karena itu, DPR dengan tegas meminta kepada Pemerintah melalui Menteri Kelautan untuk segera merevisi, memperbaiki, mencabut PP Nomor 85 Tahun 2021, karena ini sangat-sangat memberatkan,” tegasnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Ia menilai PP tersebut terlampau ambisius untuk mengejar PNBP, padahal tidak ada target pemaksaan PNBP kepada KKP. Selain itu, menurutnya, PP tersebut disusun tanpa melibatkan dan mengajak nelayan dan para pelaku usaha perikanan, sehingga terindikasi menguntungkan pihak luar dan menguntungkan bisnis besar. ● es

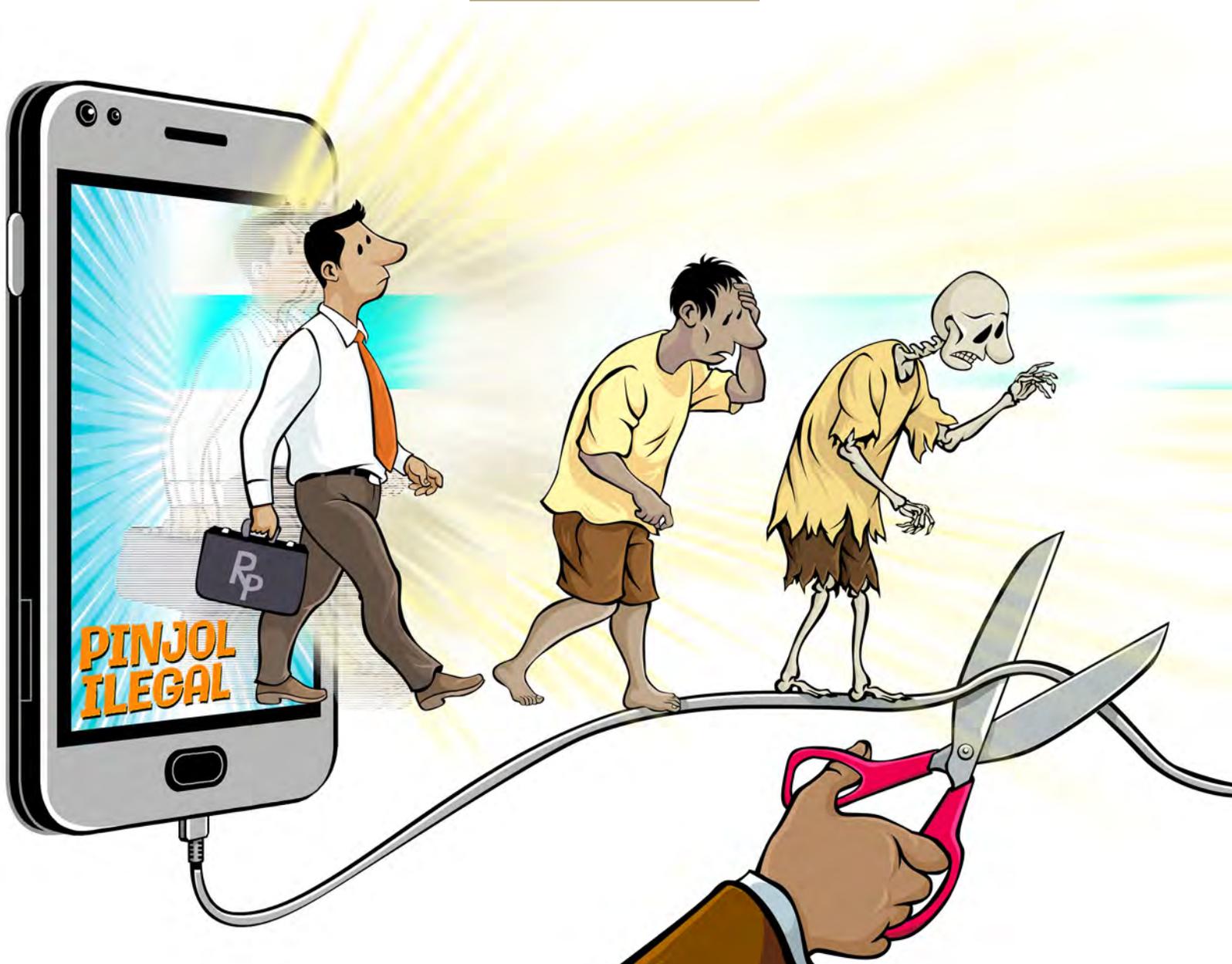


Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar foto bersama usai menerima aspirasi dari masyarakat. Foto: Ruri/Nvl

MIMBAR DEMOKRASI menghadirkan aspirasi dari masyarakat yang langsung diserap dan diterima oleh Anggota DPR RI di Rumah Rakyat agar segera dapat ditindaklanjuti baik oleh Anggota DPR RI maupun oleh Pemerintah

Dorong Pencegahan Praktik Pinjol Ilegal

DPR RI terus mendorong agar fungsi parlemen dapat berperan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan fungsi pengawasan tersebut, parlemen akan mengarahkan fungsi itu dalam memastikan pelayanan pemerintahan bisa berjalan secara baik di berbagai sektor dan isu. Adapun salah satu isu yang menjadi perhatian saat ini ialah maraknya pinjaman *online* (pinjol) yang tak sedikit pula praktiknya ilegal.





“BERBAGAI permasalahan yang saat ini menjadi perhatian luas dari rakyat antara lain kasus pinjaman *online* ilegal,” ujar

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Di tengah maraknya korban dari pelaku pinjol tak berizin itu, Puan turut mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyedot sementara izin pinjol baru untuk meminimalisir penyalahgunaan lewat layanan aplikasi digital ini.

Adanya kasus pinjol ini, Puan kembali mengajak pemerintah untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) demi mencegah penyalahgunaan data pribadi warga dan menghukum pelakunya lebih berat lagi. Sebab, selama ini pelaku pinjol ilegal hanya dijerat dengan KUHP, UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen.

“Dengan adanya UU PDP nanti, pelaku pinjol ilegal yang menyalahgunakan data pribadi warga akan diganjar hukuman lagi, sehingga hukumannya semakin berlipat,” tegas Puan. Ia juga mendorong pemerintah untuk terus menggenjatkan literasi digital dan literasi keuangan ke masyarakat.

Strategi itu akan membantu pemerintah dalam rangka pencegahan dari jeratan utang dari praktik pinjol, baik yang ilegal maupun tidak. “Kalau pencegahan dan penindakan bisa berjalan bersamaan, masyarakat akan semakin terlindungi dari jeratan lintah darat digital ini,” sebut Puan.

PINJOL ILEGAL MASIH MENJAMUR

Dari sisi pengawasan, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun sempat menyebutkan bahwa OJK harus lebih berperan, apalagi lembaga

itu sebenarnya punya unit penindakan khusus. Sehingga, Misbakhun berharap OJK dapat berperan lebih maksimal terkait kasus pinjol itu.

Sementara Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya menilai sebaiknya OJK tidak memberikan izin baru lagi kepada bisnis pinjol. Pasalnya, menurut Agung Rai dasar hukum yang mengatur bisnis pinjol masih belum kuat. Ketiadaan dasar hukum itu rentan merugikan para peminjam dari lembaga kredit keuangan tak berizin itu.

Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil beranggapan bahwa penindakan terhadap pelaku pinjol oleh aparat keamanan sudah tepat. Untuk itu ia mengapresiasi kinerja kepolisian untuk menangkap dan menjerang para pelaku tersebut. Namun ia tetap menegaskan bahwa negara harus tetap berusaha mencegah kasus peminjaman tanpa izin ini berlaku lagi dan merugikan masyarakat.

Sebenarnya ketertarikan masyarakat akan pinjol menurut Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun tak dapat dibendung apalagi menyalahkan kepada masyarakat secara langsung. Ia melihat masyarakat kecil terkadang masih kesulitan mengakses layanan peminjaman jalur konvensional. Tak

heran, situasi tersebut membuat pinjol ilegal mendapatkan sasaran empuk untuk korban barunya.

Oleh karena kesulitan mengakses pinjaman itulah, maka Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengingatkan pemerintah agar dapat membantu masyarakat kecil menemukan solusi bantuan keuangan yang lebih mudah dan cepat. Ia menegaskan negara harus hadir memberikan alternatif bagi akar permasalahan fenomena pinjol ilegal itu, salah satunya mungkin dengan memperkuat pinjaman keuangan melalui penguatan anak perusahaan perbankan yang ada saat ini.

Selain problem pengawasan dan penindakan pelaku pinjol ilegal serta persoalan akses kredit oleh masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat soal keuangan ditengarai juga mendorong maraknya kasus pinjol ilegal. Untuk itulah Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati terus mendorong, tidak hanya OJK, namun juga Bank Indonesia (BI) untuk secara masif mengedukasi pinjaman atau investasi yang aman kepada masyarakat luas.

Pendapat pentingnya edukasi yang disampaikan Indah juga senada dengan Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno serta Anggota Komisi XI Heri Gunawan. Heri bilang, salah strategi pemberantasan pinjol ilegal bisa melalui pencegahan yakni mengintensifkan literasi dan edukasi kepada masyarakat soal bahaya pinjol ilegal dan bagaimana memperoleh akses pinjaman yang berizin.

Pada akhirnya, berbagai kasus pinjol ilegal yang ramai dikeluhkan masyarakat saat ini turut menjadi perhatian DPR RI. Untuk itu berbagai pandangan, tanggapan, usulan serta dorongan agar persoalan ini dapat diselesaikan dan dicegah untuk terjadi di masa yang akan datang secara komprehensif terus mengemuka lewat pendapatan para Anggota DPR RI. Dengan harapan, tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dari praktik jahat lembaga peminjaman yang tak resmi tersebut. ●

tim laput

WAKIL KETUA DPR RI RACHMAT GOBEL MENINGATKAN PEMERINTAH AGAR DAPAT MEMBANTU MASYARAKAT KECIL MENEMUKAN SOLUSI BANTUAN KEUANGAN YANG LEBIH MUDAH DAN CEPAT

PINJOL ILEGAL Meresahkan Masyarakat

Faktor Maraknya Pinjol Ilegal

Kemudahan mengunggah aplikasi pinjol ilegal

Server bertempat diluar negeri

Literasi keuangan masyarakat rendah

Pemahaman masyarakat soal pinjol masih lemah

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Modus Pinjol Ilegal

Mentransfer uang ke rekening korban, kendati tidak meminjam

Penawaran lewat SMS dari nomor asing

Namanya meniru pinjol legal untuk mengelabui korban

Penawaran tanpa syarat

Ciri Pinjol Ilegal

Suku bunga tinggi

Teror atau intimidasi

Denda tidak terbatas

Fee besar



Blokir Pinjol Ilegal



Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan **cepat** telah dimanfaatkan oleh pelaku pinjol ilegal.

Jumlah Platform Pinjol Ilegal Yang Telah Diblokir	Tahun	Jumlah Platform
	2018	404
	2019	1.493
	2020	1.026
	2021	593*

Sumber: OJK

*) Data per 15 Oktober 2021

Infografis:
Prima Danutirto



Fakta Seputar Pinjol Ilegal

Tips Lakukan Pinjaman Online



- Menawarkan fee sangat tinggi
- Suku bunga dan denda terlalu tinggi
- Tidak punya layanan pengaduan
- Meminta semua akses data dan kontak di ponsel
- Pinjamlah kepada lembaga kredit terdaftar di OJK
- Pinjam sesuai kebutuhan
- Perhatikan kemampuan melunasi
- Lakukan pinjaman untuk kegiatan yang produktif
- Pahami manfaat, risiko dan kewajiban dari pinjaman

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Jumlah Pengaduan Masyarakat

*) Data per 15 Oktober 2021



Total Pengaduan:
19.711

(Periode 2019-2021)*

Sumber: OJK



Perkuat Pengawasan Pinjol

Kasus menjamurnya pinjaman *online* (pinjol) ilegal saat ini mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan. Masyarakat turut mempertanyakan bagaimana bisnis kredit internet itu diawasi selama ini. DPR RI sendiri tidak tinggal diam, Anggota DPR RI mendesak lembaga-lembaga yang berkaitan dalam pemberian izin usaha pinjol dan pengawasannya untuk dapat segera bertindak.



KONDISI dimana banyak pinjol ilegal yang memakan korban dari masyarakat kecil juga tak luput dari perhatian Anggota

Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun. Menurut pengamatannya keberadaan pinjol tak berizin sudah terlalu marak dan menjadi beban bagi masyarakat. Namun demikian ia juga mempertanyakan sejauh mana peran lembaga pengawasan terkait sektor keuangan selama ini.

“Ini menjadi pertanyaan, kenapa mereka (pinjol ilegal) prakteknya masif di masyarakat. Tapi yang bertindak bukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melainkan lebih banyak polisi,” ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut. Sebagaimana diketahui OJK salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan lembaga keuangan dalam hal ini pengawasan *fintech* (Financial Technology).

Dengan maraknya isu pinjol, menurut Misbakhun, OJK harus lebih berperan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan pinjol ilegal yang sangat meresahkan. Apalagi lembaga yang didirikan 9

tahun yang lalu itu sebenarnya punya unit penindakan khusus. Sehingga, Misbakhun berharap OJK dapat berperan lebih maksimal terkait kasus pinjol itu.

PINJOL ILEGAL MASIH BANYAK

Legislator dapil Jawa Timur II itu juga mengajak pemerintah secara umum dan OJK secara khusus untuk mengevaluasi kembali regulasi pengkreditan di Indonesia selama ini. Sebab kata Misbakhun, saat ini kondisinya jumlah pinjol

ilegal lebih banyak ketimbang yang resmi. Adapun mengutip data dari Satgas Waspada Investasi (SWI), jumlah pinjol ilegal di tanah air tergolong besar.

Dimana, SWI telah mencatat bahwa pada 2019 terdapat 1.493 entitas pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia telah dihentikan operasinya. Lalu pada 2020, jumlah entitas yang menawarkan pinjaman dana tanpa izin otoritas itu berkurang, dimana tercatat 1.026 platform telah diblokir. Sedangkan data terakhir di 2021 tersisa 593 entitas pinjol



Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun. Foto: Andri/mvl

ilegal yang beroperasi dan dihentikan operasinya.

Jumlah pinjol tak berizin itu kalah jauh jika dibandingkan dengan pinjol resmi yang terdaftar dan berizin di OJK yakni sebanyak 104 entitas. Untuk itu kata Misbakhun, perlu peninjauan kembali apakah aturan di OJK saat ini membuat usaha pinjol sulit mendaftarkan diri, apakah terlalu rumit dan birokratis sehingga memilih jalan ilegal.

Lebih lanjut Misbakhun juga mewanti-wanti agar beragam pinjol ilegal yang beredar tidak menciptakan ekosistem lintah darat di dunia maya yang imbasnya merugikan masyarakat umum. "Pinjol jangan sampai menjadi rentenir digital dan bertransformasi ke arah itu. Maka ini jadi bahan introspeksi OJK, khususnya terkait Industri Keuangan Non Bank (IKNB)," ungkapnya.

Sebab, ia melanjutkan, OJK memiliki kewenangan dan cakupan seputar industri keuangan yang luas mulai dari perbankan hingga investasi. Sementara OJK juga memiliki direktorat sendiri yang mengurus seputar IKNB. Keberadaan pengawasan di IKNB secara umum juga menjadi sorotan Misbakhun, dimana tidak hanya kasus pinjaman saja namun juga meliputi kasus-kasus gagal bayar asuransi.

"Sejauh ini seperti apa pengawasan di IKNB ini. Dengan kewenangan dan kekuasaan yang ada harusnya dapat menyelesaikan masalah. Inilah yang di persidangan akan kami bahas dengan OJK," tuntasnya.

STOP PINJOL BARU

Dalam kesempatan yang berbeda Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya menilai sebaiknya pemerintah dalam hal ini OJK tidak memberikan izin baru lagi kepada bisnis pinjol. "Yang sudah jalan biarlah berjalan, namun yang baru jangan dikasih izin dahulu," sebutnya. Sebab menurutnya dasar hukum yang mengatur bisnis pinjol masih belum kuat.

MASYARAKAT JUGA JANGAN TERGIUR IMING-IMING GAMPANG DI DEPAN, SAKIT DI BELAKANG DAN AGAR TIDAK MUDAH TERGIUR DENGAN IMING-IMING CEPAT,"

Anggota Komisi XI DPR RI
I Gusti Agung Rai Wirajaya.
Foto: Suci/nvi

Seperti yang diketahui, penyalur pinjaman yang selama ini diakui seperti; Bank umum atau konvensional, Bank Syariah, BPR maupun BPR konvensional. Menurut Agung Rai, pinjol selama ini hanya mengandalkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) saja, terkait dasar hukum yang lebih tinggi lagi memang belum ada. Tentu, dengan tidak adanya badan hukum, tidak akan kuat dalam melakukan kegiatan di masyarakat.

"Lebih baik diberikan ke perbankan untuk menyalurkan (pinjaman) secara digital. Kalau tidak ada dasar hukum yang jelas, hanya POJK saja maka saya rasa tidak cukup kuat," sebut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. Agung mempertanyakan terkait sumber dana, bahwa dibandingkan dengan perbankan, uang yang disalurkan adalah jelas dana masyarakat yang dikelola. Sementara

dana pinjol ia mengakui belum tau jelas dana siapa yang disalurkan.

Lebih lanjut Agung mendorong penyelidikan lebih mendalam terkait menjamurnya pinjol ilegal saat ini. Jangan sampai sumber uangnya tidak berasal dari penjualan narkoba atau pencucian uang hasil korupsi.

Kondisi masih tingginya minat akan pinjol sebenarnya menurut Agung tak lepas dari perkembangan Teknologi Informasi (TI) saat ini menjadikan sebagian besar pekerjaan dipermudah melalui gawai. Termasuk kemudahan dalam transaksi keuangan.

"Namun, perlu diperhatikan dapat dampak negatif yang ditimbulkan. Masyarakat juga jangan tergiur iming-iming gampang di depan, sakit di belakang dan agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming cepat," pungkas Legislator Dapil Bali itu. ● ah/es



Perkuat Hukum Layanan Digital Finansial

Besar pasak, daripada tiang. Begitu kisah singkat kasus pinjaman online (pinjol) ilegal. Memakan banyak korban hingga berakhir bunuh diri akibat tagihan yang tidak masuk akal. Serba upaya dilakukan guna membatasi habis agar kesalahan yang sama tidak terulang. Di antaranya dengan menguatkan penegakan hukum terhadap pinjol di Indonesia.



MENGUTIP pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate pertengahan Oktober lalu, dimana terdapat

68 juta orang Indonesia memanfaatkan berbagai layanan digital finansial. Keuntungan yang diraup pun tak main-main, diperkirakan angkanya mencapai Rp260 triliun. Namun, pinjol ilegal seringkali berujung pada pemerasan akibat dijebak dengan beragam masalah mulai dari bunga yang sangat tinggi dengan jangka waktu pembayaran yang pendek. Jika tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan maka penagihan bisa berbentuk seperti ancaman tindakan kriminal.

Dengan semakin menjamurnya kejadian tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Kementerian Kominfo, OJK, dan Bank Indonesia juga Polri untuk segera bertindak sekaligus menutup celah peluang praktik pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat.

Terhitung hingga Oktober 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menutup

4.874 akun pinjol di berbagai jenis platform digital. Kemudian, OJK sudah menghentikan perizinan pinjol ilegal sebanyak 3.516 entitas. Berdasarkan keterangan Badan Reserse Kriminal Polri, terdapat 371 laporan pinjol ilegal yang sedang ditangani.

Berhadapan dengan realitas yang tidak bisa dielakan, Komisi III DPR RI turut menaruh perhatian besar pemberantasan pinjol ilegal. Andil dalam penguatan kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan,

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menekankan, fenomena pinjol ilegal harus dilihat dari dua sisi penyebab yang berawal dari peluang di tengah kepelikan situasi dan kondisi.

“Pinjol memang telah merugikan begitu banyak masyarakat. Saya melihat dalam dua konteks kepentingan. Jadi jangan menyalahkan pinjol saja, tetapi kita harus mampu untuk mawas diri kenapa pinjol (ilegal) itu terjadi.” terang Adang kepada **Parlementaria**.

Pertama, ia menjelaskan, suburnya layanan pinjol ilegal ini akibat pinjaman jalur konvensional sulit diperoleh karena agunan yang susah dipenuhi. Diperparah pandemi Covid-19, banyak masyarakat Indonesia meminjam lewat pinjol agar bisa tetap bertahan memenuhi kebutuhan hidup.



Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun. Foto: Jaka/nvi

Selanjutnya, kedua, tidak mudahnya mendapatkan modal usaha terutama untuk modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akibat terbatasnya akses yang disediakan oleh negara. Sehingga, sebagian pengusaha UMKM jadi lebih memilih menggunakan layanan pinjol agar memperoleh kucuran modal cepat.

Menilai dari serangkaian situasi dan kondisi tersebut, ia menekankan dengan adanya celah-celah tersebut, banyak pinjol ilegal akhirnya menjerat dengan menawarkan harapan manis mewujudkan segala cita dan keinginan tanpa beban. “Oleh karena itu, kita tidak bisa melihat dari permukaan saja. Tidak hanya kejelasan dan penegakan hukum yang harus hadir, namun pemerintah juga harus ada menyelesaikan masalah hingga ke akarnya.” imbuh Anggota Fraksi PKS itu.

Senada dengan Adang, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengibaratkan menjamurnya pinjol ilegal ini seperti ‘semut ketemu sarangnya’. Sulitnya memperoleh pinjaman karena administrasi berbelit, lalu situasi ekonomi yang menghimpit, membuat pinjol ilegal memanfaatkan situasi tersebut.

“Mereka mau pinjam ke bank itu berbelit-belit dan belum tentu mereka juga mendapatkan pinjaman, mereka harus ada agunan dan lain sebagainya. Sementara ada tempat yang siap untuk menyediakan, jadi masyarakat tidak mengambil pusing. Yang memiliki pinjaman online ilegal ini memang memanfaatkan situasi ini yang disayangkan kenapa tidak terendus sejak awal sehingga kemudian,” jelas Nasir.

Walaupun pemerintah telah bertindak, ia tetap mengapresiasi kerja pemerintah terutama Polri yang segera menindak laporan kasus pinjol ilegal, sekaligus Kementerian Kominfo yang memblokir saluran penyedia layanan pinjol ilegal. Namun, dirinya tetap menekankan negara harus tetap berusaha melindungi dengan

MEREKA MAU PINJAM KE BANK ITU BERBELIT-BELIT DAN BELUM TENTU MEREKA JUGA MENDAPATKAN PINJAMAN, MEREKA HARUS ADA AGUNAN DAN LAIN SEBAGAINYA. SEMENTARA ADA TEMPAT YANG SIAP UNTUK MENYEDIAKAN, JADI MASYARAKAT TIDAK MENGAMBIL PUSING...

Anggota Komisi III DPR RI
Muhammad Nasir Djamil.
Foto: Jaka/mvi



mencegah sekaligus memberikan solusi untuk penyelesaian kasus tersebut.

TUTUP CELAH PINJOL ILEGAL

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa korban pinjol ilegal tidak perlu membayar tagihan, Tidak hanya menyarankan untuk tidak membayar tagihan, Pemerintah berupaya mendorong para korban pinjol ilegal untuk melapor Polisi.

Nantinya, para pelaku pinjol ilegal akan dikenakan hukuman atas UU ITE, tindakan pemerasan, perbuatan yang tidak menyenangkan, hingga perlindungan konsumen. Seperti, pasal 368 KUH Pidana Pemerasan, pasal 335 KUH Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE Pasal 29 dan Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3.

Menanggapi pernyataan tersebut,

Nasir menegaskan keinginan itu perlu didukung dengan membuat kebijakan sekaligus memperkuat hukum yang mengatur pengawasan layanan digital finansial Indonesia.

“(Pernyataan itu) itu harus ditindak lanjuti dengan regulasi atau mencari celah-celah regulasi yang ada untuk membenarkan apa yang dikatakan Pak Mahfud itu. Apapun ceritanya dalam pandangan saya, negara harus mempunyai regulasi untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tersebut.” jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya ingin setiap elemen pendukung kerja pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian, dan Kementerian terkait tidak hanya menindak, namun mengambil sejumlah langkah preventif. “Negara harus bertanggung jawab. Dan, saya berharap ditindaklanjuti dengan mencari celah regulasi sehingga kemudian tidak ada buntutnya dikemudian hari.” tandasnya. ● ts/ah/es

Mudahkan Akses Pinjaman

Bak fenomena gunung es, kasus-kasus pinjaman online (pinjol) yang memakan korban dari masyarakat secara masif muncul ke permukaan. Penyebab maraknya pinjol ini cukup beragam, salah satunya permasalahan akses pinjaman masih belum berpihak kepada rakyat kecil.



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.
Foto : Jaka/nvl



WAKIL Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengakui bahwa popularnya penggunaan pinjol lantaran kebutuhan masyarakat

akan akses keuangan yang mudah dan cepat. Apalagi di tengah kondisi pandemi yang berdampak pada perekonomian, pinjol dinilai sebagai satu-satunya lembaga pinjaman uang yang cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut tak seperti lembaga pinjaman keuangan formal, seperti perbankan, yang membutuhkan banyak persyaratan.

Kecenderungan minat yang lebih tinggi untuk akses keuangan sebagai permodalan usaha mikro terhadap pinjol ini berbanding terbalik dibandingkan akses terhadap lembaga keuangan perbankan. Mengutip data Bank Indonesia, Gobel menjabarkan posisi (*outstanding*) untuk usaha mikro pada periode Juni 2020 hingga Juni 2021 turun 22,94 persen, atau dari Rp286,755 triliun menjadi Rp220,973 triliun.

“Hal ini tentu memprihatinkan, dan harus menjadi perhatian kita. Padahal pada periode yang sama untuk skala Usaha Kecil dan Menengah naik, masing-masing 15,9 persen dan 9,03 persen,” terang Gobel. Sayangnya peningkatan minat permodalan itu masih tersalurkan ke lembaga peminjaman tak berizin seperti pinjol ilegal.

Pinjol ilegal pun memakan korban rakyat kecil. Untuk itu kepolisian turun tangan dengan menangani 371 laporan kasus pinjol ilegal yang tengah diproses. Tak tinggal diam, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga bertindak dimana terdapat penutupan operasi

3.365 pinjol ilegal.

Gobel turut mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah lewat kepolisian dan OJK tersebut. Namun ia menilai langkah penindakan saja tidaklah cukup untuk menalangi fenomena menjamurnya pinjaman digital itu.

Legislator dapil Gorontalo itu meminta pemerintah untuk mendorong berbagai upaya dalam menalangi problem akses keuangan masyarakat yang menjadi salah satu penyebab menjamurnya pinjol ilegal. Gobel menegaskan masyarakat kecil harus diberikan solusi bantuan keuangan yang lebih mudah dan cepat.

Untuk itu ia mengharapkan negara harus hadir memberikan alternatif jalan keluar untuk dapatkan bantuan. Di antaranya dengan memperkuat pinjaman keuangan melalui penguatan anak perusahaan perbankan, salah satunya adalah BRI yang memiliki PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) dan Koperasi.

Sebab, pembiayaan untuk UMKM ini tergolong masih kecil, yang hanya mencapai 19,6 persen dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan perbankan. Bahkan, jika menggunakan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), rasio kredit yang diterima UMKM baru tujuh persen. “Jauh lebih kecil dibanding Malaysia dan Thailand,” jelas Gobel.

SOROTI PENGAWASAN DAN REGULASI

Dari sisi kelembagaan, kasus pinjol juga mendapatkan sorotan penuh DPR terhadap OJK. Sorotan itu mulai dari sisi lemahnya aturan, pengawasan, hingga internal komisioner OJK sendiri. Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthi, DPR RI sudah berulang kali ingatkan OJK untuk bisa mencegah, menindaklanjuti, dan mengawasi secara tegas, baik bagi pinjol legal maupun ilegal.

Sikap OJK untuk mencegah fenomena pinjol ini dinilai cenderung

“SEKARANG KARENA KASUSNYA SEMAKIN NAIK, AKHIRNYA PRESIDEN YANG MENYAMPAIKAN. MASA, HARUS PRESIDEN YANG TURUN TANGAN?”

Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthi. Foto: Mentari/nvl



lambat sehingga akhirnya Presiden Jokowi harus turun tangan dan meminta Kapolri untuk lakukan penindakan. “Sekarang karena kasusnya semakin naik, akhirnya presiden yang menyampaikan. Masa, harus presiden yang turun tangan?” tegas Vera.

Lemahnya pengawasan dan pencegahan dari OJK ini salah satunya dinilai karena lambat dalam merespon usulan Komisi XI DPR RI untuk adanya penguatan dari sisi siber dalam rangka mendeteksi pinjol apakah legal atau tidak. Sampai akhirnya, aktivitas pinjol tersebut telah menjamur dan cenderung menimbulkan budaya konsumtif masyarakat untuk berhutang atau gali lubang tutup lubang.

Di sisi lain dalam sisi hukum, persoalan pinjol ini dinilai masih penuh ketidakjelasan karena tidak cukup diselesaikan hanya melalui Peraturan OJK saja. Namun harus melalui aturan yang lebih tinggi, yaitu Rancangan Undang-Undang Finansial Teknologi (RUU Fintek) atau melalui revisi UU OJK bersamaan dengan pergantian komposisi Komisioner OJK

pada tahun 2022 mendatang.

UU Fintek ini sudah menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI sejak tahun 2019. Sejalan dengan proses pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komaruddin menilai rancangan beleid itu perlu segera dipercepat penyusunannya.

“Adanya RUU tersebut untuk menjamin kepastian hukum akan aktivitas fintek di Indonesia. RUU ini nantinya juga akan mengatur fintek yang bisa beroperasi, produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk menjamin perlindungan bagi pengguna layanan, seperti data pribadi maupun bunga,” ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

RUU tersebut juga diperlukan untuk mendukung adanya aturan mengenai sistem *early warning*. Supaya dapat meningkatkan pengawasan atas kinerja pinjol dalam memberikan pinjaman maupun mengukur kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman itu. ● rdn/ah/es

Perlu Penguatan Literasi Keuangan

Pinjol ilegal yang mudah diakses tanpa banyak syarat menjadikan masyarakat gampang tergiur. Beberapa pandangan menduga, literasi soal kredit di tengah masyarakat luas yang kurang memadai membuat banyak peminjam yang memilih mengakses layanan pinjaman tak berizin tersebut.



ANGGOTA

Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati menegaskan, sudah menjadi tugas DPR RI bersama OJK dan Bank Indonesia (BI)

untuk mencerdaskan masyarakat. Terutama secara masif mengedukasi pinjaman atau investasi yang aman. Sehingga, masyarakat mampu mengelola keuangan dengan baik.

“Ini menjadi tugas DPR bersama OJK dan BI untuk mencerdaskan masyarakat kita agar benar-benar mampu mengelola keuangannya dengan baik dan secara masif melakukan edukasi bahwa seluruh tawaran investasi maupun pinjaman yang menjanjikan bunga yang tidak wajar, kemudahan yang berdampak kesusahan itu benar-benar harus dilawan,” papar Indah.

Oleh karena itu, Indah mengajak masyarakat untuk melawan perusahaan pinjol ilegal yang mengeruk keuntungan dari masyarakat. “Kami mengajak masyarakat

bersama-sama untuk melawan institusi, lembaga atau perusahaan yang tidak bertanggungjawab mengeruk keuntungan dari masyarakat dengan seolah-olah memberikan pertolongan dan kemudahan, namun akhirnya mendatangkan kesusahan,” seru Indah.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut berharap masyarakat pun dicerdaskan melalui sosialisasi, literasi dan edukasi secara masif. Supaya masyarakat sadar bahwa hal-hal yang ditawarkan oleh pinjol dengan tidak mengindahkan atau memperhatikan legalitas dan

kemudahan tentang bunga dan prosedur yang tidak logis itu akan berdampak pada sesuatu yang kurang baik.

PEMERINTAH PERLU JANGKAU MASYARAKAT VIA AKSES KEUANGAN

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno meminta pemerintah untuk membuka dan memperbanyak akses keuangan, khususnya bagi masyarakat kecil. Hal ini diperlukan, tambah Hendrawan, dalam rangka mempersempit ruang gerak bagi pinjol, terlebih yang ilegal, dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Mengingat, maraknya kehadiran pinjol ini karena adanya kebutuhan masyarakat.

“Kalau masyarakat tidak membutuhkan pinjol, maka pinjol

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati. Foto: Andri/vnl



tidak mempunyai ruang kehidupan. Sama juga rentenir, solusinya bukan melarang rentenir atau pinjol, tapi memperbanyak pinjol dan di saat yang bersamaan akses keuangan terhadap masyarakat kecil harus diperbanyak dan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat,” jelas Hendrawan.

Lanjut Hendrawan, akses keuangan dari pemerintah yang dapat diberikan kepada masyarakat dapat melalui koperasi, pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat, dan sebagainya. Selain itu, perbankan juga diharapkan dapat mendukung akses keuangan tersebut kepada masyarakat kecil.

Sehingga, terjadi persaingan antara perbankan dan pinjol dalam memberikan layanan keuangan. “Itu sebabnya nanti bunga dari pinjol legal yang per hari 0,8 per hari itu dengan sendirinya akan turun,” ujar Legislator dapil Jawa Tengah X itu.

Pendapat yang disampaikan Indah dan Hendrawan berbanding lurus dengan pandangan Anggota Komisi XI Heri Gunawan. Dia menilai, strategi pemberantasan pinjol ilegal bisa melalui dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan bisa dengan mengintensifkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Pinjol ilegal.

“Selain itu, perlu ada moratorium izin Pinjol untuk menyelamatkan masyarakat dari jebakan Pinjol ilegal. Sementara dari sisi penindakan, penegak hukum bisa menerapkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau KUHP,” tegas Hergun.

ALASAN PINJOL MASIH DILIRIK

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK Tongam L Tobing mengakui kemudahan akses pinjol dalam mencairkan pinjaman. Menurutnya, pinjol cukup mudah memberikan layanan pinjaman uang, dibandingkan sektor keuangan formal lainnya seperti bank. Dimana pihak bank biasanya

memiliki banyak persyaratan serta harus melakukan berbagai verifikasi dokumen.

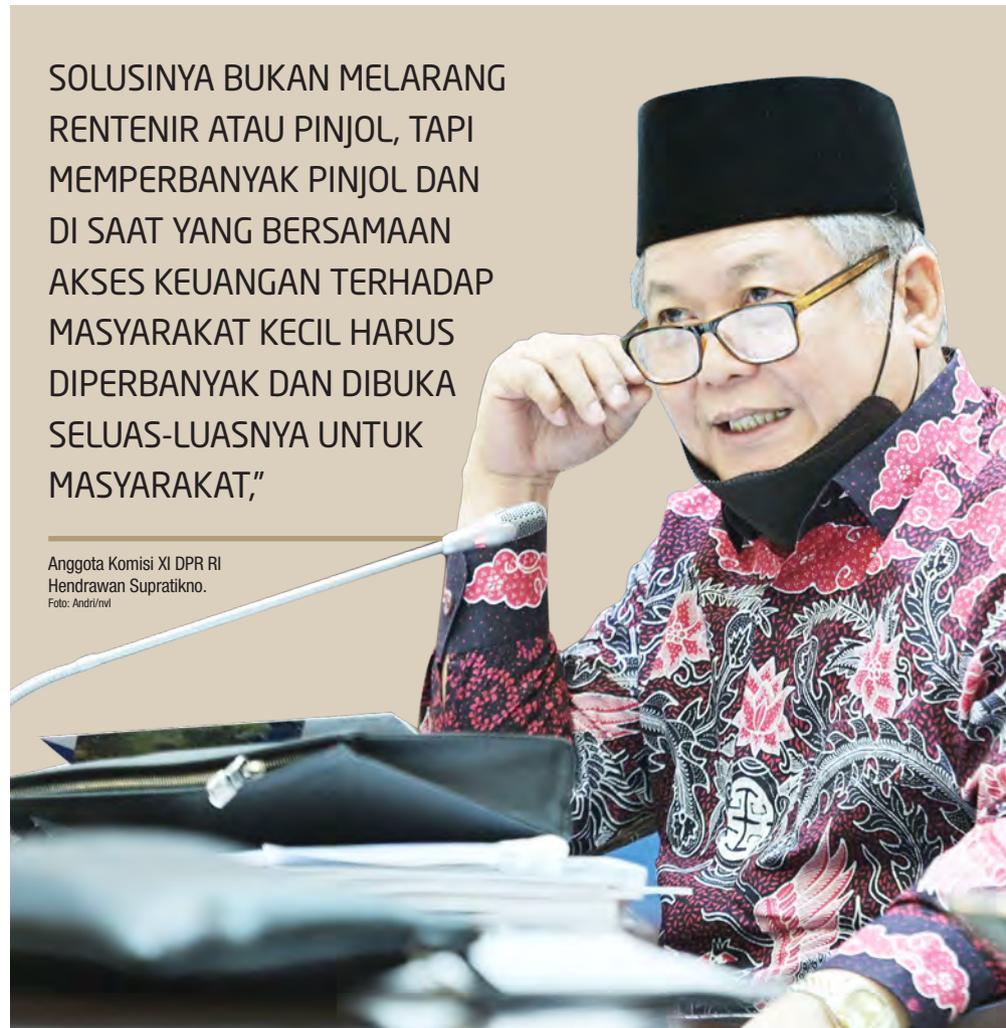
Dia pun menilai, kemudahan yang ada pada pinjol menjadi hal yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tongam menyebutkan, untuk kasus pinjol legal saja hingga saat ini ada sebanyak 64,8 juta nasabah yang sudah melakukan peminjaman. Sementara, jumlah dana

dengan era disrupsi 4.0. Kedua, krisis ekonomi merupakan alasan lain di balik maraknya akses pinjaman *online*. Dan terakhir, kurangnya proteksi dari pemerintah atau OJK terhadap warga yang mengakses pinjol.

Literasi diduga menjadi penyebab *gap* pengetahuan di era 4.0 yang muncul di masyarakat. Para ahli mengungkapkan masih

SOLUSINYA BUKAN MELARANG RENTENIR ATAU PINJOL, TAPI MEMPERBANYAK PINJOL DAN DI SAAT YANG BERSAMAAN AKSES KEUANGAN TERHADAP MASYARAKAT KECIL HARUS DIPERBANYAK DAN DIBUKA SELUAS-LUASNYA UNTUK MASYARAKAT,”

Anggota Komisi XI DPR RI
Hendrawan Supratikno.
Foto: Andri/mvl



yang sudah disalurkan mencapai Rp 221,56 triliun.

Sosiolog Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono sempat menjabarkan setidaknya terdapat tiga alasan mengapa pinjol masih banyak dilirik. Pertama, adanya gap antara pengetahuan masyarakat

banyak masyarakat yang tergiur dengan rayuan pinjol. Terlebih, pinjol dapat dengan mudah diakses, tanpa pertemuan, dan syarat yang mudah. Sehingga, *gap* pengetahuan tersebut membuat para peminjam tidak mengetahui risiko yang diakibatkan oleh pinjol tersebut. ● hal/ah/es



Oleh : Nurul Huda

Kepala Center Inovasi dan Ekonomi Digital INDEF

Kalimat tersebut ditulis oleh salah satu korban pinjol yang tidak dapat bertahan lagi dengan jeratan teror pinjaman *online*. Masih banyak lagi tulisan korban pinjaman online yang merasa dirinya terancam oleh praktik penagihan pinjol hingga meneror keluarga, kerabat, sampai teman kerja.

Kondisi jerat pinjol yang sedemikian kuat kepada korbannya tentu perlu perhatian lebih dari pemerintah. Tidak hanya membongkar kasus pinjol ini dalam tataran sisi hilir, namun perlu dipertanyakan juga dari sisi hulu atau sisi paling dekat dengan masyarakat kita. Maka timbul pertanyaan apakah pinjol menjadi tumpuan utama dalam hal pembiayaan saat ini? Apakah masyarakat tidak mempunyai alternatif pembiayaan lainnya? Mari kita bahas satu per satu pertanyaan tersebut.

SUSAH AKSES PERBANKAN

Pada saat pandemi, penyaluran kredit perbankan secara umum dan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan

Jerat Kasus Pinjaman Online

“Maaf aku yang terjerumus di dunia *online*, sudah kecanduan dan udah nggak sanggup lagi. Istriku nggak salah apa-apa, semua murni kesalahanku. Tolong sampaikan pesan ini ke rumah Si Walan, jika aku masih dianggap keluarga, karena aku sudah terlalu berat menyusahkan orang tuaku.”

pertumbuhan penyaluran kredit secara *year-on-year* (yoy) beberapa kali mengalami kondisi negatif atau ada penurunan penyaluran kredit. Di sisi lain, permintaan untuk layanan pinjol

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Penyaluran pinjaman melalui pinjol pada bulan Agustus 2021 memiliki nominal mencapai Rp15,67 triliun.

Meningkat hampir 4 kali lipat dibandingkan penyaluran Agustus 2020. Pertumbuhan rekening peminjam masih berada di angka 180 persen (yoy). Dari data kredit perbankan dan pinjol menunjukkan adanya pergeseran alternatif pinjaman di tengah pandemi.

Perbankan di tengah pandemi pun mempunyai



keterbatasan ruang gerak penyaluran dimana perbankan harus benar-benar selektif dalam penyaluran pinjaman. Perbankan harus menjaga kredit tidak lancarnya berada di bawah angka 5 persen. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor yang menjadikan masyarakat *unbanked* dan *underbanked* enggan dan tidak dapat mengakses produk jasa keuangan perbankan. Faktor administrasi, hingga kultur masyarakat kelas menengah ke bawah yang menyebabkan mereka sulit masuk ke ekosistem perbankan.

Masalahnya adalah sebagian besar masyarakat kita merupakan masyarakat *unbanked* dan *underbanked*. Data Google, Temasek, dan Bain menyebutkan masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan jasa keuangan di Indonesia mencapai 50 persen lebih. Bandingkan dengan masyarakat Malaysia yang hanya 13 persen dari penduduknya yang belum memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan, Thailand (18 persen), dan Singapura (0 persen). Masih dalam laporan Google, Temasek, dan Bain Company, secara lebih rinci tercatat sebesar 42 juta orang tergolong *banked* dan masih ada 47 juta orang yang tergolong *underbanked*. Namun ada pula selain golongan masyarakat di atas, masih ada masyarakat yang tergolong *unbanked* yaitu sebesar 92 juta orang.

Salah satu sektor yang termasuk dalam golongan *unbanked* dan *underbanked* adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data Bank Indonesia menyebutkan penyaluran kredit ke usaha mikro dan kecil hanya 12 persen (mikro 6% dan kecil 6%). Sedangkan penyaluran kredit untuk industri sedang 8 persen dan industri besar 80 persen. Maka dapat dilihat bahwa pelaku usaha UMKM mempunyai kendala dalam penyerapan kredit. Padahal jika dilihat dari jumlah, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mencapai 99 persen

dari jumlah usaha di Indonesia, namun penyerapan kreditnya tidak lebih dari 20 persen.

LITERASI KEUANGAN DAN DIGITAL

Kondisi masyarakat yang sulit mengakses jasa layanan keuangan perbankan dan akhirnya terjerumus dalam jeratan pinjol disebabkan juga oleh rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat. Data survei dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan literasi keuangan kita masih berada di angka 40 persen. Artinya sebagaimana masyarakat Indonesia masih belum mengetahui secara signifikan produk jasa keuangan, manfaat, risiko, hak, dan kewajiban jika menjadi nasabah jasa keuangan.

Data lainnya dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga menunjukkan skor pengetahuan finansial masyarakat Indonesia di bawah rata-rata negara OECD. Tingkat pengetahuan finansial masyarakat Indonesia masih dibawah China, Korea Selatan, dan Thailand. Dengan kondisi literasi keuangan yang masih rendah, masyarakat Indonesia rentan tertipu oleh berbagai modus keuangan seperti investasi, kredit, asuransi, hingga pengelolaan keuangan.

Rendahnya tingkat literasi keuangan dan pengetahuan finansial masyarakat Indonesia menyebabkan mudah masuknya pinjol ilegal ke dalam negeri. Sepanjang masuknya pinjol ke Indonesia, sebanyak 95 persen dari total pinjol yang pernah dan masih beroperasi di Indonesia, merupakan pinjol ilegal. Pinjol yang legal (terdaftar atau berizin OJK) hanya 5 persen. Bahkan jumlah pinjol legal terus mengalami penurunan hingga tahun 2021 ini. Kini hanya terdapat 116 pinjol legal, sedangkan ada 3.193 pinjol ilegal yang pernah dan masih beroperasi di Indonesia.

Selain dari sisi literasi keuangan yang masih rendah, literasi digital masyarakat Indonesia pun masih

belum bisa dikatakan baik. Masyarakat masih sangat mudah memberikan data pribadi kepada pihak ketiga seperti pihak platform pinjol. Akibatnya data pribadi kita tersebar termasuk data yang terdapat dalam kartu tanda penduduk (KTP) bahkan data pribadi di ponsel pintar kita. Maka tak ayal, banyak sekali kasus pinjol yang di luar kehendak peminjam.

TINDAKAN PREVENTIF

Selain tindakan hukum yang tengah dilakukan oleh pemerintah dengan menangkap dan menutup kegiatan pinjol ilegal, perlu sebuah upaya pencegahan untuk membendung tindakan negatif pinjol ilegal. Tindakan preventif pertama dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi keuangan dan digital dari masyarakat. Pemerintah harus proaktif dalam upaya pemberian informasi dan pengetahuan mengenai finansial kepada masyarakat. Dengan peningkatan literasi keuangan, masyarakat bisa memilih dan memilah informasi mengenai keuangan dan digital yang baik dan benar.

Tindakan preventif kedua adalah menjaga dunia web dan aplikasi kita dari portal pinjol ilegal. Tindakan preventif kedua ini hampir sama dengan tindakan preventif situs porno dimana pemerintah bisa kampanye internet sehat. Aplikasi yang terjaring di *Google Playstore* dan *App Store* harus bisa di-filter mana yang berupa pinjol ilegal.

Terakhir, pengaturan bunga pinjol yang legal juga bisa jadi alat intervensi untuk menarik peminjam di pinjol ilegal ke pinjol legal. Selama ini, bunga pinjaman di pinjol sangat tinggi sekali. Bahkan ada bunga pinjol ilegal yang mencapai ratusan persen per tahun. Guna mengurangi minat masyarakat ke pinjol ilegal, pinjol ilegal harus memberikan bunga lebih rendah. Saat ini bunga maksimal per hari adalah 0,4 persen atau sekitar 12 persen per bulan. Jika dapat diturunkan lagi menjadi 0,2 persen per hari, saya rasa jeratan pinjol ilegal akan terlepas. ●

DPR Ajak Pemangku Kepentingan Selamatkan Garuda Indonesia

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tengah menghadapi ancaman gagal restrukturisasi setelah menanggung beban utang yang sangat besar. Ancaman kebangkrutan maskapai pelat merah ini sudah sangat nyata, bahkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham mayoritas mulai kewalahan mencari jalan keluar untuk menyelamatkan maskapai yang berdiri sejak 1949 itu.



su penyelamatan lain yang juga muncul ke publik yaitu pemerintah dikabarkan sedang menyiapkan maskapai Pelita Air untuk menggantikan perusahaan penerbangan pelat merah itu bila proses negosiasi yang dilakukan tidak berjalan sesuai harapan. Pemerintah

melalui Kementerian BUMN menilai, bila restrukturisasi dan negosiasi yang dijalani menemui jalan buntu, maka tidak mungkin memberikan penyertaan modal negara kepada Garuda Indonesia, karena nilai utangnya terlalu besar.

Opsi penutupan Garuda Indonesia tetap terbuka meski berstatus sebagai

maskapai *flag carrier*. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Manajemen PT Garuda Indonesia beberapa waktu lalu, Komisi VI DPR RI menyarankan agar Garuda Indonesia menempuh opsi satu, yakni manajemen Garuda Indonesia harus melakukan proses restrukturisasi utang dengan cara melakukan negosiasi langsung secara maksimal dengan pihak lessor, kreditur, dan vendor.

Komisi VI DPR RI juga telah memberikan sejumlah rekomendasi atas persoalan Garuda Indonesia dan menyatakan akan mendukung penuh pemerintah untuk membantu memberikan pinjaman modal kerja untuk kelangsungan operasional Garuda Indonesia. Namun Dirut Garuda Indonesia tidak setuju dengan saran opsi satu tersebut dan memilih opsi dua, yakni proses restrukturisasi utang dilakukan dengan mengajukan permohonan penyelesaian ke Pengadilan Niaga melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), meski berisiko dipailitkan.

Menanggapi persoalan yang dialami Garuda Indonesia, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendesak pemerintah mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan Garuda Indonesia dari ancaman kebangkrutan. Herman beranggapan masih ada secercah harapan untuk menyelamatkan maskapai penerbangan berkode saham GIAA itu. Menurutnya, Garuda Indonesia masih bisa diselamatkan, jika saja pandemi covid 19 tidak melanda dunia termasuk Indonesia. "Kalau situasi normal dan tidak ada pandemi, masih bisa untuk mengangkat performa Garuda dan memenuhi kewajiban utang," tutur Hero, sapaan akrabnya.

Politisi Partai Demokrat itu memahami

“KALAU SAYA DITANYA, SAYA TENTU SUKA JIKA GARUDA INDONESIA TETAP ADA. TETAPI KALAU KONDISINYA MEMANG SUDAH TIDAK ADA JALAN KELUAR LAIN, DIMANA PARA LESSOR DAN LENDER ITU TETAP TIDAK MAU NEGOSIASI, YA SUDAH DITUTUP SAJA,”

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty. Foto: Azka/mv



masalah berat yang sedang dialami Garuda Indonesia. Dimana perusahaan tersebut kini tengah terlilit utang yang sangat besar dari banyak pihak. Pandemi Covid-19 yang melanda juga ikut memperparah kondisi yang ada, dimana kegiatan penerbangan ikut dibatasi sebagai imbasnya. “Masalahnya pandemi ini berkepanjangan, utang bertambah, negosiasi dengan *lessor* buntu,” ujarnya.

Hero pun mengajak para pemangku kepentingan untuk bergotong royong bahu-membahu guna menyelamatkan Garuda Indonesia. “Kita harus tetap berupaya untuk menghasilkan kesepakatan yang terbaik. Jadi ada celah Garuda bisa melangsungkan usahanya dan mencari jalan yang tepat untuk memenuhi kewajibannya membayar utang. Kami bertekad mendorong Garuda tetap jadi *flag carrier* negara dan dipertahankan sebagai kebanggaan bangsa Indonesia,” tegas Hero.

NEGOSIASI ALOT, HARUS ADA MASKAPAI PENGGANTI

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mendukung langkah yang diambil Kementerian BUMN dengan opsi penutupan maskapai Garuda Indonesia apabila negosiasi dengan para *lender*, *lessor* pesawat, hingga pemegang sukuk global gagal dilakukan. Dikatakannya, jika negosiasi berjalan alot dan kemungkinan berakhir gagal, maka tidak ada pilihan lain kecuali Kementerian BUMN harus menyiapkan maskapai penerbangan lain sebagai pengganti.

“Saya menilai penyiapan maskapai penerbangan lain untuk menggantikan Garuda Indonesia sebagai antisipasi dari sangat seriusnya situasi saat ini. Kalau memang tidak bisa lagi di negosiasikan dengan para *lessor*, *lender* maupun pemegang sukuk global, seperti dikatakan Kementerian BUMN opsinya tidak ada lagi kecuali ditutup,” kata Evita, baru-baru ini.

Politisi PDI-Perjuangan itu menyampaikan, DPR sudah menegaskan bahwa opsi lain dengan penyertaan modal negara tidak mungkin dilakukan. Evita berharap situasi ini bisa ditangkap para *lessor* untuk bisa memberikan kesempatan kepada Garuda Indonesia di tengah kondisi tidak adanya opsi lain lagi. “Apalagi terakhir ini terbuka sinyal positif bagi dunia penerbangan, setelah dibukanya pariwisata internasional ke Bali, pembukaan Umroh, dan lainnya, setelah menurunnya kasus covid 19 secara signifikan di Indonesia,” imbuhnya.

Menurut Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu, penutupan Garuda Indonesia itu tidak akan membuat Indonesia kehilangan *flag carrier*. Sebuah negara bisa mengganti maskapai nasional karirnya, bahkan meniadakannya. Negara bisa melakukan kerja sama dengan maskapai penerbangan internasional untuk jadwal penerbangan internasionalnya.

Meski demikian Evita berharap Garuda Indonesia dapat tetap ada dan menjadi maskapai penerbangan

nasional kebanggaan bangsa Indonesia. “Kalau saya ditanya, saya tentu suka jika Garuda Indonesia tetap ada. Tetapi kalau kondisinya memang sudah tidak ada jalan keluar lain, dimana para *lessor* dan *lender* itu tetap tidak mau negosiasi, ya sudah ditutup saja,” ujarnya.

Seperti dikabarkan, Kementerian BUMN menyatakan membenarkan rencana untuk menyiapkan Pelita Air sebagai maskapai berjadwal untuk mengantisipasi apabila restrukturisasi dan negosiasi yang sedang dijalani Garuda Indonesia tidak berjalan mulus. Kementerian BUMN menilai, opsi penutupan Garuda Indonesia tetap terbuka, meski berstatus sebagai maskapai *flag carrier*. Alasannya, saat ini sudah lazim sebuah negara tidak memiliki maskapai yang melayani penerbangan internasional.

PT Garuda Indonesia sendiri mengaku optimis pemulihan kinerja bisa berjalan sesuai rencana. Garuda Indonesia menyatakan akan terus mengakselerasikan langkah pemulihan kinerja, salah satu strateginya melalui restrukturisasi kewajiban usaha bersama seluruh krediturnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar perseroan tetap bisa memberikan layanan pada masyarakat.

Direktur utama Garuda Indonesia Irfan setiaputra menjelaskan, langkah restrukturisasi menjadi sebuah opsi yang paling tepat dan relevan dalam menunjang upaya pemulihan kinerja Garuda Indonesia di tengah tekanan kinerja usaha yang dihadapi seluruh pelaku industri penerbangan.

Di tengah percepatan langkah restrukturisasi bersama mitra usaha, Garuda Indonesia juga memastikan bahwa seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal. Garuda Indonesia berkomitmen untuk senantiasa mengoptimalkan standar layanan penerbangan yang aman dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat maupun pengangkutan kargo bagi sektor perekonomian nasional. ● dep/sf

PMN Kereta Cepat Diajukan, Perlu Audit Anggaran

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus dikejar pengerjaannya di tengah pandemi Covid-19. Cepat melaju, cepat pula membengkak biaya proyeknya. Audit pun jadi senjata untuk menelisik mega proyek yang dicanangkan Presiden Joko Widodo ini. Pemerintah telah mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp7 triliun untuk menuntaskan proyek yang sempat kedodoran. DPR RI pun merespon negatif rencana usulan PMN itu.

Audit atas proyek ini belum dilakukan, sementara PMN sudah diajukan. Catatan kritis pun dilayangkan. Adalah Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron yang mengeritik usulan PMN untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) pemegang mandat proyek. Ada laporan pembengkakan biaya konstruksi hingga Rp4,1 triliun yang belum jelas peruntukannya. Audit investigatif jadi keniscayaan sebelum menyetujui PMN.

Anggota Komisi VI DPR RI
Herman Khaeron. Foto: Oj/riwi



“Kami belum memutuskan untuk memberikan PMN melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP. Kenapa? Supaya *clear and clean* memenuhi unsur *Good Corporate Governance*,” kata Hero, sapaan akrab Herman dalam keterangan persnya kepada **Parlementaria**, beberapa waktu lalu.

Komisi VI DPR RI, tutur Hero, belum mendalami isu mutakhir ini. Bila kelak sudah muncul hasil audit dari BPK dan BPKP, usulan PMN untuk PT. KAI bisa dipertimbangkan kembali oleh Komisi VI secara kritis, agar daya manfaatnya bagi rakyat bisa optimal. “Sebelum menyetujui, hitung-hitungan bagi kami adalah sebesar apa manfaat bagi rakyat,” tutup politisi Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina juga mempersoalkan munculnya usulan PMN di tahun 2021 ini. Pasalnya, sesuai UU APBN 2021, tidak ada alokasi PMN untuk PT. KAI. Usulan PMN muncul dalam Nota Keuangan RAPBN 2022. Pihaknya mempertanyakan pembengkakan proyek kereta cepat pertama di Indonesia tersebut.

Nevi menyampaikan hal ini dalam siaran persnya Oktober lalu. Senada dengan Herman, ia

PEMERINTAH SEHARUSNYA BERANI MENUNDA PROYEK-PROYEK YANG BELUM PRIORITAS, UNTUK LEBIH FOKUS PADA PROGRAM KERAKYATAN, MENYELESAIKAN PANDEMI SAMPAI TUNTAS DAN MENGEMBALIKAN PEREKONOMIAN RAKYAT YANG SEMAKIN HARI SEMAKIN TERPURUK,”

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto: Oji/mf



juga tak sepakat bila PMN untuk PT KAI diambil sepenuhnya dari APBN, karena alokasinya sangat besar. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp7 triliun itu, lebih baik untuk menangani pandemi Covid-19 dan membenahi perekonomian nasional serta kesejahteraan rakyat yang sempat terpuruk dihajar pandemi.

“Yang menjadi persoalan adalah, negara mestinya menunaikan janjinya untuk tidak melibatkan sepeserpun APBN dan coba cari solusi lain. Ini dana negara sangat besar yang mestinya dapat digunakan untuk mempercepat mengatasi pandemi dan mengembalikan perekonomian rakyat

yang mayoritas terpuruk terdampak pandemi,” urai Nevi.

Diungkap politisi PKS itu, jatah PMN untuk PT KAI sebagai leader BUMN untuk proyek kereta cepat ini muncul pertama kali dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2022. Pada bagian outlook PM 2021 ada usulan PMN tersebut. Padahal, sebelumnya tidak ada pembahasan soal ini di Komisi VI DPR. Akhirnya, Komisi VI pun harus mendalami lagi soal pembiayaan proyek kereta cepat.

Nevi mengkritik kebijakan pemerintah soal PMN untuk PT. KAI tersebut. Ditegaskannya, pemerintah harus mampu menganalisa proyek

ini dengan penuh perhitungan. Ia mengingatkan, ini proyek besar dengan kebutuhan anggaran yang juga jumbo. Mestinya, pemerintah tidak perlu turun tangan lebih jauh menyangkut anggaran proyek ini. Penggelontoran PMN ini tak sesuai komitmen awal pemerintah. Sempat ada nada miring, memang, ketika proyek ini dicanangkan. Dari perencanaan yang kurang matang hingga pembiayaan yang kurang perhitungan, jadi bahan kritik.

Kini, proyek kereta cepat betul-betul kekurangan anggaran. Komisi V dan VI, sambung Nevi, mendesak dilakukan audit investigatif atas proyek ini. Ini penting untuk mengungkap ketidakcermatan dalam menghitung kebutuhannya hingga harus “menghisap” APBN. “Saya mengusulkan, perlu ada audit investigasi proyek kereta cepat, sehingga persoalan yang terjadi cepat diselesaikan. Transparansi sangat penting dimunculkan agar rakyat dapat membantu mengawasi dengan rigid proyek yang melibatkan negara luar masuk dalam investasi ini,” serunya.

Nevi menyesalkan, hampir setiap tahun dana PMN diberikan ke BUMN, tapi anggarannya kerap menguap begitu saja. BUMN harusnya memberikan keuntungan lebih bagi negara melalui deviden untuk serapan PNBPN. Namun, apa yang terjadi selama ini, PMN malah berbalik jadi beban keuangan negara. Keuntungan yang didapat dari sejumlah BUMN tidak optimal.

“Pembangunan proyek baik jalan tol, kereta cepat, dan lain-lain belum prioritas di masa pandemi dan rakyat sedang menderita. Pemerintah seharusnya berani menunda proyek-proyek yang belum prioritas, untuk lebih fokus pada program kerakyatan, menyelesaikan pandemi sampai tuntas dan mengembalikan perekonomian rakyat yang semakin hari semakin terpuruk,” tandas legislator dapil Sumatera Barat II tersebut. ● mh/sf

1

TAK ADA KATA TERLAMBAT

Proyek kereta cepat merupakan pionir di Indonesia. Transportasi darat ini ingin memangkas waktu tempuh yang selama ini jadi problem masyarakat penumpang. Dengan kereta cepat, waktu tempuh dipangkas. Tak ada kata terlambat lagi bagi penumpang kereta.

2

TIGA KELAS PENUMPANG

Penumpang kereta cepat akan dimanjakan dengan pilihan kelas penumpang. Ruang penumpang didesain lebih luas dan modern untuk kenyamanan para penumpang. Ada ruang khusus pula untuk kaum difabel.

Total j
Den
m
d

3

SENTUHAN TEKNOLOGI MODERN

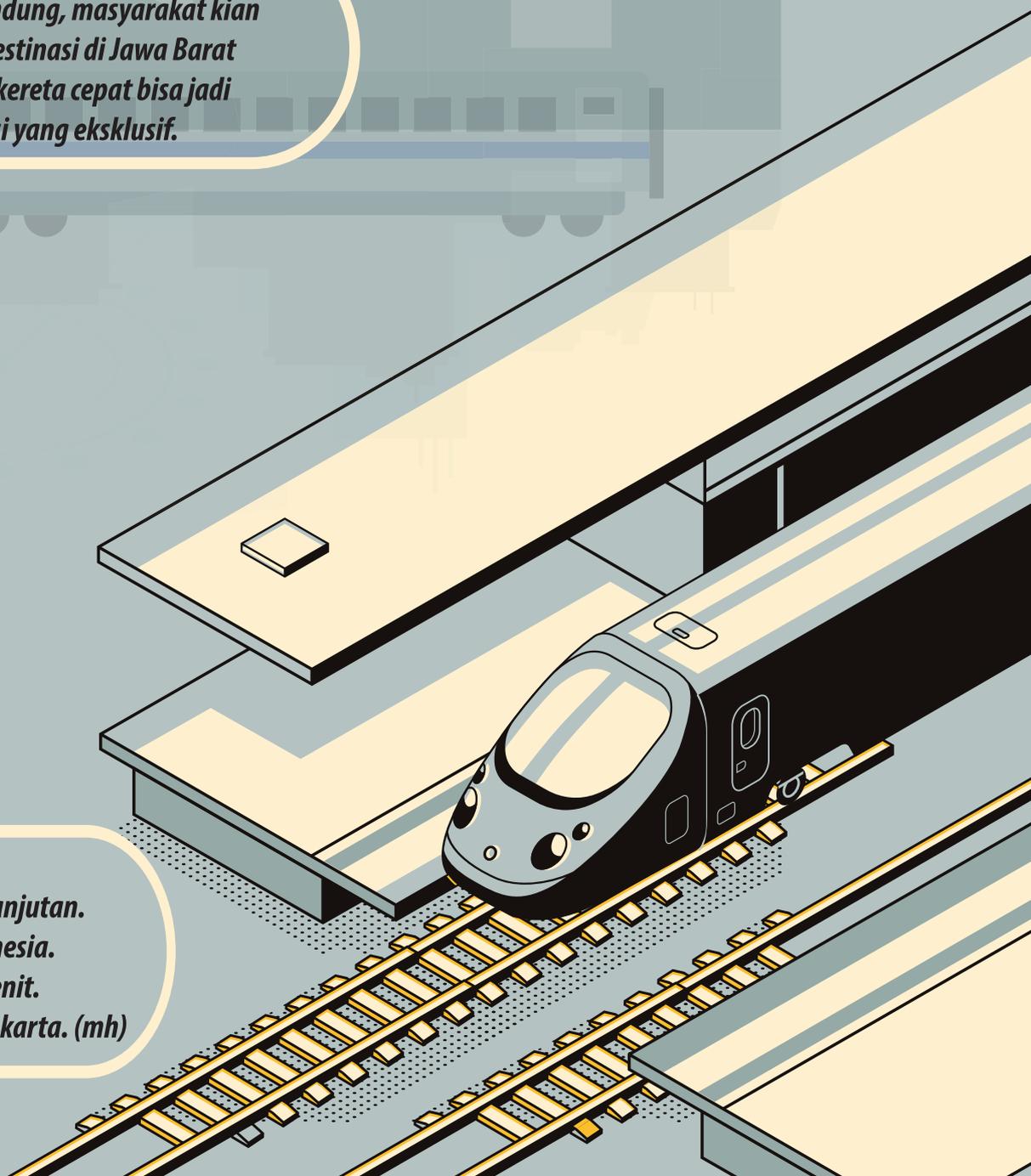
Kereta cepat Jakarta-Bandung hadir dengan tipe CR400AF yang dilengkapi teknologi modern. Ada pramugari yang senantiasa siap melayani selama perjalanan. Fitur kabin noise yang lebih rendah akan meredam getaran dengan lebih optimal. Perjalanan berkualitas untuk pengalaman lebih bernilai.

Mendukung
Transpo
Bertra
Kelak terkoneksi

Dengan headway 20-30 menit, kereta cepat hadir dengan banyak pilihan waktu perjalanan, sehingga jarak Jakarta-Bandung akan ditempuh hanya dalam waktu 36 hingga 44 menit. Perjalanan jadi lebih singkat dan fleksibel untuk aktivitas yang lebih maksimal.

Jumlah penumpang "jet darat" ini mencapai 601 orang. Dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, masyarakat kian mudah dan cepat singgah ke destinasi di Jawa Barat dan Jakarta. Ingin berwisata, kereta cepat bisa jadi pilihan moda transportasi yang eksklusif.

Mendekatkan jarak. Menghadirkan pertumbuhan kota berkelanjutan. Transportasi paling canggih di Indonesia. Perjalanan dalam hitungan menit. Integrasi dengan LRT dan MRT di Jakarta. (mh)



Revisi UU Penanggulangan Bencana, Upaya DPR Perkuat BNPB

DPR memiliki cita-cita agar penanggulangan bencana Indonesia ke depannya terintegrasi, baik dalam manajemen mitigasi bencana, penanganan keadaan darurat bencana maupun rehabilitasi atau pemulihan pasca bencana termasuk penanganan bencana non alam berupa wabah atau pandemi.

KETUA Panitia Kerja Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Ace Hasan

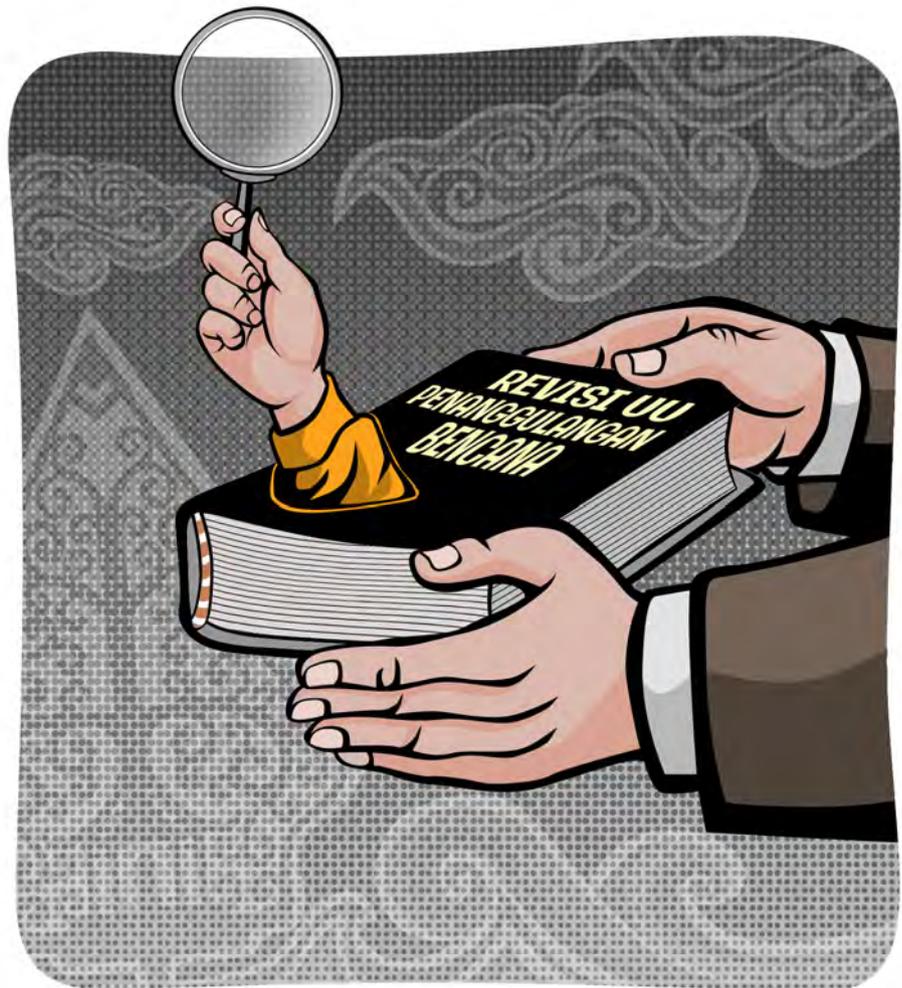
Syadzily mengatakan, RUU ini menjadi sebuah perwujudan komitmen dan kesungguhan DPR dalam melakukan penataan serta perbaikan manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.

Menurut Ace, implementasi UU Penanggulangan Bencana sebenarnya telah menunjukkan banyak kemajuan. Antara lain, terbitnya berbagai kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana serta meningkatkan pemahaman risiko dan sistem peringatan dini. Kesiapsiagaan terhadap bencana pun dipandang telah terbangun.

“Akan tetapi, seiring berkembangnya waktu dan kompleksitas penanganan bencana, setelah dievaluasi memang diperlukan adanya kebijakan baru sehingga dapat melaksanakan manajemen kelembagaan yang lebih terarah dan terpadu,” ujar Ace.

Diakui Ace, sampai saat ini DPR dan pemerintah masih berbeda pendapat terkait beberapa materi yang tertuang dalam daftar inventarisasi masalah (DIM), khususnya pada aspek kelembagaan. DPR secara tegas ingin mengatur keberadaan kelembagaan BNPB dan BPBD.

Sebaliknya, kata Ace, pemerintah tidak mau menyebutkan secara eksplisit tentang BNPB dan hanya menyebutkan bahwa penanggulangan bencana



ditangani oleh satu badan. Dalam DIM, pemerintah beralasan untuk memberikan fleksibilitas pengaturan sehingga memudahkan dalam melakukan perubahan sesuai kondisi dan perkembangan.

Tentu inikan berbeda dengan pandangan Komisi VIII DPR RI yang

justru ingin memperkuat keberadaan BNPB dan BPBD yang selama ini telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai *leading* sektor dalam proses penanggulangan bencana

“RUU Penanggulangan Bencana sudah selesai jika DPR dan pemerintah menemukan kesepakatan

soal kelembagaan ini. DPR tegas menginginkan menyebutkan ini karena BNPB berfungsi tidak hanya sekedar saat darurat bencana, tetapi juga diarahkan pada mitigasi,” tuturnya.

PENGALOKASIAN ANGGARAN BERSUMBER DARI APBN/APBD.

Isu lainnya yang berkembang dalam pembahasan RUU ini adalah terkait anggaran atau pengalokasian dana untuk penanggulangan bencana. RUU ini mengamanatkan alokasi anggaran penanggulangan bencana sebesar 2 persen dari APBN serta APBD. Sementara dalam aturan sebelumnya hanya dinyatakan, pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai.

Aturan ini dirumuskan karena kerawanan bencana di Indonesia

alokasi yang spesifik karena di dalam prakteknya terutama APBD di daerah, banyak daerah-daerah yang memang tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk penanggulangan bencana, maka oleh karena itu banyak peristiwa bencana yang tidak dengan cepat diantisipasi oleh pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran tersebut,” sebutnya.

Sementara pemerintah menyebutkan bahwa perihal anggaran tidak perlu disebutkan secara eksplisit karena selama ini penanggulangan bencana di Indonesia sudah menggunakan mekanisme dana siap pakai. “Soal anggaran ini tentu kami setuju. Bisa dipertimbangkan untuk mengikuti pandangan pemerintah, tetapi terkait dengan yang kelembagaan, tentu kami tetap

Bencana dihentikan. Sebab, Komisi VIII juga masih memiliki berbagai rancangan undang-undang yang belum sempat dibahas.

“Kita berikan waktu hanya dalam satu masa sidang lagi, jika di dalam satu masa sidang ini artinya nanti bulan desember kita masih belum menyelesaikan undang-undang ini maka undang-undang ini akan di drop,” ucapnya.

Senada dengan Ace, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengusulkan agar RUU tentang Penanggulangan Bencana dicabut dari pembahasan tingkat satu dan diajukan kembali pada Program Legislasi Nasional prioritas tahun 2023. Usulan ini disampaikan Bukhori lantaran belum diperolehnya kesepakatan antara Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait postur lembaga penyelenggara penanggulangan bencana yang akan diatur dalam revisi UU Penanggulangan Bencana.

Menurutnya, dibutuhkan waktu yang memadai bagi pemerintah dan DPR untuk menemukan titik temu atas kebuntuan yang terjadi. Salah satu isu yang mengundang perdebatan tajam antara pemerintah dan DPR adalah tidak disebutkannya nomenklatur BNPB dan BPBD di dalam DIM yang diajukan oleh pemerintah.

Dalam Bab IV tentang Kelembagaan Pasal 11 RUU Perubahan atas UU Penanggulangan Bencana sesuai DIM yang diajukan pemerintah hanya dijelaskan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh ‘Badan’ yang diatur oleh landasan hukum setingkat Peraturan Presiden (Perpres).

“Pemerintah sama sekali tidak menjelaskan seperti apa ‘Badan’ penanggulangan bencana yang dimaksud. Ini artinya, bencana yang sedemikian banyak di negeri ini justru hanya akan dikelola secara ad hoc,” pungkas Bukhori. ● rnm/es

“RUU PENANGGULANGAN BENCANA SUDAH SELESAI JIKA DPR DAN PEMERINTAH MENEMUKAN KESEPAKATAN SOAL KELEMBAGAAN INI. DPR TEGAS MENGINGINKAN MENYEBUTKAN INI KARENA BNPB BERFUNGSI TIDAK HANYA SEKEDAR SAAT DARURAT BENCANA, TETAPI JUGA DIARAHKAN PADA MITIGASI,”

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily



serta membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Pengaturan ini juga dimaksudkan sebagai pengeluaran negara yang diatur UU (mandatory spending) untuk mendorong pemerintah daerah agar tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat.

“Kami menyebutkan mesti ada

bersikeras memperkuat BNPB di dalam konteks penanggulan bencana kita,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Jika DPR dan pemerintah tak kunjung mendapatkan titik temu, sambung Ace, bukan tidak mungkin pembahasan RUU Penanggulangan



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat menyerahkan bantuan kepada korban banjir di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Jumat (12/11/2021). Foto: Rifki/nvl



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F. Paulus bertukar cinderamata dengan Ketua Subkomite Parlemen AS untuk Asia Pasifik Ami Bera di Gedung Nusantara, Senayan, Jumat (12/11/2021). Foto: Geraldi/Man



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat mengikuti FGD Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI bertajuk “Konvergensi Media Internal DPR RI, Sinergi Mewujudkan Parlemen Modern” di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/11/2021). Foto: Oji/nvl



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menyampaikan sambutan dalam Seminar Nasional dengan tema ‘Pencegahan Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa’ di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (10/11/2021). Foto: Novel/nvl





Anggota komisi IX DPR Krisdayanti. foto: Jaka

POLITIK PENGABDIAN

Seorang Diva

Berpolitik tidak melulu dimaknai mencari kekuasaan. Berpolitik itu mulia ketika diarahkan untuk kebaikan masyarakat luas, terutama bagi masyarakat konstituen. Inilah yang dimaknai artis populer Krisdayanti yang akrab disapa KD. Politik bagi sang diva adalah pengabdian. Makna yang sangat ideal bagi politisi baru yang duduk di parlemen.

Parlementaria berhasil mewawancarainya secara eksklusif beberapa waktu lalu di Senayan. Sosoknya ternyata begitu ramah dan tak canggung bicara politik. Besar di industri musik dan seni peran, membuatnya dikenal luas sebagai artis nasional. Popularitasnya ini jadi modal sosial yang penting ketika berkontestasi sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019.

“Politik ini sebagai arena pengabdian untuk saya. Saya tulus saja untuk melakukan ini dan utamanya, bagaimana perempuan mendapatkan absolut power. Dia harus bisa menjalankan tugas rumah tangganya dan bisa dipercaya sebagai anggota parlemen. Nah, hal inil, kan, tidak mudah. Keluarga dan masa depan anak-anak saya harus saya pegang dan suami saya menitipkan itu kepada saya,” ungkap KD.

Menjadi politisi bagi KD, harus memiliki *wisdom*, selain bekal ilmu yang memadai. Terjun ke masyarakat dan membantu kesulitan yang dihadapi masyarakat adalah bagian dari *wisdom* tadi. Apalagi, kini masyarakat hidup di tengah pandemi Covid-19 yang entah sampai kapan berakhir. Ia pun mengaku sebagai generasi pandemi. Bersama anggota parlemen lainnya, KD menyusun kebijakan dengan menyesuaikan pada kondisi pandemi.

Anggota Komisi IX DPR ini juga selalu menunjukkan *wisdom*-nya saat berada di tengah masyarakat. Ia bekerja nyata untuk masyarakat yang diwakilinya. Sejak berkiprah sebagai wakil rakyat, sudah banyak yang ia lakukan untuk membantu masyarakat. Dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi IX yang membidangi kesehatan, ia juga banyak mengarsiteki kebijakan-kebijakan publik yang melindungi rakyat Indonesia.

Salah satu aksi konkretnya adalah ketika ia membantu pembangunan balai latihan kerja untuk komunitas gereja di Malang. Seorang pendeta telah memintanya untuk membantu menciptakan balai latihan kerja di lingkungan gereja. Ia memfasilitasinya dengan mengajak Kemenaker merespon semua itu.

“Alhamdulillah dapat perhatian dari pusat. Mereka berterima kasih kepada saya. Saya katakan, ini bukan dari saya, namun ini dari Tuhan yang menitipkannya lewat saya. Saya terkesan sekali termasuk ketika saya bisa membawa puluhan ribu vaksin percepatan di Malang Raya. Artinya sebaik-baiknya wakil rakyat adalah yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat dan kepala daerahnya,” papar KD.

PANGGUNG POLITIK

Meski politik adalah dunia baru bagi KD. Wanita kelahiran Batu, 24 Maret 1975 ini, besar di panggung hiburan. Dari panggung hiburan ke panggung politik butuh waktu panjang. Bahkan, keputusan terjun ke panggung politik diakui KD butuh pertimbangan matang.



Krisdayanti saat menyalurkan bantuan pembangunan BLK Komunitas Gereja Kristen Jamaat Tambakasari di Kabupaten Malang. Foto: dokpr

Modal sosial yang dimilikinya berupa popularitas memudahkan langkahnya melenggang ke Senayan. Akhirnya, pada Pemilu 2019 lalu ia terpilih menjadi legislator dan kini duduk di Komisi IX yang membidangi kesehatan.

Seperti diketahui, sebelumnya KD dikenal sebagai penyanyi dan artis pemeran. Sejak usia belia (9 tahun) dia sudah merekam lagu untuk film anak berjudul “Megaloman”. Bahkan pada usia 12 tahun sudah merilis album perdana dengan tajuk “Biasa Saja”.

Pada 1992, KD mengikuti ajang Asia Bagus di Jepang dan menjadi juara. Dari titik inilah popularitasnya mulai melejit hingga akhirnya menjadi Diva. Berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri pernah ia dapatkan. 27 tahun Malang melintang di dunia hiburan, KD akhirnya memutuskan menjadi politisi dan bergabung dengan PDI Perjuangan.

KD sendiri dalam beberapa

kesempatan selalu mengaku, tak menyangka akhirnya bisa duduk di Senayan menjadi wakil rakyat. Dari merilis album, kini bantu masyarakat membangun jalan dan rumah ibadah. KD sudah menyadari konsekuensi keputusannya menjadi wakil rakyat.

Bila dulu kiprahnya selalu mendapat sanjungan dan apresiasi dari para penggemar, kini kiprahnya diawasi publik. Ia sedang mengemban amanah rakyat yang diwakilinya. 1 Oktober 2019, KD dilantik menjadi anggota DPR RI untuk periode lima tahun ke depan.

Pada Pemilu 2019, KD ditempatkan di daerah pemilihan (dapil) Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu). Dari dapil ini diharapkan ia mendulang suara bagi partainya. Kebetulan Kota Batu adalah kota kelahirannya. Anak pasangan Trenggono dan Rachma Widadiningsih ini meraih suara terbanyak di dapilnya



Aktivitas Krisdayanti bersama warga di Dapilnya. Foto : dokpri

dengan 128.494 suara, mengalahkan para petahana.

KD menegaskan, tidak akan mengkhianati amanah yang sudah diberikan warga Malang Raya. Kepada pers ia berkomitmen untuk menjadikan kerja legislasi lebih berkualitas. Ia tentu tak mau mengecewakan masyarakat konstituennya yang sudah rela memberikan suara bagi dirinya. Pada periode ini, ia berharap DPR lebih produktif dengan menghasilkan banyak produk legislasi berkualitas.

MEMBAGI PERAN

Kesibukannya sebagai wakil rakyat memang telah menyita waktu kebersamaannya dengan keluarga. Tapi, ini peran baru yang sudah ia sadari ketika memutuskan untuk terjun ke panggung politik. KD mengaku ditakdirkan mendapat peran baru itu untuk mengabdikan kepada masyarakat, setelah hampir 30 tahun berkiprah di panggung hiburan.

Di DPR, ia bisa tampil apa adanya dengan ikut mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa kurang pas. Di rumah, tetaplah seorang

FOKUS PERHATIAN KD KINI ADALAH IKUT MENYEHATKAN DAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT

ibu dan istri yang bersahaja. Ia tak kesulitan membagi peran itu. Antara peran politik dan rumah tangga bisa dibaginya secara seimbang. KD terpilih sebagai anggota parlemen dari dapil Jawa Timur V yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Ia berkiprah bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Ia tak menyianyikan takdir politik ini. Ketika Tuhan sudah memberikan tugas itu melalui peran kita yang sekarang, ya itu harus dimaksimalkan. “Kadang saya juga enggak habis pikir, begitu baiknya Tuhan kepada saya dengan

memberikan peran lain bagi saya. Tanggung jawab saya di dunia seni yang sudah hampir 30 tahun ini kemudian diarahkan ke dunia politik lebih tegas, terarah, dan lebih mempunyai peluang untuk membantu orang lain,” ungkapnya.

Dia lalu melanjutkan, ketika menjadi diva selama 27 tahun mana mungkin ia bersentuhan dengan banyak balai latihan kerja di daerah. Ini adalah bagian kerjanya sebagai Anggota Komisi IX DPR RI. Sebagai wakil rakyat, ia juga bisa membantu masyarakat dengan program padat karya, hal yang tidak mungkin dilakukannya selama menjadi diva.

“Saya kira selama menjadi diva 27 tahun belum tentu saya bisa bantu balai latihan kerja, membuat bantuan padat karya, dan membetulkan jalanan. Saya sebelumnya tidak punya kuasa untuk itu. Artinya, memang, sebagai anggota dewan kita bukan magician yang merubah semuanya menjadi nyata, karena an kita tidak dapat memuaskan semua pihak. Tapi, setidaknya banyak hal nyata yang saya lakukan di luar kegiatan saya menyanyi,” tutur KD.

Fokus perhatian KD kini adalah ikut menyehatkan dan mensejahterakan masyarakat. Penempatannya di dapil Malang raya, menurut istri Raul Lemos itu, karena masyarakat di sana membutuhkan kehadirannya. Ia bergerak cepat membantu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang diwakilinya. Di sektor kesehatan, ia ikut membantu kesehatan perempuan dan menekan angka stunting di Malang. Begitulah peran dan kiprahnya sekarang.

DUTA DONOR DARAH

Ada satu lagi peran mulia yang disematkan bagi adik kandung Yuni Shara ini. KD adalah duta donor darah. Peran baru ini mulai dijalankan dengan mengampanyekan pentingnya donor darah untuk menyelamatkan hidup orang-orang yang membutuhkan banyak darah. Selain menyelamatkan hidup orang lain, donor darah

PERAN BARU INI MULAI DIJALANKAN
DENGAN MENGAMPANYEKAN
PENTINGNYA DONOR DARAH UNTUK
MENYELAMATKAN HIDUP ORANG-
ORANG YANG MEMBUTUHKAN
BANYAK DARAH.

Krisdayanti Anggota Komisi IX DPR RI



juga ternyata menyehatkan tubuh pendonor.

Mendonorkan darah harus dimulai dari diri sendiri. Ini aksi kemanusiaan yang sangat menyentuh kehidupan. KD menuturkan, dengan menjadi duta donor darah ini, bisa membuatnya lebih inspiratif dan peduli pada kesehatan dan kelangsungan hidup orang banyak. Banyak penyakit kritis yang membutuhkan darah pendonor, seperti talasemia, kanker, pasien cuci darah, pasien kecelakaan, dan lain-lain.

“Mudah-mudahan dengan disematkannya saya sebagai duta donor darah ini bisa semakin menggerakkan dan memberikan inspirasi bagi orang lain. Tidak hanya di lingkungan DPR, di luar DPR pun bisa menjadi pahlawan kemanusiaan. Donor darah ini urgen untuk membantu para pasien yang sedang dirawat, seperti talasemia, kanker, dan mereka yang mencuci darah,” imbuh KD, bijak.

Pada kasus pasien cuci darah, sambung KD, biaya yang dikeluarkan begitu besar, karena secara berkala harus mendapat tambahan darah untuk kelangsungan hidupnya. Darah pendonor juga dibutuhkan bagi para pasien demam berdarah. Dijelaskannya, selama ini ketersediaan stok darah di Indonesia di bawah standar WHO, yaitu 2 persen dari populasi penduduk atau

sekitar 5,2 juta kantong darah per tahun.

“Mungkin kita enggak tahu dan enggak mengenal orang lain yang kita donor. Namun, betapa itu menjadi hal yang sangat mulia. Ini harus disadari, karena sangat bermanfaat untuk kehidupan kita,” kilah KD. Kondisi kekurangan donor darah harus segera dipenuhi dengan menjangkit banyak pendonor. Salah satunya dengan yang pernah KD lakukan di gedung DPR. Ia mengampanyekan agar semua pegawai, anggota dewan, dan masyarakat sekitar mendonorkan darahnya di DPR.



Krisdayanti bersama keluarga. Foto: dokpr

JAGA KESEHATAN DENGAN RUTIN BEROLAHRAGA

Gaya hidup sehat sudah lama diterapkan KD sejak muda. Ia sangat mengutamakan gaya hidup sehat dengan menyeimbangkan antara kerja, istirahat dan olahraga yang teratur. Satu pedoman hidup sehat menurut KD ialah terjaganya imunitas, *positive thinking* dan menciptakan lingkungan yang sehat.

Salah satu olahraga yang ditekuni KD saat ini ialah olahraga asal Tiongkok, Wushu Taolu yang sudah mulai ditekuni KD sejak beberapa bulan terakhir, sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Meski tidak mudah, KD dapat berlatih gerakan selama dua jam dalam setiap latihan. Latihan ia jalani lima kali dalam seminggu secara rutin dan disiplin. KD tertarik pada Wushu karena perpaduan gerakannya, termasuk musik sebagai pengiring gerakan.

Selain diartikan sebagai seni bertempur, bagi KD, Wushu merupakan olahraga anti pikun karena ada media sarana kipas dan pedang. “Gerakan itu disinergikan dengan musik, sehingga ada cantiknya tetapi juga ketegasan. Tidak hanya bela diri, di dalam Wushu juga terdapat unsur seni, olahraga dan juga kesehatan,” tutup KD. ● ann/es

Perjuangkan Terbentuknya Yonif Korem 131/Santiago serta Keamanan di Papua

Komisi I DPR RI pada reses masa masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 menurunkan Tim Kunjungan Kerja ke dua daerah. Yaitu di Manado, Sulawesi Utara beragendakan menyerap aspirasi dari Korem membahas peluang dibentuknya Batalyon Infanteri di Korem 131/Santiago. Kemudian di Papua Barat, Tim Kunker Komisi I menaruh perhatian khusus agar konflik yang kerap terjadi di Papua bisa segera terselesaikan.

Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratno, Komisi I menyatakan akan memperjuangkan terbentuknya Batalyon Infanteri (Yonif) untuk Komando Resor Militer (Korem) 131/Santiago. Mengingat Korem 131/Santiago mempunyai wilayah pembinaan potensi kekuatan teritorial di

wilayah Sulawesi Utara yang terdiri dari 4 kota dan 11 kabupaten.

“Jadi (di Sulut) ada tiga Korem, dua Korem sudah punya Batalyon, di mana Korem 131/Santiago yang kita kunjungi, tidak memiliki Batalyon, tentu kita sangat prihatin dan kita akan perjuangkan bersama Komisi I DPR untuk mendapatkan anggarannya sehingga bisa terbentuk Batalyon di Korem 131/

Santiago,” kata Anton usai memimpin Komisi I DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Danrem Brigjen TNI Prince Meyer Putong, beserta jajarannya, di Manado, Sulawesi Utara.

Selain itu, kata politisi Partai Demokrat tersebut, Komisi I DPR RI juga akan memperjuangkan kenaikan tunjangan kinerja 100 persen kepada personel TNI pada tahun 2022. Tunjangan kinerja ini penting segera dilakukan sebagai imbal balik dari proses profesionalisme yang dilakukan oleh TNI sebagai perwujudan reformasi di lingkungan TNI.

“Reformasi di lingkungan TNI tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan masalah persoalan kesejahteraan prajurit itu sendiri. Oleh karena itu, dengan perbaikan kesejahteraan prajurit, TNI juga semakin dituntut untuk mewujudkan tentara yang profesional dan tangguh sebagai fungsi pertahanan dan keamanan dalam menjaga keutuhan NKRI,” tandas legislator dapil Jawa Barat V tersebut.

KONFLIK PAPUA HARUS DISELESAIKAN

Di Papua Barat, saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi I DPR RI dengan Pangdam Cenderawasih yang diwakili Irdam Brigjen TNI Wachid Apriyanto dan jajarannya, Anggota Komisi I DPR Yan Permenas Mandenas mengatakan untuk meminimalisir gangguan keamanan di Provinsi Papua dapat melalui beberapa pendekatan seperti pendekatan penggalangan dan agama, yang didukung dengan sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah.



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratno saat memimpin pertemuan tim Kunker Komisi I dengan Danrem Brigjen TNI Prince Meyer Putong. Foto: Kiki/mv



Tim Kunker Komisi I DPR RI foto bersama Irdam Brigjen TNI Wachid Aprilianto beserta jajaran di Kodam Militer XVII Cenderawasih. Foto: Natasya/mf

Membangun komunikasi yang baik, dinilai mampu mencegah berkembangnya isu provokasi yang berujung pada aksi teror terhadap aktivitas pemerintahan dan masyarakat yang dilakukan sekelompok orang hingga menimbulkan keresahan.

“Sebenarnya (dalam penanganan konflik Papua), semua pendekatan sudah dilakukan, tetapi perlu dipertegas dengan pendekatan hukum, kemudian pendekatan penggalangan, sehingga masyarakat kita lebih tertib. Termasuk sinergi pemerintah daerah dan TNI/Polri, baik tingkat provinsi sampai kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat desa. Sehingga masyarakat kita bisa terkonsolidasi, terbangun komunikasi yang baik untuk meredam berbagai macam aksi provokasi yang mengakibatkan kegiatan teror-meneror,” jelas Yan Permenas.

Yan Permenas menyayangkan minimnya jumlah media di Papua, yang mengakibatkan mudahnya isu provokasi berkembang di masyarakat. Ia pun mendorong hal ini menjadi perhatian pemda dan aparat dengan memanfaatkan media sosial untuk mempercepat penyebaran informasi, sehingga informasi yang beredar di masyarakat dapat berimbang.

Diharapkan hal ini dapat menekan angka kriminalitas dan ancaman gangguan dan membuat Papua lebih kondusif.

“Di Papua ini karena kurangnya media akhirnya provokasi itu lebih cepat masuk ke masyarakat. Tapi kalau media komunikasi, media sosial ini sudah sangat aktif mungkin masyarakat bisa mendapatkan informasi yang berimbang dengan demikian kita bisa menekan angka kriminalitas, dan ancaman gangguan di Papua. Jadi kita berharap suatu saat Papua kondusif dan tidak terjadi gesekan juga dengan TNI dan Polri,” harapnya.

PERMUDAH AKSES KOMUNIKASI DI PAPUA

Sementara, anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mengatakan akan mendukung percepatan pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) baik melalui program BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi), maupun dengan mengoptimalkan jaringan dan *bandwidth* pada operator telekomunikasi di wilayah Papua.

Hal ini menyusul adanya informasi dari Kodam XVII/Cenderawasih bahwa pembangunan jaringan telekomunikasi

di Papua dapat menekan angka kriminalitas dan gangguan keamanan.

“Akan selalu kita dukung baik itu melalui BLU BAKTI maupun melalui optimalisasi jaringan dan lebar pita (*bandwidth*) yang telah diberikan kepada operator yang ada,” tegas Farhan.

Politisi Partai NasDem ini mengatakan jika masyarakat terhubung dengan sistem komunikasi yang baik, maka dapat mempermudah untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi yang beredar di masyarakat guna meminimalisir adanya misinformasi dan disinformasi. Sehingga, pembangunan infrastruktur telekomunikasi memiliki peranan strategis tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga menjaga keamanan dan pertahanan negara.

“Sebetulnya ketika masyarakat terkoneksi dengan sangat baik, maka masyarakat telah mendapatkan informasi-informasi yang benar karena ternyata konflik diantara masyarakat di Papua ini sering terjadi karena adanya misinformasi dan disinformasi. Hal inilah yang menunjukkan bahwa ternyata pentingnya pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi di Papua ini memiliki nilai strategis,” terang Farhan.

● qq,nap/es

Komisi II Pantau Permasalahan Pertanahan dan Tata Ruang

Komisi II DPR RI pada saat reses masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 menggelar Kunjungan Kerja ke Sumatera Selatan, Sulawesi Utara dan Bali. Komisi II menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan daerah serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk mendalami isu pertanahan.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal bertukar cenderamata dengan Wakil Gubernur Sumsel. Foto: Agung/rvi

Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan, terdapat 3.200 pelanggaran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di tingkat nasional.

“Wujudnya seperti ketidaksesuaian pengelolaan dari apa yang sudah diatur dalam regulasi dengan mereka kerjakan di ruang atau lahan itu. Ini yang kami

pantau di Sumsel,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal di sela-sela pertemuan Tim Kunker Komisi II dengan Wakil Gubernur Sumsel serta Kepala Kantor Wilayah BPN Sumsel, baru-baru ini.

Masalah tata ruang ini menurut Syamsurizal masih marak terjadi, Komisi II perlu melihat kondisi riil di lapangan agar pelanggaran tersebut dapat meminimalisir dan dicegah sedini mungkin. Ia pun tak menampik permasalahan tata ruang tersebut bukan

persoalan yang gampang, kontribusi masyarakat lewat kepatuhan terhadap regulasi yang ada perlu didorong agar dapat meminimalisir kejadian pelanggaran itu.

Sebab, seringkali penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilema-dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Maka Komisi II mendorong mencari keseimbangan atau *win-win solution* atas konflik yang sudah terjadi, meski membutuhkan upaya yang tidak mudah.

“Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Dengan usaha-usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan,” terang politisi Fraksi PPP ini.

PERLU SOSIALISASI PENTINGNYA SERTIFIKASI TANAH

Wakil ketua Komisi II Junimart Girsang saat memimpin Tim Kunker Komisi II ke Manado, Sulawesi Utara mengatakan, masih banyak kendala yang terjadi terkait permasalahan pertanahan di Sulawesi Utara. Kendala tersebut diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat hak atas tanah. Untuk itu masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi tentang pentingnya hak atas tanah mereka.

“Kita kritisi pertemuan hari ini, banyak kami terima masukan-masukan ya dari Kanwil BPN atau ATR/BPN Sulut bahwa kendala yang mereka hadapi



Tim Kunker Komisi II DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang foto bersama dengan para mitra kerja di Sulut. Foto: Bianca/nvl

itu yang pertama kurang kesadaran masyarakat untuk sertifikasi, tentu harus ada sosialisasi,” tegas Junimart usai pertemuan dengan Kakanwi BPN Sulut dan para Kakan BPN Kabupaten/Kota se-Sulut.

Selain itu, masih banyaknya kasus tanah yang sudah memiliki sertifikat namun kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menjadi permasalahan yang disoroti dalam pertemuan tersebut.

Oleh sebab itu, politisi fraksi PDI-Perjuangan tersebut menekankan bahwa masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang sertifikasi tanah hak milik dan bagaimana cara menghadapi persoalan pertanahan lainnya. Sehingga jika ada permasalahan dengan tanah mereka, masyarakat memiliki pemahaman tentang hak dan hukumnya.

“Nah, ini yang harus kita kasih pemahaman kepada masyarakat, ya kalau memang itu menjadi hak masyarakat dan ada yang mengklaim, gugat saja ke pengadilan, tahan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) kalau itu menjadi SK (Surat Keputusan) pemerintah, supaya masyarakat kita paham hak hukumnya itu,” tutupnya.

KAWASAN WISATA DAN PERTANIAN HARUS SEIMBANG

Selain itu, Anggota Komisi II Aminurokhan dalam kunjungan kerja ke Bali, mendorong agar Kanwil BPN Bali menyeimbangkan kawasan wisata dan pertanian di Bali. Hal ini menyangkut tata ruang Bali agar jangan sampai kawasan pertanian yang sangat produktif justru bergeser fungsinya menjadi kawasan pariwisata.

“Bali dengan salah satu pola tanam pertanian subak, sudah cukup terkenal. Produktivitas pertaniannya pun cukup bagus. Kemudian pariwisata saat ini menjadi sektor yang diandalkan. Namun, kita tidak boleh mengorbankan sektor-sektor pertanian yang produktivitasnya tinggi ini,” ujar Amin usai pertemuan dengan jajaran Kanwil BPN Bali di Denpasar, Bali.

Amin menambahkan, pertimbangan teknis terkait tata ruang yang disampaikan BPN Bali jangan sampai bertentangan dengan peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemda. “BPN sebagai institusi tentu sudah mempertimbangkan secara komprehensif atas hal-hal yang menjadi bagian yang diputuskan oleh Pemda,” tegasnya.

Di samping itu, Amin juga meminta agar BPN lebih aktif untuk memediasi sengketa-sengketa agraria supaya tidak berlarut-larut. Dengan mediasi, sengketa akan lebih cepat ditemukan jalan tengahnya ketimbang diselesaikan melalui jalur hukum. “Kalau pakai jalur hukum, ini tentatif, waktunya tidak terbatas. Bagaimana juga BPN punya target menyelesaikan sengketa agraria ini menjadi bagian dari program prioritas mereka,” terangnya. ● ah,bia,es/es



Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhan saat pertemuan dengan jajaran Kanwil BPN Bali. Foto: Erman/nvl

Komisi III Soroti *Over Kapasitas Lapas dan Narkotika*

Over kapasitas Lapas merupakan masalah klasik yang tak terselesaikan. Komisi III DPR RI berulang kali mendesak agar ada solusi segera untuk menghindari masalah yang lebih rumit lagi. Selain itu, Komisi III turut menyoroti peredaran Narkotika. Dalam rangkaian Kunjungan Kerja kali ini, Komisi III mendesak mitra kerjanya untuk menangani kedua permasalahan tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan *over kapasitas lapas merupakan permasalahan klasik yang selalu dialami sebagian besar rumah tahanan (rutan) maupun lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Karena itu over kapasitas di lapas menjadi persoalan serius dan mendesak untuk diatasi.*

“Jadi memang selalu saya sampaikan bahwa harus ada pemikiran serius antara aparat penegak hukum, niat

yang serius dari pemerintah untuk duduk bersama membicarakan hal ini secara bersama-sama,” jelas Adies usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI dengan Kapolda Jawa Timur dan Kepala BNNP Jawa Timur beserta jajarannya di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, belum lama ini.

Meskipun kelebihan kapasitas lapas tidak bisa hanya diatasi dengan sekali langkah, namun politisi Partai Golkar pun menjelaskan bahwa banyak hal yang bisa dilakukan terkait penanganan over kapasitas lapas. Ia menginginkan

para aparat penegak hukum bisa duduk bersama membicarakan cara bagaimana menyelesaikan permasalahan over kapasitas lapas.

“Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya seperti 70 persen rata-rata penghuni lapas dan rutan adalah pengguna narkoba, nah itu bagaimana dilakukan rehabilitasinya. Juga, bagaimana dengan Rancangan Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan, Rancangan Undang-Undang Lapas dan sebagainya. Nah hal-hal inilah yang harus segera kita tuntaskan. Jangan ditunda-tunda karena ini kritikal sekali,” tegas Adies.

Politisi dapil Jawa Timur I tersebut menegaskan bahwa percepatan penanganan over kapasitas di lapas menjadi bahan utama Komisi III DPR RI untuk dibahas dalam pembicaraan bersama aparat-aparat penegak hukum agar permasalahan tersebut dapat segera diatasi.

PANTAU KASUS YANG DITANGANI POLDA DAN BNNP SULUT

Tim Kunker Komisi III DPR RI mendapati informasi sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara dan BNN Provinsi Sulawesi Utara. Di antaranya mengenai Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan pertambangan emas di kawasan hutan lindung terkait ditangkapnya kasus korupsi Bupati Minahasa Utara. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh ingin ke depannya kasus ini terus dipantau, dan hal ini pun juga menjadi perhatian khusus dari Komisi III DPR RI.

“Jadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI, termasuk juga kelangkaan solar di daerah Pineleng, Manado,” kata Pangeran saat pertemuan dengan Kapolda Sulut beserta jajaran, Kapolres se-Sulut, Kepala BNNP Sulut beserta jajara, serta Kepala BNNK se-Sulut, di Mapolda Sulut, Manado.

Pangeran juga mendapati kendala minimnya anggaran yang dialami mitra kerja Komisi III DPR RI di Sulut. Ia



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir meninjau vaksinasi bagi para penghuni rumah tahanan. Foto: Hanum/mv



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat pertemuan di Mapolda Sulut. Foto: Dipa/nvl

meminta hal ini dapat diatasi, jangan sampai banyak kasus yang terlantar oleh karena kekurangan anggaran.

“Terkait anggaran, kami juga meminta kepada Kapolda agar ke depannya kami bisa memperjuangkan kendala yang sejauh ini terjadi. Kami akan coba mengawal juga kepada Kapolri supaya anggaran di Polda Sulawesi Utara ini bisa ditingkatkan lagi,” kilah politisi PAN tersebut.

Selain itu, Pangeran juga mengapresiasi adanya sinergi dan kerja sama yang baik antara kepolisian maupun pihak terkait lainnya dalam penanganan pandemi Covid-19. “Harapan kami terkait dengan penanganan Covid-19 cukup bagus. Kami sudah diskusi dengan Kapolda bahwa masyarakat Sulawesi Utara yang sudah divaksinasi kurang lebih 40 persen dan sudah turun pada level 2. Hal ini harus terus dipertahankan bahkan bisa ditingkatkan. Mudah-mudahan ini segera pulih ke level 1,” tutup legislator dapil Kalimantan Selatan I tersebut.

EDUKASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA HARUS DIGIATKAN

Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi mendorong pemberantasan narkotika di Indonesia

lebih dimaksimalkan. Menurutnya, peningkatan edukasi mengenai bahaya narkotika bisa menjadi salah satu langkah untuk meminimalisir bertambahnya jumlah penyalahguna narkotika yang saat ini sudah menasar hingga generasi muda, yakni pelajar dan mahasiswa.

“Seperti kita ketahui, pengguna narkotika sudah sampai ke pelajar dan mahasiswa. Sebaiknya lebih banyak lagi edukasi untuk pencegahan narkotika karena jika dipenjarakan belum

tentu dia akan baik, bisa saja didalam penjara dia akan menggunakannya lagi,” ujar Andi Rio usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Maluku beserta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku di Mapolda Maluku, Ambon.

Selain terkait dengan pencegahan, Andi Rio juga menyoroti hukuman bagi para penyalahguna narkotika yang harus disesuaikan dengan peran masing-masing pelaku. “Jika dia pemakai (narkotika), sebaiknya direhabilitasi, (dan) jika dia pengedar (narkotika) maka harus diberikan hukuman yang berat. Apalagi jika yang sudah bandar, harus mendapatkan hukuman yang sangat maksimal,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Untuk itu, Andi Rio mengajak masyarakat untuk saling bahu membahu berperan dalam pemberantasan narkotika di Indonesia. “Narkotika ini adalah musuh bersama kita, tidak boleh hanya mengandalkan hanya pihak BNN atau kepolisian. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus saling membantu untuk memberantas narkotika tidak hanya di Maluku saja tapi juga di seluruh Indonesia,” tutup Anggota DPR RI dapil Sulawesi Selatan II ini. ● hnm,pdt,dip/es



Tim Kunker Komisi III DPR RI foto bersama dengan mitra kerja di Mapolda Maluku. Foto: Prima/nvl

Dukung Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kelestarian Lingkungan

Komisi IV DPR RI mengirimkan tiga Tim Kunjungan Kerja Reses ke Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan pada pertengahan Oktober lalu. Di tiga daerah itu, Komisi IV DPR RI menyoroti sejumlah hal terkait pertanian, perikanan hingga kelestarian lingkungan.



Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat mengunjungi pembibitan kentang di Karo, Sumatera Utara. Foto: Ariel/nvl

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta pemerintah pusat *men-support* pembibitan kentang untuk petani di Desa Bukit, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo, Sumut. Selama ini pembibitan kentang tersebut

menggunakan metode bertingkat dan bibitnya didatangkan dari Pulau Jawa. “Petani Karo selama ini berjalan dengan swadaya masing masing, ini artinya pemerintah pusat melalui APBN kurang *support* pada petani. Mereka butuh traktor dan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bibit dari

Pulau Jawa sangat besar sekali,” ungkap Sudin.

Politisi PDI-Perjuangan itu menerangkan, Karo memproduksi kentang untuk Sumut sebesar 57 persen. Selain bibit, para petani juga membutuhkan pupuk untuk pengembangan hortikultura. Para petani berharap pupuk tetap tersedia meskipun bukan pupuk yang bersubsidi. “Mendengar keluhan petani kentang, saya minta kepada PT Pupuk Indonesia agar persoalan pupuk diselesaikan segera. Saya juga katakan harus koordinasi sama Dinas Pertanian Kabupaten Karo. Saya mau langsung ada, tindak lanjutnya itu yang paling penting bagi saya.” tegas Sudin.

PERLU KESERiusAN WUJUDKAN CITARUM HARUM

Saat meninjau Kilometer 0 Citarum, di Situ Cisanti, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai wilayah hutan di sekitar Sungai Citarum sudah banyak yang gundul. Menurutnya perlu ada keseriusan bersama seluruh pihak pihak untuk mewujudkan Citarum Harum, dalam hal ini untuk revitalisasi dan rehabilitasi Sungai Citarum, termasuk penanganan pencemaran dan penghijauan kembali sungai terpanjang di Jawa Barat tersebut.

“Wilayah hutan (sekitar Sungai Citarum) banyak yang gundul. Sehingga pada November nanti perlu ada keseriusan untuk segera dilakukan penanaman pohon. Tetapi juga harus dipastikan tentang jaminan



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin tim kunker Komisi IV meninjau Kilometer 0 Citarum. Foto: Sofyan/nvl

kesejahteraan masyarakat lokal di sini,” kata Dedi. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud politisi Partai Golkar tersebut yakni sebagian besar pencaharian masyarakat setempat yang menjadi petani sayur mayur di kawasan Sungai Citarum, dan cenderung enggan menanam tanaman keras untuk meminimalisir potensi erosi.

Karena faktor ekonomi itu membuat kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan tanaman keras menjadi rendah. “Kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan hutan berbenturan dengan kebutuhan ekonomi yang menanam sayur. (Sebenarnya) itu bisa diintegrasikan (dengan program Citarum Harum). Dan nanti setelah masa reses, Komisi IV akan melakukan pemetaan. Dan kebetulan saya orang Jawa Barat, jadi saya akan turun langsung memetakan, (diharapkan) dalam tiga tahun ke depan di sini sudah harus hijau kembali,” komitmen Dedi.

SINERGI, KUNCI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PELABUHAN PERIKANAN UNTIA

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menyatakan, perlu sinergi antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah juga *stakeholder* lainnya untuk dapat segera mengesahkan dan mengeluarkan organisasi kepengurusan Pelabuhan Perikanan Untia. Hal tersebut menjadi penting agar pelabuhan ini dapat segera difungsikan dan menjadi sentralisasi pelabuhan perikanan bertaraf nasional di Sulawesi Selatan.

“Saya merasa ironis dengan potensi yang dimiliki Sulawesi selatan ini. Salah satu yang menjadi penghambat, pertama adalah tentang organisasi yang belum selesai. Sebenarnya KKP sudah memberikan struktur organisasi kepada KemenPAN-RB,” ungkap Anggia. Politisi PKB ini mengaku heran, seharusnya organisasi itu sudah selesai ketika masih di tahap perencanaan.

Di sisi lain, Anggia mengapresiasi teknologi mesin *rice to rice* yang ada di Gudang Bulog Baru (GBB) Panaikang, di Panakukang, Makassar, Sulsel. Diketahui mesin tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan beras yang berkualitas dengan nutrisi yang tetap terjaga. “Adanya mesin *rice to rice* ini yang memproses dari hasil panen petani yang (kualitas) biasa dijadikan premium dan itu menjadi konsumsi kebutuhan masyarakat,” katanya. ● afr,sf,ndy/es



Foto bersama Tim Kunker Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan Untia. Foto: Nadia/nvl

Komisi V Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah

Infrastruktur memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, DPR RI melalui Komisi V senantiasa menekankan agar para mitra kerja mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur terutama di daerah, sebagai upaya mengatasi berbagai kesenjangan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau, terutama Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang yang pengerjaannya konstruksinya saat ini sudah mencapai 74,5 persen.

“Progres konstruksi sudah mencapai 74,5 persen, dan saat ini masih terus dikerjakan untuk

mencapai target akhir tahun ini bisa beroperasi,” kata Syarief usai meninjau Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Kampar, Riau.

Adapun progres pembebasan lahan, sudah mencapai 89,11 persen (STA 9+500-40.000) dan dapat difungsikan sepanjang 31 km pada akhir tahun ini. “Tinggal sekitar 1 kilometer lagi di dekat gerbang tol karena lahannya masih masuk kawasan hutan. Untuk itu kami minta pemerintah pusat dan

pemda berkoordinasi menyelesaikan permasalahan ini,” ungkapnya.

Syarief menilai, keberadaan jalan tol ini dapat meningkatkan pertumbuhan Ekonomi masyarakat serta meningkatkan daya saing Indonesia terhadap luar negeri. “Kita semua yakin bahwa ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pendorong investasi, pemacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik, serta pemerataan hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

DESAK PENYELESAIAN REL KERETA API MAROS-PANGKEP

Sementara itu di lokasi yang berbeda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, banyaknya permasalahan sosial terutama masalah pembebasan lahan telah mengakibatkan bergesernya waktu penyelesaian proyek pembangunan rel kereta api rute Maros-Pangkep.

“Memang betul pembangunan rel kereta api agak bergeser waktu penyelesaiannya hal ini diakibatkan banyaknya permasalahan-permasalahan sosial seperti pembebasan lahan. Namun saat ini, Alhamdulillah sudah menunjukkan progres yang jauh lebih baik dari sebelumnya,” kata Andi Iwan saat memimpin Tim Kunker Komisi V DPR RI ke kota Makasar, Sulawesi Selatan.

Andi Iwan menekankan, jika ingin proyek ini cepat selesai, pemerintah seharusnya menilai lahan milik masyarakat secara objektif, agar masyarakat juga bisa mendukung



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie (dua dari kiri) meninjau proyek jalan tol Pekanbaru-Bangkinang. Foto: Ria/nvl



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat meninjau progres pembangunan rel Kereta Api Maros-Pangkep. Foto: Mentari/ivi

program ini. “Penilaian terhadap lahan ini harus betul-betul objektif sesuai dengan tim operasional dan tim independen,” jelas politisi dapil Sulawesi Selatan II ini.

Hal yang sama juga diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras. Jika mengacu pada masterplan, ucap Aras, proyek pembangunan rel kereta api rute Maros-Pangkep ini seharusnya diresmikan tahun 2018 lalu. Terhambatnya proyek dikarenakan belum adanya kesepakatan dari pemilik lahan.

“Rencana awal akan diresmikan tahun 2018. Tapi saat saya menjadi Anggota DPR RI periode tahun 2019-2024, ternyata progres pekerjaannya belum selesai atau stagnan. Sehingga kami terus menghibau Pak Menteri beserta jajaran bahkan, Presiden sendiri ikut turun tangan agar pekerjaan ini segera selesai,” ungkap politisi PPP ini.

Dirinya berharap, masing-masing *stakeholder* serius untuk menyelesaikan rel kereta api Maros-Pangkep agar bisa difungsikan pada Juni 2022. “Jangan sampai periode Jokowi selesai tapi belum berjalan juga. Itu betul-betul kita berikan *warning* pada pelaksana agar dapat mengejar keterlambatan pembangunan ini,” pungkasnya.

MANDALIKA SIAP SELENGGARAKAN GELARAN INTERNASIONAL

Dari Nusa Tenggara Barat, Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mengapresiasi dan mengakui kehebatan Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat, baik fasilitas, infrastruktur jalan, maupun sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung even internasional seperti

World Superbike (WSBK) dan MotoGP. Menurutnya pembangunan sirkuit sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan dan menjadi kebanggaan NTB karena memiliki sirkuit sekelas MotoGP.

“Kami sudah melihat secara langsung progres pembangunannya sangat bagus. Harapan ke depannya (Sirkuit Mandalika) dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat NTB,” ujar Sudewo saat meninjau Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah.

Di sisi lain, politisi Partai Gerindra itu menilai progres pembangunan *by pass* dari bandara ke KEK Mandalika sudah cukup bagus, sehingga diharapkan segera rampung sebelum WSBK. “Kami datang ke NTB untuk melihat berbagai persiapan sarana prasarana dan fasilitas Sirkuit Mandalika dalam menyambut perhelatan balapan dunia tersebut. Alhamdulillah progresnya sangat luar biasa,” puji Sudewo.

Dalam peninjauan tersebut, Komisi V DPR RI ingin memastikan prasarana penunjang Sirkuit Mandalika dalam menyambut WSBK, 19-21 November tahun ini dan even MotoGP 20 Maret 2022 mendatang. ● rnm,nri,eno/es



Tim Kunker KOMisi V DPR RI foto bersama di Sirkuit Mandalika, NTB. Foto: Eno/rwi

Komisi VI Soroti Peran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 berdampak secara signifikan bagi ekonomi di sejumlah daerah. Untuk itu, Komisi VI DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Barat untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan atas kinerja mitra komisi VI DPR dalam memulihkan perekonomian.



Tim Kunker Komisi VI DPR RI foto bersama dengan mitra kerja di Bali. Foto: kca/mf

Di Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menyampaikan pentingnya mengoptimalkan peran *Holding* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pariwisata agar pemulihan ekonomi di Provinsi Bali dapat kembali berjalan.

Politisi yang akrab disapa Demer itu memaparkan agar kemampuan Indonesia, khususnya Bali dalam menciptakan *branding* pariwisata yang baik, dapat meningkatkan perekonomian nasional dan dapat memiliki kebanggaan akan kualitas pariwisata Indonesia.

“Harapan kami, di Bali ini agar perekonomiannya bisa segera pulih, dan tentunya bentuk super *holding* BUMN bisa cepat terjadi, sehingga branding-branding pariwisata nasional, seperti perhotelan ataupun destinasi wisata, mampu bersaing dengan *branding-branding* internasional,” ucap Demer ketika memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Bali, baru-baru ini.

Demer juga menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI mendukung BUMN dalam membentuk sejumlah kluster pariwisata, sehingga nanti akan menjadi besar, efisien, efektif, dan berkualitas.

“Termasuk nantinya pariwisata di Indonesia ini akan saling berintegrasi, misalnya dari penerbangan yang terintegrasi dengan tempat pariwisata atau destinasi. Dengan keintegrasian tersebut, akan tercipta efektivitas, seperti untuk hal marketing yang dapat difokuskan dalam satu *channel* ,” jelas Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut.

Selain itu, Demer juga menyampaikan bahwa diperlukan acuan standar internasional di destinasi-destinasi pariwisata, akomodasi, maupun produk-produk dalam negeri, mengingat kualitasnya perlu diperhatikan, sebab ke depannya akan banyak turis-turis mancanegara yang akan melakukan wisata ke Indonesia.

“Harus ada standar-standar yang dipenuhi, misalnya pada hotel bintang tiga, juga harus memenuhi standar internasional,” tandas Demer. Namun, legislator dapil Bali itu menekankan, pemerintah perlu memperhatikan agar standar tersebut tidak mematikan usaha kecil dan usaha menengah, sehingga tidak mengganggu kesejahteraan pelaku UMKM.

PANTAU PERKEMBANGAN EKONOMI DI JABAR

Di Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, mengatakan, secara spesifik pandemi Covid-19 berdampak secara signifikan bagi ekonomi Provinsi Jawa Barat, salah satunya imbas terhadap penurunan wisatawan.

“Penurunan jumlah wisatawan tersebut berdampak pada penurunan kinerja beberapa sektor yang terlibat dalam ekosistem pariwisata di Jawa Barat antara lain sektor perhotelan dan hospitality, travel agent serta sektor



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Foto: Eko/mv

UMKM,” kata Martin saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Bandung, Jabar.

Adapun arah ekonomi baru Jabar pada masa pandemi Covid-19 ini meliputi berbagai macam strategi pemulihan ekonomi. Pertama, menjadikan investasi sebagai unggulan di Jabar, bahkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bertekad Jabar juara investasi Asia Tenggara. Kedua, di bidang kesehatan, saat ini Jabar masih kurang rasio pelayanan kesehatan. Selanjutnya kedaulatan pangan, kemudian revolusi digital di era industri 4.0. Kelima, ekonomi berkelanjutan (green economy) terus diupayakan, seperti mobil listrik.

UPAYA BANGKITNYA UMKM DI TENGAH PANDEMI

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mengapresiasi keputusan OJK terkait perpanjangan restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2023. Perpanjangan relaksasi restrukturisasi diyakini menjadi solusi tepat bagi UMKM bangkit di tengah pemulihan ekonomi nasional.

OJK memutuskan memperpanjang periode restrukturisasi kredit dengan pertimbangan bahwa debitur memerlukan waktu lebih panjang untuk pulih dari dampak Covid-19.

Namun, menurut Intan, program restrukturisasi sebaiknya diikuti

dengan kebijakan hapus buku kredit macet bagi UMKM yang terdampak pandemi sehingga tidak masuk dalam daftar hitam perbankan.

“Jangan sampai melakukan restrukturisasi, tetapi catatan kredit macet justru menyulitkan mereka untuk mendapatkan kredit baru,” kata Intan dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, Badan Standardisasi Nasional (BSN), PT Telkom Indonesia (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) di Semarang, Jawa Tengah.

Politisi Fraksi PAN ini juga menilai tingkat Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) bagi pelaku UMKM belum bersahabat. Dirinya pun mendorong perbankan mempermudah akses permodalan kepada pelaku UMKM agar tidak makin banyak terjerat layanan pinjaman *online* ilegal. “Sudah banyak sebetulnya relaksasi regulasi daru masing-masing perbankan, apakah itu Himbara maupun non-Himbara, tetapi memang harus lebih dipermudah, misalnya untuk pengajuan kredit karena itu salah satu kesulitan UMKM,” imbuh legislator dapil Jawa Barat VI itu. •
ica,ann,eko/es



Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi. Foto: Anne/mv

Komisi VII Soroti Transisi Energi menuju EBT dan Sebaran Pertashop

Dalam salah satu Kunjungan Kerja Reses pada masa sidang ke I tahun sidang 2021-2022, Komisi VII DPR RI menjalankan fungsi pengawasan untuk melihat kinerja sejumlah mitra kerja diantaranya adalah sektor energi. Daerah tujuan kunjungan tersebut meliputi Provinsi Bali, Sumut, dan Jawa Barat.

Saat kunjungan ke Kabupaten Bogor, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengingatkan pemerintah bahwa transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) perlu kehati-hatian dan kearifan. Menurutnya, di samping upaya menggalakkan energi yang ramah lingkungan, Indonesia

juga memiliki potensi energi yang lain seperti batu bara, tenaga surya, maupun air sehingga perlu ada integrasi dalam pengembangan dan pengelolaan energi, guna menjaga transisi energi.

“Nah itu yang ingin kita pelajari dan akan kita cari solusinya, integrasinya seperti apa, terutama dalam konteks menjaga transisi energi. Transisi energi

kan tidak mungkin spontanitas, perlu ada proses waktu yang kita sesuaikan,” ujar Mukhtar saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke PLTP Gunung Salak PT Indonesia Power, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

Mukhtar melanjutkan, jangan sampai transisi energi ini nantinya menimbulkan persoalan, seperti yang kini terjadi di Eropa dan China, dimana mereka mengalami krisis energi karena pasokan energinya terganggu. Berkaca dari hal tersebut, ia menilai sistem energi nasional harus terintegrasi untuk mencegah hal yang serupa terjadi.

“Jadi tidak boleh parsial (transisi) energi ini, harus terintegrasi, terintegrasi secara baik. Nah inilah yang menjadi bahan bahan nanti yang akan kami kembali dalam masa sidang yang akan datang. Temuan-temuan (pada kunjungan kerja) reses ini akan kita tindak lanjuti,” urai politisi Partai Golkar tersebut.

PERTAMINA HARUS PERLUAS JANGKAUAN PERTASHOP

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mendukung program Pertamina Shop atau Pertashop dari PT Pertamina (Persero). Dimana, pertashop merupakan *outlet* penjualan Pertamina berskala tertentu yang diutamakan di daerah yang jauh dari jangkauan SPBU. Pertashop sendiri disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumsi BBM non subsidi (pertamax), LPG non subsidi (bright gas), dan produk ritel Pertamina lainnya.

“Kami meminta kepada Pertamina dalam program pertashop ini untuk memperluas jaringan secara lebih aktif dan masif menyentuh masyarakat sampai ke desa. Kita berharap pertashop ini bisa tersebar ke seluruh daerah,” papar Ridwan saat mengikuti FGD Kunker Komisi VII DPR dengan Pertamina.

Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar ini, kehadiran pertashop di tengah masyarakat ini sangat membantu



Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin bertukar cenderamata dengan mitra kerja. Foto: hira/nw



Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam. Foto: Jaka/nvl

sekali, jika dibandingkan mereka harus ke SPBU yang jaraknya jauh. Sehingga justru akan lebih menghemat pengeluaran dibanding harus pergi ke kota.

“Target pertashop ini kan kebutuhan utamanya untuk motor, maka kebutuhan BBM-nya juga tidak terlalu banyak. Kalau mesti jauh-jauh pergi ke SPBU di kota, justru habis sendiri nanti bensinnya dicjalan. Selain itu, pertamax ini memiliki ron yang bagus, sehingga akan lebih mengawetkan mesin motor,” imbuhnya.

Legislator dapil Jatim V ini mengusulkan agar Anggota Komisi VII DPR RI menjadi marketing Pertashop dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pertamina. “Dan kami siap untuk merekomendasikan masyarakat yang ingin bekerjasama dengan Pertashop. Sekaligus, menyosialisasikan manfaat dari penggunaan BBM yang memiliki Ron 92. Jadi kami dari Komisi VII DPR mendukung penuh program Pertashop ini,” tutupnya.

DATA KEBUTUHAN NASIONAL GULA RAFINASI HARUS SINKRON

Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar menilai data kebutuhan nasional gula rafinasi antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) setiap tahun tidak sinkron. Kelemahan akurasi data inilah yang menyebabkan

sering terjadi rembesan Gula Kristal Rafinasi (GKR) untuk industri ke Gula Kristal Putih (GKP) untuk konsumsi masyarakat sehari-hari.

“Hampir rata-rata (data) tidak sinkron, sehingga setiap tahunnya terjadi rembesan. kelemahan dalam pengawasan, kelemahan dalam rekomendasi ini mengakibatkan petani tebu yang dirugikan,” jelas Nasril Bahar pasca mengikuti pertemuan Tim

Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan PT Medan Sugar Industry, di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Akurasi data tersebut dapat terkait berapa sesungguhnya kapasitas terpasang, *idle capacity*, kebutuhan industri nasional, serta terkait angka yang harus direkomendasikan untuk tujuan impor *raw sugar* kebutuhan gula rafinasi. “Nah data-data inilah yang sesungguhnya siluman bagi kita,” tegas Nasril.

Anggota Fraksi PAN ini menjelaskan kebutuhan nasional untuk GKR hanya 3,5 juta ton per tahun. Namun, ia menduga rekomendasi yang dikeluarkan untuk importasi GKR tersebut melebihi 3,5 juta ton. Kondisi ini yang mengakibatkan terjadi rembesan, sehingga mengganggu produktivitas petani tebu lokal yang menghasilkan GKP, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sekitarnya.

“Ini yang saya sayangkan kalau Kemenperin dan Kemendag tidak hati-hati mengeluarkan rekomendasi atau kuota untuk kebutuhan gula rafinasi untuk industri,” urai Nasril. • jk,hal,rđn/es



Tim Kunker Komisi VII DPR RI foto bersama dengan direksi PT Medan Sugar Industry. Foto: Ridwan/nvl

Komisi VIII Dukung Pengembangan Pendidikan Keagamaan

Komisi VIII DPR RI saat reses masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 melakukan kunjungan kerja ke tiga daerah. Ada beberapa permasalahan yang disorot oleh Tim Kunker, diantaranya terkait pengembangan pendidikan keagamaan baik itu madrasah maupun sekolah Kristen.

Tak kalah pentingnya, sambung Ace, hampir seluruh siswa dan tenaga pendidik di kedua sudah divaksin Covid-19. “Selain itu yang juga yang tidak boleh dikesampingkan adalah jaga jarak. Artinya dalam satu kelas, maksimal setengah siswa hadir di kelas, setengahnya lagi masih melalui online atau daring. Dengan cara *hybrid* ini insyaAllah bisa menghindari resiko penularan Covid-19 juga,” jelas Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

DUKUNG PENINGKATAN KAPASITAS IAKN MANADO

Di Manado, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengimbau IAKN Manado meningkatkan kapasitasnya untuk menyambut kebutuhan masa depan. Pasalnya, sebagai perguruan tinggi keagamaan, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado memiliki peran strategis dalam mencerdaskan bangsa dan menjaga kerukunan beragama.

“Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi Kristen, IAKN Manado memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam keikutsertaan mencerdaskan bangsa dan negara,” kata Marwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI menggelar pertemuan dengan para sivitas akademika IAKN Manado, di Manado, Sulawesi Utara.

Sementara peningkatan kapasitas itu diantaranya peningkatan sarana prasarana, peningkatan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan, dan peningkatan fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi lainnya. Dari kampus ini diharapkan lahir para akademisi yang mampu menjawab tantangan.



Foto bersama Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan guru dan siswa MAN 2 Cianjur. Foto: Fitri/nni

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, Komisi VIII mendukung pembangunan laboratorium sains di MAN 2 Kota Makassar. Ia berharap pihak sekolah secara resmi membuat proposal rencana pembangunan laboratorium tersebut kepada Kementerian Agama. Kemudian Komisi VIII DPR RI dan Kemenag akan segera mendiskusikannya.

“Kami Komisi VIII DPR RI sepenuhnya mendukung, dan insyaAllah akan kami bahas dan perjuangkan usai reses masa persidangan pertama ini selesai.

Namun sebelumnya apa sudah ada proposal yang disampaikan kepada pusat. Jika belum silahkan disusun dulu, sehingga kami bisa sampaikan dan perjuangkan ke Kementerian Agama,” papar Ace di Makassar, Sulawesi Selatan, baru-baru ini.

Tak hanya itu, Ace juga mengaku optimis MAN 2 dan MTsN 1 Makassar sudah siap menghadapi Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Hal tersebut terbukti dengan telah dipenuhinya beberapa persyaratan diantaranya telah tersedianya sarana dan prasarana kesehatan seperti tersedianya wastafel (tempat cuci tangan) di depan masing-masing kelas, *handsanitizer*.

“Diharapkan IAKN Manado selalu menghasilkan produk-produk akademis yang mampu menjawab tantangan dan perubahan masyarakat sebagai akibat dampak modernisasi, globalisasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,” tuturnya. Lulusannya juga diharapkan mampu meningkatkan peran dan kontribusi sebagai stabilisator perkembangan zaman, terutama mengatasi dampak kemajuan zaman dalam skala regional maupun nasional.

“Kami Komisi VIII DPR RI senantiasa memberikan dukungan bagi pertumbuhan dan perkembangan seluruh perguruan tinggi keagamaan negeri, baik melalui dukungan anggaran dan dukungan lainnya. Kami Berharap rektor dan seluruh sivitas akademika terus memiliki komitmen tinggi untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dan melakukan tata kelola yang baik serta akuntabel,” seru politisi PKB itu

APRESIASI TATA KELOLA DESA WEDOMARTANI

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menilai tata kelola Desa



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Foto: Husen/mvl

Wedomartani di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) bisa menjadi desa percontohan untuk desa-desa lain. Pasalnya, desa tersebut membuat tata kelola yang mengedepankan perlindungan anak dan perempuan, dan menjadi desa mandiri, seperti membuat kerajinan, pengelolaan

makanan, hingga adanya tim satgas bencana. Baik pemuda Karang Taruna maupun kaum perempuannya mempunyai produk lokal yang bisa dipasarkan.

“Kepekaan sosial diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan desa, dan mereka mempunyai masing-masing kegiatan sosial ke masyarakatnya. Dan dengan adanya kegiatan ini, tingkat kekerasan yang ada di desa ini pun menurun dari tahun ke tahun setelah adanya kesadaran pemerintahan desa untuk lebih memprioritaskan perlindungan anak dan perempuan,” jelas Diah usai meninjau pameran produk oleh masyarakat Desa Wedomartani, di Sleman, D.I.Y.

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan bahwa anggaran kegiatan tersebut bersumber dari anggaran desa dan juga di-support anggaran dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk kegiatan perempuan dan anak. Kegiatan inipun sudah berjalan kurang lebih selama lima tahun, yang menghasilkan tren kekerasan kepada perempuan dan anak yang terus menurun. ● mh,ayu,azk/



Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan kepada pengelola desa Wedomartani, Sleman D.I.Y. Foto: Azka/mvl

Komisi IX Soroti Masalah Ketenagakerjaan Hingga Vaksinasi

Beberapa persoalan seperti ketenagakerjaan, distribusi vaksin menjadi sorotan tim kunker Komisi IX DPR RI di Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan Papua Barat saat reses masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.

KETUA Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan, Komisi IX mendukung Pemerintah Provinsi Sulteng dalam program pembangunan kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan agar akselerasi sumber daya manusia meningkat.

“Pak Gubernur, kami sudah mengunjungi Balai Latihan Kerja, kalau dilihat dari bangunannya akan diserahkan ke pemerintah pusat, mohon segera pengurusannya dipercepat. Sayang sekali, ada 1,5 juta angkatan kerja laporan dari Dinas Tenaga kerja kalau tidak diperhatikan. Supaya betul-betul yang dilakukan pemerintah tidak sia-sia, jangan hanya sekedar program,” terang Felly.

Lebih lanjut politisi Partai Nasdem ini mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah besar yang diemban Pemprov Sulteng untuk menciptakan generasi SDM yang unggul. “Kehadiran kita untuk menyerap aspirasi khususnya di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, peredaran obat-obatan dan capaian vaksinasi Covid-19 serta pembangunan keluarga berencana yang sukses. Kita ingin melihat Sulteng seindah warna aslinya,” tukas legislator dapil Sulawesi Utara ini.

Terkait masalah ketenagakerjaan, Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi



Tim Kunker Komisi IX DPR RI di Sulawesi Tengah. Foto: Oji/rvi

menekankan pada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulteng agar jangan hanya menggantungkan pembiayaan program-program utamanya pelatihan kerja bersumber pada APBD atau APBN. Ada 16 paket program pelatihan yang bersumber dari APBD dan 16 paket program pelatihan dari APBN itu masih kecil sekali dibandingkan jumlah angkatan kerja di Sulteng yang membutuhkan pelatihan kerja.

“Tolonglah dekati perusahaan-perusahaan tambang itu, lakukan sinergi kerja sama dengan membentuk program-program pelatihan kerja. Saya

yakin banyak potensi sumber daya manusia berkualitas apabila benar-benar dicetak dengan skema yang baik di Sulteng,” ujar Nurhadi

TINGKAT KESEMBUHAN PASIEN COVID-19 DI SORONG CUKUP TINGGI

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena berharap agar tingkat kesembuhan pasien Covid-19 dapat terjaga dengan baik dan ke depan melalui penanganan Covid-19 di Kota Sorong ini bisa menjadi contoh bagi penanganan yang sama di kota-kota yang lain di seluruh Papua Barat. Ia menambahkan, langkah Wali Kota

Sorong dalam menangani Covid-19 dari aspek ketenagakerjaan merupakan langkah yang baik. Dimana, para karyawan tidak di-PHK, namun dikurangi upahnya agar tetap perputaran ekonomi tetap berjalan.

“Dari Sorong kita belajar banyak, bagaimana mereka menangani Covid-19 dari aspek kesehatan, menangani juga aspek ketenagakerjaan. Dimana, para karyawan tidak di-PHK tapi dikurangi upahnya sehingga semua tetap bisa bekerja. Mereka bisa menjaga IPM (Indeks Pertumbuhan Manusia) di sini tetap tinggi. Ini satu hal yang menarik,”



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi IX di Sorong, Papua Barat. Foto: Aisyah/nvl

tutur Politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendorong didirikannya Rumah Sakit (RS) Pratama untuk menyokong pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Menurutnya, selain infrastruktur, destinasi wisata harus didukung dengan pelayanan kesehatan yang memadai agar para wisatawan lebih merasa aman mengunjungi Raja Ampat.

“Ketika mereka (wisatawan) *diving* dan mereka bermain air, lalu ada kecelakaan kecil, kalau rumah sakitnya tidak representatif tentu akan sulit. Jadi sebenarnya untuk mendukung pariwisata kita harus menopang dari banyak pihak. Mulai (dari) infrastruktur, lalu rumah sakitnya, sumber daya manusianya dan sebagainya,” terangnya.

PUSKESMAS DI KALTIM MINIM FASILITAS

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI memantau langsung dampak yang disebabkan pandemi Covid-19 terhadap isu-isu ketenagakerjaan dan kesehatan yang dirasakan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya

banyak masyarakat menjadi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena perusahaan yang mengurangi biaya operasional perusahaan akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengakui Covid-19 sangat berdampak bagi masyarakat, sehingga ia berharap jangan ada masyarakat yang dirumahkan. “Atas dasar itulah, Tim Kunker Komisi IX memandang

penting hal ini dan mengawasi secara serius, mendalam dan berkelanjutan setiap program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat terkait persoalan ketenagakerjaan dan kesehatan,” kata Ansory dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti keberadaan 50 puskesmas di Kaltim, hanya 13 puskesmas yang memenuhi syarat. Padahal layanan kesehatan primer itu yang mampu *cover* kesehatan bagi masyarakat di daerah perbatasan, pedalaman dan pedesaan. Ini menjadi persoalan sektor kesehatan yang mendasar. Sejalan dengan transformasi kesehatan nasional yang digagas Kementerian Kesehatan, maka membenahi puskesmas harus menjadi konsentrasi di hulu.

“Puskesmas harus diperkuat dan diperbaiki mulai dari sumber daya manusianya dan pelayanan kesehatannya, karena pelayanan kesehatan yang paling awal dan paling dekat dengan masyarakat adalah puskesmas. Ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kaltim, jika ingin pelayanan kesehatannya bagus,” tukasnya. ●
oji,man,ais/es



Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI saat menyerahkan bantuan untuk Provinsi Kaltim. Foto: Andri/nvl

Dukungan Pemerintah Pusat ke Daerah Belum Maksimal

Semua daerah di penjuru Indonesia harus mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah. Komisi X DPR RI dalam agenda kunjungan kerjanya mendorong agar Program-program kerja pemerintah harus menjangkau hingga daerah 3T.

TIM Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menggelar pertemuan dengan Gubernur Sulteng dan mitra kerja Komisi X DPR RI lainnya di Kota Palu, Sulteng. Dalam kesempatan tersebut, Fikri menyatakan, semua daerah di Indonesia harus mendapat perhatian yang sama dari pemerintah pusat.

Fikri mengatakan, destinasi wisata Palu sangat luar biasa. Palu memiliki natural landscape yang sangat bagus. “Tentu bisa dipromosikan menjadi destinasi wisata yang tidak kalah menarik dengan tempat lain. Tetapi

apakah sudah mendapatkan perhatian khusus, baik dari sektor pendanaan ataupun dukungan Kemenparekraf,” ujarnya.

Ia menekankan agar mitra kerja Komisi X DPR mempunyai program yang responsif terhadap bencana. “Sebab kalau tidak, sekolah akan hancur dan tidak ada rehabilitasinya. Skema kerjasama antara pemerintah pusat, pemprov, pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan infrastruktur pendidikan masih tidak jelas,” tukasnya.

PJJ DI KALBAR SULIT DITERAPKAN

Sementara itu, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Hetifah Sjaifudian mengagendakan kunjungannya ke Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pertemuan dengan Walikota Pontianak beserta jajarannya, terungkap bahwa metode pembelajaran jarak jauh masih sulit diterapkan di Kalbar. Hal tersebut dikarenakan banyak wilayah yang belum tersentuh jaringan sinyal komunikasi (blank spot).

Padahal Pemerintah sedang gencar-gencarnya mendorong sekolah-sekolah untuk meningkatkan metode pembelajaran belajar dari rumah (BDR) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan sistem digital di masa pandemi Covid-19, dengan tujuan agar siswa tidak kehilangan kesempatan belajar di masa pandemi. Oleh sebab itu, dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi serta komunikasi, sudah seharusnya terhubung dengan jaringan internet yang baik. Pasalnya di era digital menuntut untuk serba *go-digital* termasuk dalam aspek Pendidikan.

“Banyak daerah di Kalimantan Barat dan juga di daerah serupa, yang mempunyai persolan yang sama, yakni tidak memadainya akses internet ataupun dari perangkatnya sendiri, contohnya alat komunikasi yang tidak *men-support*. Sehingga pembelajaran secara daring tidak maksimal dilakukan. Untuk itu, masalah ini selayaknya dipecahkan secara bersama dengan kementerian terkait,” jelas Hetifah, di Pontianak, Kalbar, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu mengatakan, Komisi X DPR RI tentunya akan mengkomunikasikan permasalahan tersebut kepada pihak terkait, salah satunya Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), untuk memastikan setiap daerah yang memiliki *blank spot*, bisa diberikan jalan



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat bertukar cenderamata usai pertemuan dengan Gubernur Sulteng. Foto: Dep/mt



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian (tengah) saat memimpin pertemuan dengan Wali Kota Kota Pontianak. Foto: Runi/mv

keluar terhadap persoalan tersebut. Diharapkan dengan adanya dukungan dari Kominfo, persoalan *blank spot* di Kalbar bisa teratasi.

“(Harapannya) akses jaringan internet bisa lebih baik digunakan, dengan sinyal yang bagus, diharapkan siswa-siswi yang melakukan pembelajaran secara *online* bisa lebih memahami apa yang dijelaskan oleh pengajar serta memudahkan dalam pencarian materi sekolah. Hal tersebut dilakukan guna mengejar ketertinggalan akibat pandemi covid-19. Dimana, saat ini pembelajaran mengalami situasi *learning lose*,” tandasnya.

DORONG PENINGKATAN JUMLAH PENERIMA PIP DI SERDANG BEDAGAI

Di provinsi berbeda, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti yang memimpin tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara menyatakan akan mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi (Kemendikbudristek) melalui Disdikbud Serdang Bedagai untuk meningkatkan bantuan jumlah penerima

Program Indonesia Pintar (PIP) usia SD hingga SMA, serta Kartu Indonesia Pintar (PIP) bagi mahasiswa terutama dari keluarga kurang mampu.

Hal ini disampaikan Agustina usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi X DPR RI dengan Bupati Serdang

Bedagai Darma Wijaya beserta jajaran dan stakeholder terkait lainnya Serdang Bedagai, Sumatera Utara, belum lama ini. Dampak pandemi Covid-19 telah membuat banyak orang tua yang mengalami ketidakmampuan untuk membeli kebutuhan sekolah dan kuliah anak.

“Komisi X DPR menilai jumlah penerima PIP bagi 21.000 siswa yang ada di Serdang Bedagai dirasakan masih kurang. Terlebih, dampak pandemi ini adalah mengakibatkan banyak orang tua yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan sekolah seperti seragam sekolah. Maka, Komisi X DPR mendorong pemerintah untuk meningkatkan PIP dari tingkat SD sampai SMA serta KIP Kuliah untuk jenjang perguruan tinggi,” ujar Agustina.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kesiapan anak-anak didik dalam memulai kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Pemerintah harus secara bertahap memulai PTM dari skala terkecil dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Agar tercipta *learning by doing* yang menyangkut masa depan anak didik. ● dep,rni,rni/es



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti saat bertukar cenderamata usai pertemuan kunjungan kerja. Foto: Puntho/mv

Komisi XI Pastikan Pertumbuhan Ekonomi Daerah



Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto dan Tim Kunker foto bersama usai memimpin pertemuan dengan mitra kerja. Foto: Suci/inv

Pada Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 - 2022, Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan ke tiga provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Selatan. Kunjungan tersebut dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, terutama terkait program-program nasional di daerah terutamanya dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

BALI sebagai salah satu provinsi yang menjadi jendela dunia, di mana dunia melihat Indonesia dari Bali. Dan diketahui, sektor pariwisata mendominasi penerimaan daerah di Bali, maka pemulihan ekonomi Bali menjadi perhatian Komisi XI DPR RI, agar perekonomian bangkit kembali. Oleh karena itu, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengharapkan mitra kerja Komisi XI DPR RI dapat mendukung

pemulihan ekonomi di Pulau Dewata.

Hal tersebut disampaikan Dito saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Ketua BPK, Deputi Gubernur BI, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Perpajakan, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Dewan Komisioner LPS, Sekretaris Utama BPS, Direktur Bank Mandiri, Direktur BRI, Direktur BTN, Direktur BNI, Dirut PT. Jamkrindo, Direktur PT. Askrindo, Kepala Kanwil BPKP Provinsi Bali, Kepala

Biro Perekonomian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

"Kami mengharapkan dukungan mitra-mitra kerja Komisi XI DPR RI khususnya yang berada di Bali mendukung pemulihan ekonomi Provinsi Bali yang akan berdampak kepada keuangan negara di Provinsi Bali," kata Dito.

Dalam kesempatan tersebut, Dito menyampaikan tema Kunker Komisi XI DPR RI ke Bali kali ini adalah "Perekonomian Daerah Provinsi Bali dan Keuangan Negara di Provinsi Bali serta Kinerja Industri Jasa Keuangan di Provinsi Bali". Terkait hal tersebut, menurut politisi Partai Golkar ini, tujuan Kunker Komisi XI DPR RI ke Bali adalah untuk mengetahui dukungan mitra kerja Komisi XI DPR terhadap pemulihan ekonomi Bali.

"Kami ingin mengetahui bagaimana dukungan mitra kerja Komisi XI DPR di Provinsi Bali, antara lain BPK melalui kegiatan pemeriksaan keuangan,



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara saat memimpin pertemuan Tim Kunker di Makassar. Foto: Ed/mt

Kementerian Keuangan melalui kegiatan peningkatan penerimaan negara maupun peningkatan efektivitas pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, BI melalui pelaksanaan program-program Strategis, OJK melalui pelaksanaan pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan serta perlindungan konsumen industri jasa keuangan di Provinsi Bali, LPS melalui pelaksanaan penjaminan terhadap simpanan nasabah di Perbankan Bali dan seterusnya,” papar Dito.

STABILITAS KEUANGAN DI SULSEL MASIH TERJAGA

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menilai kondisi stabilitas keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan II Tahun 2021 masih terjaga. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat stabil didukung oleh peningkatan giro dan deposito.

“Dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) resiko kredit konsisten masih terjaga dengan rasio Non Performing Loan (NPL) di bawah batas 5 persen,” ucap Amir saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses ke Makassar, Sulawesi Selatan.

Amir menambahkan, pertumbuhan ekonomi Sulsel pada 2021 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, dengan adanya peningkatan mobilitas masyarakat pasca implementasi kebijakan pembatasan aktivitas.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap dalam pertemuan hari ini dapat disampaikan kondisi capaian dan perkembangan perekonomian daerah di Sulsel tahun 2020 dan proyeksi di tahun 2021.

PERTUMBUHAN EKONOMI HARUS MERATA

Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai upaya pemberdayaan UMKM dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada masa pandemi sudah berjalan dengan baik. Namun ada hal-hal yang bisa dikritisi dan bahkan masih bisa didorong untuk bisa meningkat lagi.

“Tidak ada alasan menurun lagi pertumbuhan ekonomi di masa-masa mendatang, karena kondisi pemulihan ekonomi di masa Covid-19 sudah semakin baik, dengan semakin masifnya

program vaksinasi,” ungkap Agun saat memimpin kunjungan Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Rabu (27/10/2021).

Lebih lanjut, Agun menyampaikan, data angka-angka, data pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang disajikan salam pertemuan dengan para mitra kerja di Sumatera Utara sesungguhnya belum menampakkan keadilan, logikan pemerataan.

“Yang kami maksudkan bukan tidak percaya data, tapi mungkin benar adanya. Misalnya data tentang KUR, data tentang UMKM. Sebetulnya data-data itu masih jauh secara kuantitatif jika dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan, itu maksud kami,” ungkapnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menuturkan, pertumbuhan tidak perlu relatif tinggi, yang terbaik adalah pertumbuhan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. “Mungkin pertumbuhan cukup, 4 atau 5 persen tapi merata seluruh Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang ada harus semakin dipacu untuk kepentingan rakyat di daerah,” ujarnya.

Sebagaimana data BPS Sumatera Utara menunjukkan bahwa Ekonomi Sumatera Utara triwulan II-2021 tumbuh sebesar 4,95 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan sebesar 7,87 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 18,89 persen. ● skr,sc,opi/es



Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa saat pertemuan dengan mitra kerja di Sumatera Utara. Foto: Singgih/vnt

Tarif PCR Harus Diupayakan Serendah Mungkin

Sejak munculnya kasus pertama pasien positif Covid-19 di Indonesia pada awal Maret 2020, Pemerintah secara resmi baru menetapkan batasan tertinggi tarif pemeriksaan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) di Indonesia dengan mengeluarkan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan pada 5 Oktober 2020.

Harga batasan tertinggi tarif pemeriksaan RT-PCR yang diatur Pemerintah pada saat itu berada di angka Rp900 ribu.

Sedangkan sebelum beredarnya SE Dirjen Yankes tersebut, harga tarif pemeriksaan RT-PCR di Indonesia bisa mencapai jutaan rupiah dalam sekali tes.

Baru-baru ini, Pemerintah kembali mengatur harga tertinggi pemeriksaan RT-PCR di Indonesia, yakni berada di angka Rp275 ribu untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali, dan Rp300 ribu untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali.

Turunnya harga tersebut, diungkapkan Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi adalah untuk menyesuaikan harga pasar dan suplai. Sebab, sampai saat ini, diungkapkannya ada 200 merk reagen dengan variasi harga yang berbeda.

“Jadi semakin banyaknya pilihan reagen, harga reagen semakin menurun. Kemudian supplainya juga banyak. Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyesuaian batas tertinggi pemeriksaan PCR,” pungkasnya.

Melihat kebijakan tersebut, Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

farmasi seperti PT Kimia Farma, PT Biofarma, PT Indofarma dan PT Pharos menekankan agar BUMN tersebut dapat mengupayakan harga baik tes PCR maupun Antigen serendah mungkin.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, terjangkaunya harga tes PCR dan Antigen sebagai bentuk *testing* dan *tracing* dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 diharapkan dapat membantu geliat ekonomi masyarakat. Sebab, hasil tes tersebut kini semakin diperlukan di berbagai sektor kegiatan masyarakat, termasuk mobilitas masyarakat yang berpengaruh pada perekonomian.

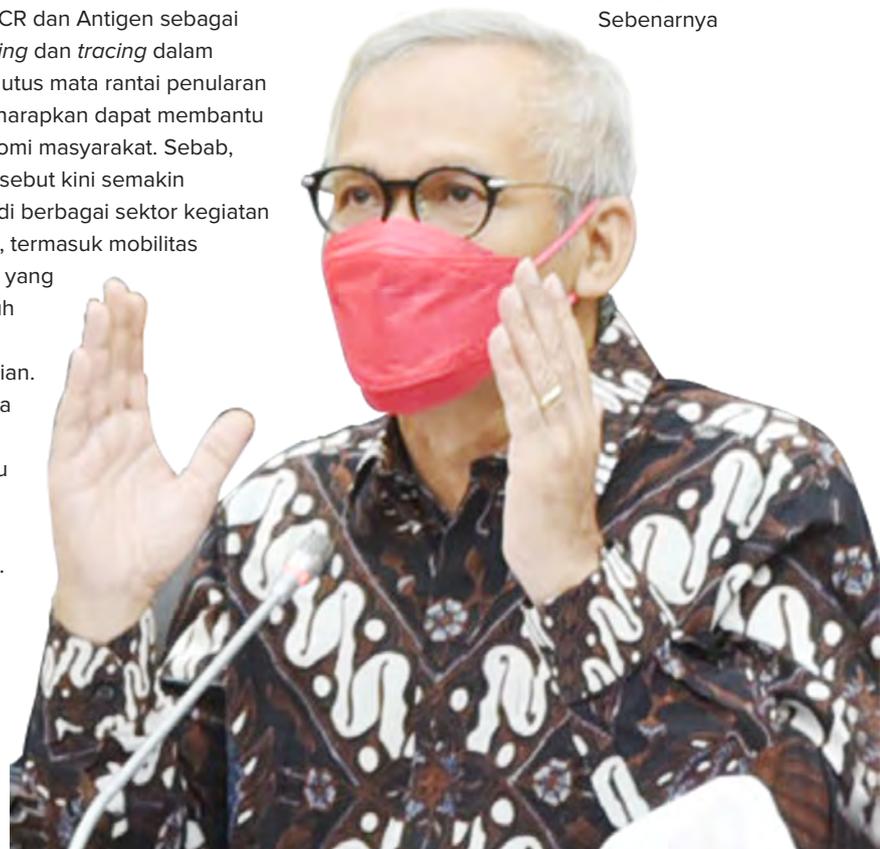
“Sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan harga PCR

dan Antigen yang terjangkau dapat menggerakkan aktivitas ekonomi di bidang transportasi, akomodasi dan pariwisata,” ungkap politisi fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Selain itu, tes PCR maupun Antigen juga dinilai sangat terkait dengan pengentasan dampak pandemi, utamanya untuk melindungi daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, BUMN sebagai badan usaha milik negara diharapkan dapat berperan dalam mempengaruhi harga yang terjangkau untuk tes PCR maupun Antigen.

“Karena dengan diharapkan harga PCR yang lebih terjangkau, itu akan berdampak pada geliat ekonomi, *recovery* ekonomi yang ada.

Sebenarnya



Wakil Ketua
Komisi VI DPR
RI Aria Bima.
Foto: gjiwv

bagaimana peran dari BUMN untuk bisa mempengaruhi, menjadi *press maker* untuk harga yg bisa lebih bisa terjangkau," imbuhnya.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade juga menekankan kepada perusahaan pelat merah yang berkecimpung di bidang kesehatan agar tetap terus berpihak kepada rakyat, di samping memang harus tetap memberikan keuntungan kepada negara. "BUMN itu memang diperintahkan oleh Kementerian BUMN sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 memberikan keuntungan, tapi juga ada tugas membantu negara," ujarnya.

Menurut Andre, harga tes PCR di Indonesia sebenarnya bisa berada di bawah harga Rp200 ribu. Bahkan, ia menambahkan, harga Rp200 ribu tersebut, harusnya bisa diterapkan sejak awal 2021, di saat harga tes PCR masih berada di sekitar harga Rp900 ribu-an.

Murahnya harga tes PCR bisa disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya saja, komponen harga kit yang terkandung dalam tes PCR diantaranya *Viral Transport Medium* (VIT) dengan *range* harga sekitar Rp10 ribu, ekstraksi kit dengan harga sekitar Rp25 ribu, hingga harga *reagen* yang berkisar Rp65 ribu.

"Sebenarnya di bawah Rp200 ribu masih untung. Struktur biayanya jelas, kit itu hanya Rp100 ribu, mulai dari VTM, ekstraksi kit dan PCR kit, itu hanya di bawah Rp100 ribu. Ditambah nanti APD, biaya nakes, biaya operasional lainnya, ditambah keuntungan, saya rasa masih bisa 170 sampai 180 ribu, masih untung itu," kilahnya.

Lebih lanjut, Andre menyoroti adanya permainan laboratorium yang mematok harga tes PCR berdasarkan kecepatan keluarnya hasil tes. Sesuatu hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh sebuah laboratorium. "Permainan laboratorium sebenarnya nggak perlu pakai angka harga 1 jam, 3 jam, 6 jam. Karena mereka memutar mesin yang sama, sebenarnya lucu juga dibikin postur-postur biaya seperti itu," tegasnya. • bia/es



Perdamaian, Fondasi Penting Pembangunan

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI pada Pertemuan Kemitraan Parlemen Asia-Eropa (ASEP) ke-11 mengajak parlemen dunia yang hadir saat itu untuk memiliki semangat yang sama dalam menyelesaikan pandemi Covid-19.



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sihar Sitorus. Foto: Runi/mvi

Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat luas kepada banyak negara hingga beberapa tahun ke depan. Namun di saat bersamaan, Pemerintah Indonesia harus menyelesaikan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diharapkan tercapai pada 2030.

Tentunya selain itu, Pemerintah dalam situasi wabah Covid-19 harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk menekan angka penyebaran dari virus tersebut. Belum lagi, harus memikirkan anggaran untuk implementasi SDGs.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sihar Sitorus mengatakan hal tersebut usai mengikuti Pertemuan Kemitraan Parlemen Asia-Eropa (ASEP) ke-11 dengan tema “Memperkuat Kemitraan Parlemen untuk Perdamaian dan Pembangunan Berkelanjutan di Era Covid-19” secara virtual dari Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Dengan demikian, Parlemen Indonesia harus benar-benar bekerja sama dengan baik dengan negara-negara lain dalam penanganan virus Covid-19. Pemberian vaksinasi harus mendapatkan porsi atau pendistribusian yang sama agar semua negara-negara yang terdampak bisa keluar dari Covid-19 secara berbarengan. dan disaat yang sama Indonesia tidak

terlalu tertinggal jauh dari negara lain dalam hal vaksinasi.

Pada saat ini, Pemerintah Indonesia sedang dihadapkan dengan dua insiden berjangka panjang. Pertama, Covid-19 yang efeknya akan dirasakan dalam jangka berapa tahun ke depan. Kedua, secara bersamaan Indonesia juga harus menyelesaikan SDGs yang ditargetkan pada tahun 2030. Untuk itu, salah satu poin yang disampaikan DPR RI kepada delegasi-delegasi bahwa perdamaian sangatlah penting mengingat dengan adanya perdamaian akan membawa stabilitas. Hal ini akan menjadi kunci karena dapat memberikan waktu bagi kita guna menyelesaikan persoalan dari pada Covid-19 dan juga SDGs.

Perdamaian adalah fondasi penting dari pembangunan. Perdamaian menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang atau meningkat. Dengan adanya perdamaian, struktur pendidikan dan kesehatan bisa berkembang. Sistem dalam menyediakan infrastruktur bisa terakomodir, memiliki waktu untuk berintegrasi, kegiatan perekonomian tumbuh dan perubahan iklim terkendali. Selain itu, perdamaian juga memungkinkan untuk membangun kemajuan sistem kesehatan dalam pencegahan Covid-19. Perdamaian membawa stabilitas yang merupakan kunci dalam mengatasi tantangan pencapaian SDGs dan pandemi di masa depan.

Di sisi lain, batas waktu SDGs 2030 sudah mulai dekat, dengan demikian pemerintah harus bergulat dengan peningkatan pelayanan kesehatan, kontraksi ekonomi, peningkatan kemiskinan, pengalihan pendidikan, dan pengendalian perubahan iklim akibat pandemi Covid-19. "Kami mendesak Anggota Parlemen untuk memperkuat kerja sama dalam mengatasi tantangan global yang semakin kompleks di luar dari pemulihan ekonomi. Dan juga harus meningkatkan tugas yang diamanatkan kepada kita yakni dukungan terhadap regulasi, alokasi anggaran, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan program pemerintah terkait SDGs," pesan Sihar.

PERDAMAIAN DAN KEAMANAN GLOBAL

Dua tahun terakhir, negara-negara di seluruh dunia menghadapi pandemi Covid-19 yang sangat berdampak luas. Belum lagi beberapa negara yang dilanda peperangan dengan krisis politik yang belum terselesaikan seperti di Palestina, Yaman, Suriah, Myanmar, Afghanistan, dan Lebanon. Guna mendukung berbagai upaya perdamaian dan melihat kondisi dan situasi di negara-negara tersebut, sudah seharusnya dapat menitikberatkan koordinasi negara-negara anggota Kemitraan Parlemen Asia-Eropa melalui Parlemen.

SEJAK HARI PERTAMA KEMERDEKAAN, REPUBLIK INDONESIA TELAH BERKOMITMEN PENUH UNTUK BERKONTRIBUSI DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN GLOBAL.

Anggota BKSAP DPR RI Putri Anetta Komarudin.
Foto: Huseinvi



"Sejak hari pertama kemerdekaan, Republik Indonesia telah berkomitmen penuh untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Peran aktif kami dalam menjaga perdamaian PBB adalah salah satu buktinya. Kami juga terus mendukung inisiatif PBB yang bertujuan untuk memperkuat pemeliharaan perdamaian agar sesuai dengan tujuan menyelesaikan tantangan perdamaian dan keamanan. Oleh karena itu, kami siap memberikan dukungan pelaksanaan aksi untuk pemeliharaan perdamaian yang efektif," ujar Anggota BKSAP Putri Anetta Komarudin.

Dalam hal ini, Parlemen berkomitmen untuk menjadi mitra sejati bagi perdamaian dunia dengan berfokus pada bidang pemeliharaan perdamaian, pencegahan konflik, pembangunan

berkelanjutan, dan kontra terorisme. Di bidang pemeliharaan perdamaian, BKSAP DPR RI mendorong perdamaian dan keamanan global untuk memajukan peran perempuan dalam kegiatan pembangunan perdamaian.

Pada pencegahan konflik, BKSAP DPR RI menyoroti perlunya Dewan Keamanan (DK) untuk membangun sinergi dan terlibat dengan organisasi lain guna membangun mekanisme pencegahan konflik. Sementara dalam penanggulangan terorisme, Indonesia menerapkan pendekatan komprehensif yang menyeimbangkan pendekatan keras dan pendekatan lunak yang mencakup upaya untuk mengatasi akar penyebab terorisme, dan program deradikalisasi, kontra-radikalisasi dan reintegrasi.

Di sisi lain, Putri mengusulkan legislasi nasional di negara-negara anggota ASEP bisa sesuai norma-norma yang berlaku. Hal tersebut diusulkan guna menjaga perdamaian dunia. Dimana, agar pembangunan berkelanjutan bisa diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan di negara-negara anggota ASEP. Contohnya dengan percepatan vaksin, percepatan pembangunan, kesetaraan gender bisa terakomodir dengan seksama. Dengan demikian, mampu menjadi salah satu langkah baik guna mendorong perdamaian dunia. Ketika seseorang mendapatkan kesetaraan, tendensinya akan lebih merasakan kedamaian dalam suasananya.

Dengan terselenggaranya forum seperti ASEP diharapkan bukan hanya menjadi forum komunikasi biasa, namun juga bisa benar-benar mendorong usaha perdamaian di negara-negara konflik. "Ketika kita bisa lebih berhubungan secara baik lewat diplomasi yakni melalui pemerintah dan parlemen tentu usaha-usaha yang kita lakukan bisa lebih terlihat dan membuahkan hasil. Dikarenakan forum seperti ini tidak hanya dilakukan satu atau dua kali, memang harus terus menerus agar manfaat bisa terasa terutama di negara konflik," pungkas Putri. ● pun/es



DAERAH
PEMILIHAN
(DAPIL)



Sukur H. Nababan: Tinjau Proses Vaksinasi



Anggota DPR RI Sukur H Nababan. Foto: ist/nvl

“Saya perintahkan agar semua warga sekitar yang ingin divaksin dilayani, jangan ditolak. Semua warga yang datang *on the spot* harus dilayani, administrasi belakangan. Jangan hanya karena administrasi, warga kita tidak dilayani untuk vaksinasi”

Anggota DPR RI Sukur H. Nababan menggelar vaksinasi di dapilnya Jawa Barat VI (Kota Depok dan Bekasi) kegiatan ini bertujuan agar warga negara Indonesia bebas dari pandemi Covid-19. Sukur mengatakan, diperlukan sikap gotong royong dari berbagai elemen agar bangsa Indonesia segera keluar dari pandemi.

“Kami PDI-Perjuangan bersama HKBP dan berbagai elemen bangsa,

bergotong royong untuk penanganan Covid-19 ini. Vaksinnya kita dapatkan dari Kementerian Kesehatan, sementara biaya pelaksanaan vaksinasi kami gotong royong,” ujar Sukur saat menjau vaksinasi di Depok, baru-baru ini.

Anggota Komisi V DPR RI ini mengajak masyarakat untuk bisa hidup berdampingan dengan Covid-19. “Penting bagi kita menjaga stamina dan imunitas agar tidak terpapar Covid-19. Selain itu perketat protokol kesehatan saat beraktivitas,” imbaunya.

Sesuai anjuran WHO, lanjut dia, semua warga harus diberi vaksin agar tidak dapat meminimalisir dampak Ketika terinfeksi. Untuk itulah maka ia mendorong pemerintah kota (Pemkab) untuk mendukung program vaksinasi massal ini.

“Target kita sebenarnya hanya 700 orang. Namun antusiasme masyarakat tinggi sehingga saya meminta Kementerian Kesehatan menambah pasokan vaksin,” jelas Sukur.

Ketua DPP PDIP ini menegaskan bahwa vaksinasi ini tidak hanya untuk jemaat HKBP tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum di Kota Depok. Ia meminta, jajaran PDI-Perjuangan di Kota Depok untuk membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19.

“Sebagai warga masyarakat, kita harus membantu sesuai kapasitas kita. Saya perintahkan PDIP Kota Depok untuk tidak hanya mengeritik tetapi berbuat nyata membantu penanganan Covid-19,” pintanya.

Terkait munculnya varian Covid-19 yang semakin berbahaya dan menimbulkan korban di kalangan anak-anak muda, Sukur berencana menggelar vaksinasi bagi pelajar SMP, SMA dan mahasiswa.

“Saya sudah diskusi untuk mengadakan vaksinasi bagi remaja dalam dua tiga minggu ke depan. Bagaimana pun mereka adalah masa depan bangsa. Jangan sampai ada masalah dengan anak-anak muda masa depan bangsa ini,” pungkasnya.

Dalam memantau kegiatan vaksinasi ini, Sukur didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Depok sekaligus Ketua DPC PDIP Kota Depok Hedrik Tangke Allo bersama jajaran pengurus PDIP Kota Depok. ● tñ/es

Wenny Haryanto: Sapa dan Bantu Masyarakat di Kota Bekasi dan Depok

Sejatinya menyapa konsituen atau masyarakat yang diwakili, tidak terbatas pada masa reses saja. Dengan mendekati diri kepada masyarakat, para Anggota Dewan bisa mendengar keluh kesah dari masyarakat yang kelak akan diperjuangkan di Senayan.

Tak pernah lelah, Anggota DPR RI Wenny Haryanto terus menyapa masyarakat untuk menyerap aspirasi maupun menyalurkan berbagai bantuan program bagi masyarakat di dapilnya. Berikut sekelumit dari sederet kunjungan kerjanya di dapilnya.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, Wenny memang sangat *concern*

dengan penanganan Pandemi Covid-19, salah satunya melalui vaksinasi. Di masa resesnya kali ini Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini ikut membantu pemerintah untuk merealisasikan target vaksinasi 75 persen hingga akhir tahun ini. Di antaranya dengan sosialisasi dan vaksin massal.

Seperti tanggal 2 Oktober 2021 lalu, ia ikut menggelar vaksinasi massal 1000 orang tahap II di SMK Al Muhajirin,

Kota Depok. Ia berharap seluruh para siswa mendapatkan vaksin, sehingga bisa terbebas dari virus corona yang disinyalir masih akan ada di dunia hingga beberapa tahun ke depan.

“Saya yakin program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa mencapai target 70 persen di akhir 2021. Hal itu dikarenakan upaya-upaya maksimal terus dilakukan pemerintah untuk menyiapkan vaksin dan terdistribusi ke daerah-daerah. Dengan adanya percepatan program vaksinasi tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya kenaikan atau lonjakan kasus Covid-19 serta menciptakan kekebalan komunal,” papar Wenny.

Selain program vaksinasi massal, Wenny juga ikut menyosialisasikan

pengecahan stunting atau kondisi gagal pertumbuhan tubuh dan otak pada anak akibat kekurangan gizi, yang hingga kini tetap masih menjadi perhatian pemerintah.

Dalam sosialisasi ini Wenny bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Ia mendatangi beberapa daerah di dapilnya, diantaranya pada Sabtu (30/10) di Aula Kelurahan Kranji, Jalan Parkit Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Serta pada Rabu (18/11) di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, serta berbagai lokasi di Kota Depok. ● ayu/es



Anggota DPR RI Wenny Haryanto saat meninjau vaksinasi di dapilnya. Foto: Ist/mtl

Andre Rosiade: Bagikan Paket Sembako di Tanah Datar

Serap aspirasi dapat dilakukan oleh Anggota DPR RI kapanpun dan dimanapun masyarakat menginginkan. Saat reses kali ini, Anggota DPR RI Andre Rosiade menyempatkan diri untuk pulang kampung, selain menyerap aspirasi kesempatan itu juga dipergunakan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di daerah pemilihannya yaitu Sumatera Barat I.

Kehadiran Andre disambut suka cita oleh masyarakat di warga Dusun Lurah Ampuang, Tanah Datar. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Andre untuk mendengarkan aspirasi serta memberikan bantuan sembako lengkap bagi masyarakat yang sedang menghadapi pandemi Covid-19.

“Kami terus membagikan sembako untuk meringankan beban masyarakat

tanah datar yang terdampak pandemi,” tutur Andre seraya menyatakan pembagian sembako adalah kegiatan rutin yang dilakukan sejak dilantik menjadi anggota dewan akhir 2019 lalu.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga menyempatkan diri untuk mengunjungi masyarakat yang berada di wilayah yang tidak dapat ditempuh menggunakan mobil. Sebagai seorang yang dipercaya mewakili rakyat, seluruh indera yang ada di tubuh

manusia haruslah benar-benar peka melihat kondisi yang ada.

Untuk itu, ia akan terus memperjuangkan setiap aspirasi serta kegiatan pembagian sembako lengkap kepada masyarakat di daerah pemilihannya. “Ini adalah bukti dari kami kepada konstituen bahwa kami berpihak kepada rakyat dan bekerja untuk rakyat, semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang menerima,” ungkapnya

Turut mendampingi Andre dalam kunjungan tersebut, Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Dt Bungsu, Wakil Bupati Tanahdatar Richi Aprian serta pengurus DPD Gerindra Sumbar dan DPC Gerindra Tanahdatar.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi mengucapkan terimakasih kepada Andre Rosiade yang membagikan langsung sembako untuk warga Tanah Datar. Artinya, sudah banyak bantuan dan peran serta Andre dalam membantu warga saat terkena dampak pandemi.

“Kami lihat Pak Andre Rosiade sudah banyak turun ke masyarakat. Bahkan memberikan bantuan sembako, APD, masker, PKBL, bantuan masjid dan lainnya. Itu masih terus berlangsung sampai sekarang,” tukasnya. ● rnm/es



Anggota DPR RI Andre Rosiade menyalurkan paket sembako kepada konstituennya. Foto: lsl/ml

Rachmat Gobel: Serahkan Bantuan Bagi Korban Banjir Gorontalo



Anggota DPR RI Rachmat Gobel saat memberikan bantuan kepada korban banjir di Gorontalo. Foto: Ist/ivi

Desa Datahu merupakan salah satu desa yang mengalami dampak terparah akibat banjir bandang yang menerjang Kabupaten Gorontalo beberapa hari yang lalu. Tercatat sebanyak 778 unit rumah warga rusak dan 1.041 kepala keluarga terdampak.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyerahkan bantuan berupa kasur, selimut, dan sembako kepada korban banjir di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.

Pimpinan DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang)

ini meminta pemerintah daerah harus cepat dalam penyelesaian banjir ini. Dimana, daerah tersebut sudah sering terkena dampak banjir tetapi belum ada solusi untuk mencegahnya

“Desa Datahu merupakan wilayah yang selalu menjadi langganan banjir di setiap tahun, berharap ada solusi dari Pemerintah Daerah terkait untuk mengatasi banjir di daerah tersebut,”

Gobel saat menyalurkan bantuan kepada korban banjir.

Di sisi lain, Gobel juga menekankan pemberdayaan masyarakat dan kemampuan ekonomi masyarakat harus segera ditingkatkan jika ingin membangun sebuah kelembagaan masyarakat yang kuat.

“Melalui dua penguatan itu, maka masyarakat juga memiliki kemampuan swadaya dan memiliki kemandirian,” ucapnya

Untuk itu, ia mengajak masyarakat memperkuat sektor pertanian, koperasi, dan UMKM yang menjadi sumber ekonomi masyarakat. “Kita akan bekerja bersama-sama. Masyarakat yang kuat dan sejahtera merupakan solusi yang sesungguhnya,” tutupnya. ● es

Faisol Riza: Buka Sentra Vaksinasi di Pondok Pesantren

Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 sebesar 70 persen dari populasi penduduk menerima vaksin dosis pertama pada akhir Desember 2021 mendatang. Untuk mewujudkannya, perlu upaya gotong-royong dari seluruh elemen masyarakat.

yang sama. Tak terkecuali dalam hal vaksinasi Covid-19. Untuk itu harus disemangati agar mereka tidak merasa sendiri,” ujar Faisol.

Percepatan vaksinasi dosis kedua ini juga sebagai bentuk totalitas membantu pemerintah Indonesia melawan Covid-19 dengan pencapaian target herd immunity.

Seorang peserta vaksinasi Noviana mengaku bangga kepada Faisol Riza yang sudah dua kali membuka sentra vaksin. “Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Faisol Riza yang sudah memfasilitasi kami untuk divaksin,” ujar Noviana.

Seperti yang dilakukan oleh Anggota DPR RI Faisol Riza. Ketua Komisi VI DPR RI itu membuka sentra vaksinasi Covid-19 di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo dan Pondok Pesantren Al-Yasini, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur

Tercatat, sebanyak 10 ribu dosis vaksin disiapkan untuk sentra vaksinasi di kedua Pondok Pesantren tersebut. Adapun, kegiatan vaksinasi itu dibuka selama lima hari yakni dimulai dari hari Kamis 11 November hingga Senin 15 November 2021.

Hari pertama vaksinasi di Probolinggo dan Pasuruan menasar 2.000 peserta. Antusias masyarakat sangat tinggi, mulai dari nelayan, santri, abang becak, tukang kuli bangunan, pedagang, buruh tani, tokoh agama, dan masyarakat. Ribuan warga rela antri untuk mendapatkan suntikan vaksin dosis kedua demi meningkatkan herd immunity atau kekebalan tubuhnya dari serangan Covid-19 dengan mendapatkan suntikan berisi vaksin dosis kedua.

Faisol Rizal yang merupakan politisi dapil Pasuruan dan Probolinggo itu menjelaskan, peserta vaksinasi sangat bersemangat saat mendapat vaksin Covid-19. “Mereka ini juga masyarakat kami yang juga harus mendapat hak



Anggota DPR RI Faisol Riza saat membuka sentra vaksinasi di Pondok Pesantren. Foto: ist/mtl

ANTUSIAS MASYARAKAT SANGAT TINGGI, MULAI DARI NELAYAN, SANTRI, ABANG BECAK, TUKANG KULI BANGUNAN, PEDAGANG, BURUH TANI, TOKOH AGAMA, DAN MASYARAKAT.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat pada 6 November 2021, cakupan vaksinasi Kabupaten Probolinggo sudah 59,2 persen dari total sasaran vaksinasi sebanyak 890.667 orang. Sedangkan di Kabupaten Pasuruan, cakupan vaksinasi Covid-19 mencapai 54 persen dari total sasaran yang ditetapkan. Kegiatan vaksinasi yang digelar Faisol Riza diharap mempercepat cakupan vaksinasi di kedua daerah tersebut. ●
pun/es

Wahyu Sanjaya: Dengarkan Aspirasi dan Beri Bantuan kepada Masyarakat



Anggota DPR RI Wahyu Sanjaya saat bersama konstituennya. Foto: lsi/mvi

Menyerap dan menghimpun aspirasi dari konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, merupakan suatu kewajiban yang diemban oleh seorang Anggota Dewan. Aspirasi yang berhasil dihimpun, akan diperjuangkan diantaranya dalam sidang-sidang DPR RI.

Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat Sumatera Selatan, Anggota DPR RI Wahyu Sanjaya melakukan kegiatan kunjungan ke beberapa daerah yaitu Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Kehadiran wakil rakyat ini disambut penuh semangat oleh masyarakat Semende bersama sama tokoh

masyarakat Semende, tokoh agama dan tokoh pemuda pemudi Juga beberapa elemen masyarakat Kecamatan Semende.

“Untuk sekarang ini bahwa pembangunan dan usulan masyarakat yang disampaikan kepada kita, mengutamakan yang termasuk dalam skala prioritas dahulu, ujar Wahyu dihadapan masyarakat.

Ia mengungkapkan, dari semua yang telah diusulkan masyarakat, akan ditentukan skala prioritasnya. Baik itu

untuk usulan pembangunan dari sisi agama, dari sektor pertanian, ekonomi maupun yang lainnya.

Kita berharap apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat, itu yang kami utamakan,” egas Ketua Badan AKuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Wahyu juga menemui para petani, para pedagang untuk memberikan bantuan sembako, juga memberikan bantuan biaya tunai kepada para pedagang dan masyarakat yang kurang mampu di wilayah kecamatan SDT dan SDU.

“Walaupun kondisi hujan, kami tetap antusias untuk dapat bertemu dengan masyarakat. Sangat disayangkan, karena cuaca hujan jadi banyak para teman-teman kita yang hanya dapat melihat dari kejauhan. Kami berharap dan berdoa semoga masyarakat selalu diberikan kesehatan serta kekuatan oleh yang maha kuasa,” tandasnya. ●
tn/es

**DALAM RANGKAIAN
KEGIATAN TERSEBUT,
WAHYU JUGA MENEMUI
PARA PETANI, PARA
PEDAGANG UNTUK
MEMBERIKAN
BANTUAN SEMBAKO,**

Nur Azizah Tahmid: Salurkan Bantuan RS-RTLH di Dapil

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTHL) adalah program baru yang di bentuk oleh Kementerian Sosial dalam rangka membantu masyarakat miskin yang rumahnya tergolong tidak layak huni.

Anggota Komisi VIII DPR RI Nur Azizah Tahmid menggelar acara Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) RS-RTLH Tahun 2021 di Kantor Wali Kota Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, awal November 2021. Kegiatan Bimtek ini berlangsung atas kerja sama Nur Azizah bersama Kementerian Sosial,

Pemerintah Kota Depok dan Dinas Sosial Kota Depok.

Melalui rekomendasi Nur Azizah, di dapilnya Jawa Barat VI mendapatkan bantuan sebanyak untuk 100 KPM yang meliputi 80 KPM di Kota Depok dan 20 KPM di Kota Bekasi. Ia menjelaskan program perbaikan RTLH juga digulirkan oleh seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI di dapilnya masing-masing.

“Dengan total keseluruhan mencapai 100 unit, rinciannya 80 unit rumah

di Kota Depok dan Bekasi 20 unit rumah. Saat ini RS-RTLH di Kota Depok baru terealisasi 30 unit rumah dari 80. InsyaAllah akhir tahun ini semua terealisasi, karena itu menggunakan APBN 2021,” kata Nur Azizah.

Sebagaimana diketahui, RS-RTLH merupakan program yang digulirkan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kemensos RI. Nur Azizah telah menggulirkan dana APBN senilai Rp2 miliar untuk guna merehabilitasi rumah warga di Depok dan Bekasi yang tidak layak huni, menjadi layak huni.

Agar dana ini dapat dipergunakan secara optimal, politisi Fraksi PKS ini menegaskan akan terus mengawal agar tidak terjadi pemotongan-pemotongan oleh pihak mana pun.

“Rp20 juta ini diterima secara utuh dan itu semua dialokasikan untuk keperluan membeli material untuk rehabilitasi rumah. Tidak diperuntukan untuk hal-hal lainnya, apalagi sampai ada pemotongan diluar kebutuhan tersebut. Nanti ada laporannya terperinci, teknisnya akan disampaikan dalam bimtek ini, agar KPM dapat mengalokasikan dana ini dengan sebaik-baiknya”, jelas Nur Azizah.

Program ini turut mendapatkan apresiasi Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono. Ia mengapresiasi Nur Azizah atas kepeduliannya membangun kesejahteraan warga Depok, salah satunya melalui program Rehabilitasi RTLH. Sebanyak 30 KPM yang sudah menerima pencairan dana untuk Rehabsos RTLH ini masing-masing mendapatkan dana sebesar Rp20 juta, sedangkan sisanya menyusul. Pencairan ini dilakukan secara bertahap sampai akhir tahun 2021.

Turut hadir Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, Kepala Dinas Sosial Kota Depok Asloe'ah Madjri, Sub Koordinator Penguatan Fakir Miskin Wilayah 1 Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Haruman Hendarsah, Lurah Pancoran Mas, Lurah Tugu, Lurah Curug, Lurah Kalimulya, Lurah Jatimulya, Lurah Cisalak dan Lurah Mekarjaya, serta perwakilan 30 KPM. ● sf/es



Anggota DPR RI Nur Azizah Tahmid (kanan) menyerahkan bantuan RS-RTLH untuk masyarakat dapilnya. Foto: ISI/mv

Achmad Hafisz Tohir: Salurkan Bantuan kepada Pengurus Museum AK Gani

Ragam cara yang dilakukan oleh para Anggota Dewan untuk mendekatkan diri dan menunjukkan kepeduliannya kepada konstituen yang diwakilinya. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Anggota DPR RI Achmad Hafisz Tohir.

Diketahui, AK. Gani Gani merupakan pemimpin sekaligus pejuang pada masa kemerdekaan yang berasal dari Palembang, Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Museum Dr. AK. Gani didirikan untuk mengumpulkan, memamerkan, dan

Politisi Fraksi PAN ini memberikan bantuan sembako kepada pengurus museum Adnan Kapau (AK) Gani. Bantuan berupa 100 paket sembako tersebut diterima langsung perwakilan keluarga AK. Gani Gi Priyanti Gani dan Surawijaya di Kompleks Museum AK. Gani yang di jalan MP. Mangku Negara Sako, Palembang.

Hafisz Tohir mengatakan, bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat sekitar museum membutuhkan. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kepedulian bagi mereka yang terdampak pandemi Covid-19.

“Kegiatan ini adalah bagian dari meringankan pandemi Covid-19 bagi mereka yang terdampak. Saya dan keluarga masih terikat hubungan sebagai keluarga pejuang, ayah saya anak buah dari AK. Gani dan sempat ditunjuk sebagai camat,” ujar Hafisz Tohir.

Mewakili keluarga besar AK Gani, Gi Priyanti Gani dan Surawiljaya menyampaikan terimakasih atas kepedulian Hafisz Thohir. Ia mengatakan akan segera menyalurkan bantuan tersebut kepada yang berhak seperti tukang ojek, kaum Dhuafa dan Anak Yatim.

“Mengucapkan terimakasih kepada Hafisz Tohir yang telah memberikan bantuan kepada museum AK Gani



Anggota DPR Achmad Hafisz Tohir memberikan bantuan kepada pengurus Museum AK Gani. Foto: lsl/ml

semoga menjadi amal ibadah ditengah pandemi corona ini,” ungkap Gi Priyanti Gani.

melestarikan benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan kehidupan salah satu pahlawan nasional. • eko/es

Anwar Idris: 1000 Paket Sembako untuk Lingkungan Pesantren

Bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang terdiri dari 1000 paket, merupakan program bantuan SKK Migas yang diperjuangkan oleh Anggota DPR RI Anwar Idris yang merupakan mitranya di Komisi VII.

Anwar Idris bersama Ketua Yayasan Darul Ihsan Tgk. Musannif menyalurkan bantuan sosial Covid-19 sebanyak 1000 paket sembako tersebut kepada guru honorer, ustadz/ustadzah di Komplek Dayah (Pesantren) Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kalee, Gampong Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

“Tentu selain kita bagikan kepada para guru honorer, kami juga akan memberikannya kepada masyarakat Aceh Besar yang terdampak Covid-19. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan sosial ini, sedikitnya masyarakat kita dapat terbantu,” ujar Anwar Idris usai menyerahkan bansos.

Legislator dapil Aceh II tersebut mengharapkan agar ke

depannya Yayasan Darul Ihsan dapat terus diajak dalam berkontribusi pada aksi nyata dalam membantu masyarakat Aceh. Dengan cara berkolaborasi dengan dirinya selaku Anggota DPR RI asal Aceh.

Anwar Idris menyatakan, program bansos Covid-19 itu diberikannya untuk membantu masyarakat Aceh Besar yang terdampak pandemi Covid-19. “Saya satu-satunya anggota DPR RI asal Aceh yang ada di Komisi VII. Tak hanya itu, juga saya satu-satunya secara fraksi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang ada di sana. Jadi hal ini sangat senang saya bantu dan berikan,” ujar Anwar Idris.

Tidak hanya bantuan sosial tersebut yang diberikan untuk Aceh Besar melalui Yayasan Darul Ihsan. Namun ada juga program lampu Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang sudah dalam proses pengerjaan.

“Untuk Aceh Besar kita berikan 50 titik. Tentu ini sangat membantu dan mudah-mudahan ke depan bisa terus kita bantu hal-hal yang langsung berdampak bagi masyarakat,” jelas Anwar Idris. ● pun/es



Anggota DPR RI Anwar Idris saat menyalurkan bantuan dari SKK Migas di dapilnya. Foto: ist/nvl

Avila Bahar :

Muda, Tak Halangi Avila Jadi Pembalap Profesional

Buah Jatuh Tak Jauh dari Pohonnya, begitulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kiprah Avila Bahar, Juara nasional Kelas ITCR 1500 Rising Star di Sentul Series of Motorsport (ISSOM) 2021.

Ayah Avila, yakni Alvin Bahar merupakan pembalap nasional. Bahkan mending sang kakek, Aswin Bahar juga merupakan salah satu pembalap kebanggaan Indonesia. Berikut kisah yang dipaparkan Avila Bahar kepada Rahayu Setiowati dan Naefuroji dari **Parlementaria** baru-baru ini

Avila Bahar. Foto: qij/mv

KEINGINAN SENDIRI

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, keluarga besar Avila Bahar memang merupakan keluarga pembalap yang menjadi kebanggaan Indonesia. Meski demikian, siapa sangka jika kiprah Avila Bahar sendiri dalam dunia balap nasional tersebut bukan merupakan dorongan, apalagi paksaan dari orangtua, terutama sang ayah.

“Aku memang suka *sport*, awalnya suka main bola. Tapi begitu usia 11 tahun aku suka olahraga balap mobil, karena memang sering melihat Papa. Tapi awalnya Papa enggak *support* aku, mungkin karena Papa kira aku main-main saat itu. Tapi lama-lama setelah





Aksi Avila Bahar di Sirkuit. Foto: Dok



melihat kegigihanku, akhirnya papah *support* penuh aku. Bahkan ikut melatih atau mementori aku,” aku Avila.

Singkat cerita, Pria kelahiran 12 April 2002 ini mulai mengikuti ajang nasional digital motorsport lewat event Honda Brio Speed Challenge 1200 cc. Setelah itu Avila ikut menjajal diri lewat Indonesia Touring Car Championship (ITCC) 120 cc. Di kedua even tersebut Avila memang baru berhasil menjadi *runner up*, namun hal itu tidak menyurutkan langkahnya untuk terus menggeluti dunia balap nasional.

Didukung oleh sang ayah, yang tidak hanya memberikan motivasi, namun juga memberikan pengarahan tentang teknik dan pengalaman sebagai seorang pembalap, hal itu semakin menambah kepercayaan diri Avila. Hingga kemudian dalam ajang Indonesia Sentul Series of Motorsport (ISSOM) tahun 2020 lalu ia berhasil mencetak waktu tercepat di kelas Sentul Jazz Race. Di sini, ia turun sebagai *Privater*. Ia juga tampil lebih cepat dari peserta lainnya di kelas *Rising Star*, termasuk di Kategori Master.

“Deg-degan bukan karena takut ada celaka atau apa seperti yang orang bayangkan. Karena Kami selalu mengedepankan *safety riding*, jadi insyaAllah aman. Namun yang bikin

deg-degan itu dulu waktu pertama kali aku *riding* lawan orang dewasa yang berpengalaman. Umur aku 13 tahun waktu itu, yang paling muda setelah aku umur 20, itu yang bikim aku *deg-degan*,” tuturnya.

Tahun ini menjadi tahun keberuntungan tersendiri bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia ini. Pasalnya, ia secara resmi dikontrak untuk memperkuat Honda Racing Indonesia Team. Dikontrak tim pabrikan, karena sesuai kebutuhan tim dan kepentingan promosi, Avila harus turun di kelas ITCR 1500.

Dewi fortuna semakin mendekati Avila. Ia kembali berhasil menguasai putaran ke-5 ajang Indonesia Touring Car Race (ITCR) 1500cc *Rising Star* di Sentul International Circuit, Bogor, Minggu (7/11/2021) lalu. Dengan kemenangan tersebut, ia dipastikan meraih gelar juara nasional ITCR 1500 *Rising Star* pada musim 2021, kendati balapan masih menyisakan 1 putaran lagi pada Minggu (5/12/2021) mendatang.

DAPAT KIS DAN SURAT IJIN ORANGTUA

Mulai menjajal dunia balap di usia yang terbilang muda, yakni 13 tahun

memunculkan pertanyaan, pasalnya sebagaimana diketahui, selama ini SIM (surat izin mengemudi) baru dimiliki oleh seseorang yang berusia 17 tahun ke atas. Namun Avila di usia yang masih sangat muda tidak hanya bisa mengendarai mobil, lebih dari itu ia malah sudah mengikuti ajang balap nasional.

“Kalau Balap itu ketentuannya bukan SIM ya. *License* yang dipakai berbeda. Kami pakai KIS namanya, atau Kartu Izin Start. Selain itu ada surat izin dari orangtua. Itu sudah cukup,” jelas Avila.

Sementara usia 12 tahun, lanjutnya, memang masih belum diperbolehkan, mengingat kakinya belum sampai kursi. Namun jangan khawatir, bagi remaja yang tertarik untuk jadi pembalap nasional seperti dirinya, Avila memberikan solusi untuk mulai mengikuti ajang Gocar, atau mengikuti *racing simulator*.

“Bahkan sekarang, saat pandemi, *racing simulator* yang digital sedang berkembang. Pembalap professional pun menggunakan *racing digital* itu loh, karena kan saat pandemi seperti kemarin kita belum bisa menggelar ajang balap. Jadi simulator dipakai terus dan sekarang dipakai untuk penjenjangan dan pematangan,” papar cucu mendiang pembalap nasional Aswin Bahar ini.

Terkait dukungan pemerintah terhadap pembalap muda dan dunia balap professional, Avila berharap agar even atau gelaran balapan nasional diperbanyak. Hal ini semata untuk memunculkan bibit baru di dunia motorsport. Tidak hanya itu, dengan banyak ajang balapan nasional juga otomatis membuka lapangan pekerjaan baru untuk *engineer* otomotif dan seluruh kru yang terlibat di dalamnya.

Sebagaimana pembalap muda lainnya yang tengah menggeliat keinginan berprestasinya, Avila juga mengaku ingin mengibarkan sayap ke ajang internasional. Selain tentunya, ia masih ingin memperbaiki catatan waktu, plus meminimalisir kesalahan yang pernah dilakukan saat mengikuti ajang balap nasional. ● ayu/es

Meski Pandemi, KORPRI Tetap Mengabdikan



Sekjen DPR RI Indra Iskandar didampingi Ketua KORPRI dan pejabat di lingkungan Setjen DPR RI melakukan pemotongan tumpeng HUT ke-50 KORPRI . Foto: Gerai/mt

Di usia setengah abad, KORPRI Sekretariat Jenderal DPR RI tetap konsisten menjalankan tugas dalam mengabdikan terhadap bangsa dan negara meski di situasi pandemi Covid-19.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengapresiasi semangat para Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Di tengah banyaknya keterbatasan, KORPRI Setjen DPR tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

“Saya tahu, dalam menjalankan tugas melayani Anggota Dewan pasti banyak kesulitan dan keterbatasan. Namun, saya berharap kesulitan dan keterbatasan itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bekerja sigap dan tanggap,” ujar Indra saat membuka acara HUT ke-50 KORPRI Setjen DPR RI di Lapangan Jantung

Sehat DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat November lalu.

Momentum pandemi telah semakin membuat reformasi birokrasi dan reformasi struktural dapat lebih cepat dilakukan. Terlebih, pada masa pandemi sebagian besar birokrasi bekerja melalui rumah dan sebagian melalui kantor. Anggota KORPRI diharapkan dapat lebih memanfaatkan seluruh kawasan yang ada di sekitar untuk bekerja tidak selalu monoton dengan berada di dalam ruangan.

“Di era pandemi saat ini, yang berlangsung sudah hampir dua tahun menjadi momentum bagi sebagian

besar birokrasi. Tahun depan kita punya kantin yang baru, terbaik di Indonesia, dan terbesar. Bahkan, di atas kantin ada ruang band yang sangat representatif. Jadi, kita bisa bekerja dimanapun dan bisa lebih produktif serta tidak tertekan,” tutur Indra.

Pada momen tersebut, Sekjen DPR RI menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada KORPRI yang telah berusia ke-50 tahun untuk seluruh Anggota KORPRI Setjen DPR RI. Indra mengharapkan, KORPRI di usia emasnya dapat semakin jaya dan maju dengan semangat gotong royong menjaga kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“KORPRI juga harus menjalankan tugas pokok ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai simpul pemersatu bangsa yang selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, NKRI, dan kebhinekaan. Tugas mulia ini harus saudara-saudara jalankan dengan sebaik-baiknya. Keberadaan KORPRI harus sebagai motor penggerak pembangunan untuk menyampaikan program pembangunan nasional kepada masyarakat yang memberikan teladan,” pungkas Indra.

KORPRI Harus Lebih Berkontribusi

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Ketua KORPRI Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko meminta momentum peringatan HUT ke 50 ini dimaknai dengan baik oleh segenap Anggota KORPRI. Dimana, segenap anggota harus semakin memaksimalkan kesempatan di berbagai bidang yang dimiliki KORPRI dengan sebaik-baiknya agar ke depannya mampu semakin menjadi *partner* atau mitra yang strategis bagi Setjen DPR RI.

Terlebih lagi, KORPRI bukan hanya sekadar organisasi biasa, dimana di dalamnya berisikan berbagai kegiatan, misalnya di bidang seni, olahraga serta keagamaan.

“Terbukti, dalam momen perayaan HUT KORPRI ini menampilkan berbagai lukisan, tari-tarian dan pembacaan puisi yang merupakan hasil karya tiap bidang Anggota KORPRI. Dengan demikian,

melalui pergelaran tersebut juga dapat mencerminkan kepada masyarakat luar bahwa DPR secara kelembagaan tidak hanya berisikan satu aspek politik saja,” ujar Kepala Pusat Teknologi Informasi Setjen DPR RI tersebut.

Peringatan HUT ke-50 KORPRI Setjen DPR RI kali ini digelar dengan konsep *open speech* agar dapat semakin membuka ruang bagi seluruh anggotanya untuk bisa memanfaatkan sebaik mungkin ruang terbuka yang ada di Kompleks Parlemen. “Maka harus kita manfaatkan dan berterima kasih kepada Pak Sekjen dan jajaran yang telah memfasilitasi, sehingga berbagai kegiatan bisa kita laksanakan,” tandas Djaka.

Djaka berharap dalam momen HUT KORPRI ke-50 tahun ini seluruh Anggota KORPRI dapat memberikan kontribusi

dan upaya sebagai awal perjuangan KORPRI di usia ke-50 tahun. “Mudah-mudahan, dengan upaya kita semua di bawah pimpinan Setjen kita berharap KORPRI ini bisa seperti tema HUT kita, yaitu ASN bersatu, KORPRI tangguh dan Indonesia Tumbuh,” pungkas Djaka.

Seperti diketahui, momen HUT KORPRI Setjen DPR RI ini dibuka dengan pemotongan tumpeng dan pemotongan kue oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar didampingi jajaran pejabat tinggi Setjen DPR RI antara lain Deputi Bidang Persidangan Damayanti, Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul, Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha serta pegawai di lingkungan Setjen DPR RI. Turut hadir, Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah dan Ketua KORPRI Setjen DPD RI Oni Choiruddin. • tn/es



Ketua KORPRI Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko. Foto: Gerald/rw/



Oleh : Astuti Apriani, S.ST., M.Keb
Dosen di STIKES Merangin, Jambi

Mengenal 1000 hari pertama kehidupan

Membentuk gaya hidup sehat dan memenuhi asupan nutrisi seimbang sebaiknya mulai diterapkan dari awal masa kehamilan, hal ini dapat mencegah buah hati mengalami kekurangan gizi, diabetes, obesitas dan tumbuh lebih pendek (stunting) yang mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Dalam jangka panjang, Kekurangan gizi pada awal kehidupan buah hati akan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Hal ini akan mempengaruhi terhadap keberhasilan pendidikan yang mengakibatkan menurunnya produktivitas pada usia dewasanya.

Apa yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan?

Masa 1000 hari pertama kehidupan adalah masa dimulai sejak pertama kali terjadinya pembuahan, atau terbentuknya janin dalam kandungan, sampai dengan buah hati berusia 2 tahun. Masa 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) terdiri dari 270 hari selama kehamilan sampai dengan persalinan, 365 hari pada 1 tahun pertama dan 365 hari pada tahun ke 2 kehidupan buah hati.

Mengapa 1000 Hari Pertama Kehidupan disebut Periode Emas Pertumbuhan buah hati?

1000 Hari Pertama Kehidupan disebut juga sebagai PERIODE EMAS buah hati, karena pada periode ini otak dan seluruh organ akan berkembang sangat pesat .

Kekurang gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan sejak buah hati dalam kandungan sampai berusia 2 tahun, tidak bisa digantikan dimasa kehidupan selanjutnya

Apa saja kebutuhan 270 hari pertama ibu dan buah hati?

Pada masa 270 hari pertama yaitu masa kehamilan. Hal terpenting pada

MEMENUHI KEBUTUHAN SELAMA MASA KEHAMILAN:

- Mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, asam folat, omega 3 dan DHA, zat besi, kalsium dan vitamin D, lemak dan minyak. Mengonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan
- Mendapat imunisasi TT sebelum hamil
- Memeriksa haemoglobin
- hindari merokok, jangan minum minuman bersoda, beralkohol, jangan makan mie instan sebagai makanan pokok, hindari makanan berpengawet, dan jangan minum obat tanpa resep dokter
- Mendapatkan informasi yang lengkap tentang ASI dan manfaatnya, IMD, ASI eksklusif, perawatan bayi, menyiapkan makanan pendamping ASI, imunisasi
- Lakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan ke Bidan atau fasilitas kesehatan, minimal 4 kali selama masa kehamilan untuk memantau pertumbuhan janin
- Persalinan sebaiknya dilakukan di fasilitas kesehatan yang memadai dan oleh tenaga kesehatan profesional serta menggunakan alat-alat steril



masa kehamilan adalah memperhatikan gizi yang dibutuhkan ibu dan buah hati. Kebutuhan gizi ibu akan meningkat pada masa kehamilan, khususnya kebutuhan energi, protein, serta beberapa jenis vitamin dan mineral. Selain itu, jumlah asupan makanan perlu memperhatikan.

Apa saja kebutuhan 730 Hari (tahun pertama dan tahun kedua) ibu dan buah hati?

Hal yang harus diperhatikan pada kehidupan 730 hari selanjutnya, yaitu:

ASUPAN GIZI SEIMBANG

Asupan gizi yang seimbang mencegah terjadinya stunting. Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. Setelah kelahiran sampai dengan usia buah hati 2 tahun, perlu diperhatikan asupan gizi diantaranya Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan, ASI diteruskan hingga usia anak 2 tahun, dan Makanan Pendamping ASI (MPASI) sejak bayi berusia 6 bulan.



PENCEGAHAN PENYAKIT DAN PEMBERIAN IMUNISASI

Penyakit yang umum menyerang buah hati di periode ini yaitu penyakit infeksi. Buah hati yang sering sakit membuat pertumbuhan dan perkembangannya menjadi tidak optimal. Sebagian besar penyebab kematian anak adalah penyakit infeksi yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi yaitu diare, infeksi saluran nafas (pneumonia), DHF, TB Paru, dan Campak.

STIMULASI TUMBUH KEMBANG BUAH HATI

Pertumbuhan adalah berat badan dan tinggi badan. Perkembangan meliputi 4 aspek yaitu :

- Motorik kasar : berdiri, berjalan, berlari, melompat, telungkup, dan duduk
- Motorik halus : memegang barang kecil, menulis, memegang sendok, cangkir
- Kemampuan bahasa : memahami pembicaraan, berbicara, bercerita
- Personal sosial : kemampuan mengenal orang-orang disekitarnya dan mandiri
- Hal yang perlu diperhatikan pada proses perkembangan buah hati
- Menjaga kebersihan makanan dan minuman
- Menjaga kebersihan alat-alat makan dan minum
- Menjaga higienitas dan sanitasi
- Menjaga kebersihan diri dan lingkungan
- Membiasakan buah hati untuk mandi sehari dua kali dan mengganti pakaiannya jika kotor atau lembab
- Membiasakan buah hati untuk mencuci tangan dengan sabun
- Menggunakan alas kaki jika keluar rumah
- Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar rumah



Apa yang akan terjadi jika buah hati tidak mendapatkan gizi yang cukup di Periode Emas ini?

- Pertumbuhan otak terhambat, anak tidak cerdas
- Pertumbuhan jasmani dan perkembangan kemampuan anak terhambat, dan anak menjadi pendek (stunting)
- Buah hati menjadi lemah dan mudah sakit
- Berkurangnya kecerdasan buah hati serta ketangkasan berpikirnya
- Ketika dewasa, akan berisiko tidak

berprestasi saat di sekolah dan tidak produktif saat bekerja

Kualitas hidup buah hati di masa depan sangat dipengaruhi oleh gizi yang diterima selama 1.000 HPK. Inilah mengapa masa 1.000 HPK disebut sebagai periode emas untuk membangun dasar tumbuh kembang buah hati yang sempurna. Mempersiapkan 1000 hari pertama kehidupan buah hati merupakan hal yang sangat penting. Siapkan buah hati menjadi generasi maju dan sehat sejak dalam kandungan. ●



Madakaripura :
Air Terjun Indah
nan Bersejarah

Gunung Bromo telah mashur di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara, keindahan matahari terbitnya membuat para pelancong terpesona. Namun akan terasa kurang jika sudah berkunjung ke Bromo tapi tidak melengkapi agenda pelisiran ke air terjun Madakaripura. Air terjun nan indah serta mengandung nilai sejarah.

Nama madakaripura berasal dari tiga kata yaitu mada diambil dari nama seorang Patih Kerajaan Majapahit yakni Gajah Mada. Kari memiliki makna peninggalan. Sementara pura memiliki makna sembahyang atau semedi. Jadi, madakaripura memiliki makna Gajah Mada yang sedang meninggal di kala sembahyang.

Air Terjun ini memiliki pemandangan cukup memesona. Airnya jernih, kemudian tebing-tebing yang tinggi semakin menambah keistimewaan kawasan ini. Air terjun ini berbentuk ceruk, dikelilingi bukit-bukit, dan di setiap dinding tebingnya dialiri air yang berasal dari atas Gunung Bromo. Setiap tetesannya akan membasahi tubuh para wisatawan, seolah-olah sedang terjadi hujan. Percikan-percikan air inilah yang disebut hujan abadi.

Menurut warga sekitar air terjun di Madakaripura tidak pernah kering meski di musim kemarau. Debitnya pun statis tidak bertambah maupun berkurang baik pada musim penghujan atau pun musim panas. Di sekitar air terjun terdapat sebuah pemandangan hijau yang menawan. Pemandangan hijau ini ada lantaran banyaknya air yang turun dari atas ke bawah. Sungguh, tempat yang cocok dijadikan sebagai tempat untuk mengambil foto dan gambar.

Air terjun ini turun dengan bentuk pola aliran radial sentrifugal. Artinya, satu titik yang menyebar. Jadi, bila kita lihat lebih dalam, air terjun ini akan menyebar. Sehingga seperti air hujan. Mengesankan sekali memang. Apalagi, saat matahari menyinari kawasan air hujan ini. Keindahan Madakaripura pun terasa paripurna karena air terjun ini memiliki latar belakang sejarah yang menarik.

Menurut cerita warga sekitar, Patih Gajah Mada menghabiskan sisa hidupnya di air terjun ini. Bahkan, hingga patih itu meninggal. Dia tetap berada disini untuk merenungi apa yang telah dilakukannya. Seperti diketahui bahwa, Mahapatih Gajah Mada pergi ke tempat ini ketika, beliau dicopot sebagai



Akses menuju air terjun Madakaripura. Foto: Eko/NW

Mahapatih. Pencopotan jabatan tersebut lantaran, Gajah Mada telah membantai ratusan orang yang berada di Kerajaan Sunda Galuh.

Cerita mengenai Mahapatih Gajah Mada ini diperkuat dengan hadirnya Arca Gajah Mada yang berada di kawasan ini. Tepatnya berada di muka kawasan air terjun. Namun ada sudut pandang cerita yang berbeda, pada zaman dahulu kala, Kerajaan Majapahit memberikan sebuah desa yang bernama Sukapura sebagai hadiah atas kerja keras Mahapahit dalam membela kerajaan. Selain itu, ia juga sekaligus menghargai tekad dan kerja keras Gajah Mada dalam mempersatukan nusantara dengan sumpahnya yang terkenal dengan sebutan 'Sumpah Palapa'.

Lantas tempat ini menjadi peristirahatan terakhir atau pertapaan pati Gajah Mada pada masa Kerajaan Majapahit. Selain indah, air terjun ini memiliki juga ternyata memiliki banyak nilai sejarah. Mengunjungi tempat ini, wisatawan bisa memulai dari Kabupaten Probolinggo lalu dilanjutkan menuju Desa Sukapura.

Air terjun Madakaripura memiliki ketinggian kurang lebih 1.000 mdpl. dengan ketinggian ini, membuat suasana di sekitar air terjun begitu sejuk dan teduh. Siapa pun akan terhipnotis dengan nuansa yang berbeda dari air terjun yang lainnya. Unikny lagi, air terjun ini berbentuk gua dengan



Salah satu air terjun sebelum sampai ke Madakaripura. Foto: eko/nw

ketinggian kurang lebih 200 meter, dan memiliki luas kurang lebih 25 meter. Air terjunnya pun melingkar. Nah, sebelum menuju air terjun utama, wisatawan akan disambut dengan 4 air terjun. Dimana, salah satunya berbentuk seperti sebuah rongga.

Disarankan bagi wisatawan membawa jas hujan. Karena, saat tiba di air terjun ini wisatawan berada di wilayah seperti air hujan yang cukup deras. Demi mengamankan diri dan barang bawaan sangat disarankan untuk membawa jas hujan. Bagi wisatawan yang mempunyai jiwa petualangan dan senang memacu adrenalin, tempat ini sangat layak dikunjungi, terlebih bagi yang punya ketertarikan pada cerita sejarah •eko/es



Abdul Hakim Bafagih: Bersepeda, Cara Jaga Kebugaran

Bersepeda menjadi salah satu kegiatan favorit masyarakat di saat pandemi Covid-19 untuk menjaga vitalitas. Tentu beraktivitas olahraga di luar ruang itu dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tak sedikit masyarakat yang merogoh kocek besar untuk membeli sepeda demi kenyamanan saat berolahraga.

Rupanya, kebiasaan bersepeda itu juga sudah dilakukan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih jauh sebelum olahraga yang dikenal 'gowes' itu hits seperti saat ini. Hakim mengakui bahwa bersepeda adalah hobinya. Namun sayang, Covid-19 membuatnya sempat menghentikan

hobi tersebut dan beralih ke kegiatan fisik lain.

"Saya suka sepedaan, sebelum ngehits seperti sekarang ini juga sering sepedaan. Cuman karena Covid-19 ini, akhirnya jarang. Jadi saya alihkan ke jogging," kata Hakim kepada salah satu media nasional, beberapa waktu yang lalu. Politisi PAN itu mengaku, jika tak

berolahraga, tubuhnya akan menjadi lemas, sehingga ia mengalihkan kegiatan bersepedanya ke jogging.

Menjalani tugas sebagai Anggota Dewan yang memiliki kegiatan yang padat, Hakim merasa harus menjaga kebugaran dan stamina melalui olahraga. Melalui olahraga juga dapat menghindari stres dengan *me-refresh* pikiran. Selain itu Hakim juga mengaku, sangat menyukai *traveling*.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII itu mengaku suka naik gunung, dan jika harus memilih antara pantai dan gunung, maka gununglah pilihannya. "*Traveling* saya suka. Kalau yang saya suka naik gunung, sebenarnya. Lebih pilih gunung, sih, daripada pantai," jawab Anggota DPR RI milenial itu. ● sf



Abdul Hakim Bafagih. Foto: dok

Memetik Makna Sarung untuk Mengurung Ketamakan Duniawi

Sarungan atau memakai sarung merupakan kebiasaan yang sangat lumrah di wilayah nusantara. Sarung sering digunakan saat upacara-upacara adat dan secara ritual keagamaan. Bahkan saat ini sarung sudah menjadi sarana *branding* politik, simbol keterwakilan dan representasi kaum tertentu yang menjunjung tradisi bersarung.

Dalam budaya pesantren sarung memiliki makna filosofi yang tinggi. Sarung bagi para kaum santri berasal dari kata “sarune dikurung” dalam bahasa Jawa saru adalah sesuatu yang tidak layak ditampilkan, harus dikurung dan ditutupi. Ini merupakan intruksi kehidupan, agar manusia mengedepankan rasa malu, tidak sombong, tidak arogan, apa lagi sembrono.

Pada momentum hari santri 22 Oktober, Fraksi PKB berusaha mengangkat ajaran filosofis yang terkandung pada sarung. Sebanyak 58 anggota DPR RI dari Fraksi PKB terlihat mengenakan sarung berwarna hijau saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/11). Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat memimpin Rapat Paripurna mengatakan, “Selamat Hari Ulang Tahun Fraksi PKB yang ke 22 tahun, makanya hari ini mereka semua pakai sarung, sekaligus mengucapkan hari santri 2021, simbol sarungnya.”

Sementara itu Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan mengenakan sarung

sebagai peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada Jumat 22 Oktober lalu. “Hari ini karena masih dalam momentum 22 Oktober, Hari Santri Nasional. Pas kita memasuki paripurna pertama, karena PKB komitmennya terus menerus berjuang apa yang selama ini boleh dikatakan ‘termarginalkan’, kaum sarungan atau santri atau para ulama itu,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senin (1/11/2021).

Menurutnya sarung adalah budaya busana khas santri yang sehari-hari dipakai saat menempuh pendidikan di pesantren maupun ketika sudah berkiprah di tengah masyarakat. Sarung, menurut Cucun juga menjadi ciri khas dari masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. Cucun mengatakan dengan mengenakan sarung dalam forum resmi kenegaraan juga menjadi simbol jika saat ini peran santri telah resmi diakui negara melalui berbagai regulasi kebijakan maupun kesetaraan perlakuan.

Lebih lanjut, Cucun mengungkapkan syukur atas perjuangan fraksinya dalam mendorong berbagai regulasi untuk pesantren dalam beberapa tahun terakhir membuahkan hasil positif, seperti menginisiasi pembentuk UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren hingga mengawal realisasi dana abadi pesantren.

Sarung telah menjadi politik identitas dan budaya, Presiden Gus Dur kerap gunakan sarung dan sandal jepit, bahkan mengizinkan pengunjung istana pakai sarung dan sandal. Presiden Jokowi, pada acara tertentu secara percaya diri gunakan sarung lengkap dengan atasan jas, dia pun mengajak masyarakat menggunakan sarung sebagai ciri khas tradisi nusantara. ●eko/es



Para wakil rakyat tampak kompak kenakan sarung. Foto: Jaka/rvi



SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



RACHMAT GOBEL
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KORINBANG



LODEWIJK F. PAULUS
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KORPOLKAM



PUAN MAHARANI
KETUA DPR RI



SUFMI DASCO AHMAD
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KOREKKU



A. MUHAIMIN ISKANDAR
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KORKESRA

MENGUCAPKAN SELAMAT :



*Hari Guru
Nasional
2021*

25 November 2021

Pahlawan Tanpa Tanda Jasa